

REVIEW PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2020 DAN USULAN PERBAIKANNYA UNTUK TAHUN 2021



REVIEW PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2020 DAN USULAN PERBAIKANNYA UNTUK TAHUN 2021

Penulis

Nurkholis, M.S.E.

Review Penganggaran dan Pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dan Usulan Perbaikannya untuk Tahun 2021

ISBN: 978-623-6080-42-9

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, DJPK,
Kementerian Keuangan

Penulis:

Nurkholis, M.S.E.

Kontributor:

Dony Suryatmo Priyandono
Khendra Al Asyari
Helmy Rukmana
Ilham Budiarto
Rian Kelana Ednur
Wahyu Prihantoro

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani
Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

KATA PENGANTAR

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu bentuk *performance-based grant system* (PBGs) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2010. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Besaran alokasi DID terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2010 anggarannya sebesar Rp. 1,2 triliun dan pada tahun 2020 telah mencapai Rp.13,5 triliun untuk DID Reguler dan Rp.5 triliun untuk DID Tambahan. Alokasi DID awalnya adalah sebesar Rp. 15 triliun, namun dilakukan penyesuaian setelah terjadinya pandemi COVID-19 sehingga menjadi Rp. 13,5 triliun untuk DID Reguler dan terdapat DID Tambahan sebesar Rp.5 triliun pada tahun berjalan.

Kajian tentang *review* penganggaran dan pengalokasian DID tahun 2020 dan usulan perbaikannya untuk DID tahun 2021 ini disusun untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kebijakan DID dari waktu ke waktu khususnya DID Reguler tahun 2020 ke 2021, sehingga dapat terdokumentasikan dengan baik terkait dengan latar belakang, alasan, tujuan dan proses dari dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID Reguler ke depan, baik terkait dengan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID Reguler, indikator kriteria utama, indikator kriteria kinerja, dan berbagai hal lainnya yang terkait.

Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) secara rutin tiap tahun sejak tahun 2016 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk melakukan *review* terkait penganggaran dan pengalokasian DID tahun sebelumnya dan menyusun usulan perbaikan DID untuk tahun berikutnya, dimana pada kajian ini adalah melakukan *review* terhadap penganggaran dan pengalokasian DID Reguler tahun 2020 dan menyusun usulan perbaikan untuk DID Reguler tahun 2021. Hal tersebut tentunya selaras dengan Program KOMPAK yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan juga berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah aktif memberikan input dalam diskusi terkait penyusunan kajian ini. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan perbaikan kebijakan panganggaran dan pengalokasian Dana Insentif Daerah untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 ke depan.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID telah dialokasikan kepada daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sejak tahun 2010, dan direncanakan terus dilanjutkan untuk tahun 2021 dengan besaran alokasinya yang terus meningkat secara signifikan khususnya dalam periode tahun 2016-2020. Kebijakan pengelolaan DID selama ini diatur dalam Undang-Undang tentang APBN (tiap tahun), Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden tentang Rincian APBN (tiap tahun) dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk DID tahun 2020, PMK yang mengatur terkait pengelolaan DID adalah PMK No. 141/PMK.07/2019.

Dalam penganggaran dan pengalokasian DID, terdapat beberapa hal yang diatur, khususnya dalam No. 141/PMK.07/2019, antara lain berupa indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID, penyediaan data DID, dan penghitungan dan penetapan alokasi DID untuk DID tahun depannya. Penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2020 telah dilakukan dan diumumkan oleh Pemerintah pada akhir Oktober 2019 dengan total alokasi sebesar Rp. 15 triliun, yang didistribusikan kepada 416 Pemerintah Daerah (307 kabupaten, 81 kota dan 28 provinsi) yang berhak menerima sesuai dengan capaian pemenuhan kriteria utama dan kategori kinerja. Besaran alokasi DID tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp. 15 triliun tersebut tertuang dalam UU tentang APBN Tahun 2020 dan terinci dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 untuk setiap daerah penerimanya (provinsi dan kabupaten/kota).

Terjadinya wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang juga melanda Indonesia, menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020. Perpu tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan

Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang terbit pada 3 April 2020. Dalam Perpres tersebut dilakukan penyesuaian terhadap alokasi DID pada tahun 2020, yaitu turun sebesar Rp. 1,5 triliun (10 persen) sehingga menjadi Rp. 13,5 triliun. Untuk rincian penyesuaian pengalokasian DID per daerah dilakukan melalui PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Penyesuaian alokasi DID untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara proporsional berdasarkan pagu alokasi DID. Penyesuaian dilakukan untuk seluruh kelompok kategori DID, kecuali untuk kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan.

Tujuan dari penyusunan kajian tentang *Review* Penganggaran dan Pengalokasian DID Reguler Tahun 2020 dan Usulan Perbaikannya untuk Tahun 2021 ini adalah untuk: (a) Memperkirakan besaran penganggaran terkait dengan nilai indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID Reguler tahun 2021 ke depan; (b) *Me-review* penghitungan alokasi DID Reguler tahun 2020, baik untuk kriteria utama maupun kriteria kinerja; dan (c) Menyusun saran/rekomendasi terkait penganggaran dan penghitungan alokasi DID Reguler tahun 2021 ke depan.

Indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID Reguler pada tahun 2021 sebaiknya tidak menurun, minimal dapat dipertahankan dan bahkan sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya (tahun 2020, setelah penyesuaian). Dari hasil proyeksi, dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi minimal menjadi Rp. 15,2 triliun (meningkat minimal 12,68 persen dari tahun 2020). Hal tersebut tentunya dengan asumsi bahwa wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah mulai mereda dan kondisi keuangan negara sudah membaik dan stabil.

Kriteria utama yang perlu dipertahankan dalam DID Reguler tahun 2021 adalah: (i) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (ii) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan (iii) Pelaksanaan e-government (*e-procurement* dan *e-budgeting*). Dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID Reguler, sebaiknya tetap menggunakan kluster seperti DID tahun-tahun sebelumnya (khususnya DID untuk tahun 2020), yaitu menurut jenis pemerintahan daerahnya yang berjumlah 3 kluster, yakni provinsi, kabupaten, dan kota.

Dari semua kelompok kategori, koefisien korelasi daerah penerima DID antara tahun 2019 dan 2021 cukup rendah (baik), kecuali untuk tiga kelompok kategori, yaitu kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kategori Penyelenggaraan Pemerintah dan kategori Pengelolaan Sampah. Untuk ketiga kategori tersebut, koefisien korelasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang menerima DID pada tahun sebelumnya, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan DID kembali pada

tahun berikutnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi dalam penentuan daerah penerimanya untuk ketiga kelompok kategori tersebut;

Data yang relatif kurang *up to date* dalam penghitungan DID umumnya adalah data-data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat sumber data yang dilakukan melalui Susenas (yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September), dan juga waktu penetapan dan penghitungan alokasi DID yang baru diumumkan paling cepat akhir Oktober pada tahun yang bersangkutan, sebenarnya terdapat potensi untuk menggunakan data yang lebih *up to date*. Tentunya hal ini perlu dikomunikasikan dengan BPS sebagai penyedia data terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kinerja kesejahteraan masyarakat;

Terkait dengan indikator-indikator kinerja yang penilaiannya menggunakan kombinasi capaian tahun terakhir dan nilai perubahannya (delta) dari tahun sebelumnya, sebaiknya ke depan nilai perubahannya (delta) mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot pencapaian nilai terakhir. Indikator dan target kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai dasar dalam penambahan, pengurangan atau perbaikan terhadap indikator dalam berbagai kategori kinerja yang digunakan dalam penghitungan alokasi DID ke depan; dan

Untuk kategori kinerja dalam DID tahun 2021 ke depan, perubahan indikator kinerja yang sebaiknya dilakukan antara lain:

- ☑ Menghilangkan kategori kualitas realisasi belanja pada kelompok kategori Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- ☑ Mengganti indikator dalam kategori pembiayaan kreatif, sehingga menjadi tidak hanya pinjaman daerah dari PT SMI, namun pinjaman daerah secara lebih luas, serta memasukkan KPBU dan obligasi daerah;
- ☑ Dalam kategori *mandatory spending*, menghilangkan indikator belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari DTU. Dalam kategori ini ditambahkan dengan pemenuhan anggaran untuk APIP dan pemenuhan penyesuaian belanja barang & jasa dan belanja modal dalam APBD sesuai SKB Menkeu dan Mendagri;
- ☑ Dalam kategori ketepatan waktu pelaporan, ditambahkan indikator Penyampaian Laporan Penyesuaian APBD ke Kementerian Keuangan, yang paling lambat tanggal 23 April 2020 dan penyampaian laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- ☑ Nilai rata-rata UN sekolah menengah pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan diganti dengan Indeks Pemerataan Guru (IPG) PNS;
- ☑ Indikator persentase stunting pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang digunakan adalah stunting balita, bukan stunting baduta;

- ☑ Pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, ditambahkan dengan kategori proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak (rumah layak huni);
- ☑ Untuk kelompok kategori kesejahteraan masyarakat, ditambahkan kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
- ☑ Pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan, ditambahkan untuk Kategori Inovasi Daerah berupa Realisasi kesepakatan kerjasama daerah, Kategori penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perijinan, Kategori perluasan pelayanan terpadu pada sektor perijinan, dan Kategori pelayanan Administrasi Kependudukan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN	9
3. INDIKASI KEBUTUHAN DANA TKDD UNTUK DID TAHUN 2021	11
4. REVIEW PENGHITUNGAN ALOKASI DID TAHUN 2020 DAN USULAN PERBAIKAN UNTUK DID TAHUN 2021	17
4.1. Kriteria Utama	17
4.2. Kategori Kinerja	22
5. KLUSTER PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DID	23
5.1 Hubungan Antar Kategori Kinerja	25
5.2 Ke-up to date-an, Ketersediaan dan Kestabilan Data yang Digunakan	27
5.3 Penambahan/Pengurangan Kategori dan Indikator Kinerja	31
6. SARAN/REKOMENDASI	87
7. DAFTAR PUSTAKA	91
8. LAMPIRAN	93
Lampiran 1. Persentase DID terhadap TKDD Se-Provinsi (Konsolidasi) Tahun 2011-2019 (Persen)	93
Lampiran 2. Persentase DID terhadap Penerimaan APBD Se-Provinsi (Konsolidasi) Tahun 2011-2019 (Persen)	95
Lampiran 3. Indikator untuk Kriteria Utama dan Kategori Kinerja DID Tahun 2020	97
Lampiran 4. Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Tahun 2020	100
Lampiran 5. Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Besar Penerimaan untuk DID Tahun 2020 (Semula)	101
Lampiran 6. Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Besar Penerimaan untuk DID Tahun 2020 (Setelah Penyesuaian)	102
Lampiran 7. Usulan Indikator untuk Kriteria Utama dan Kategori Kinerja DID Tahun 2021	103

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kategori Kinerja dalam Perhitungan Alokasi DID Tahun 2020.....	3
Tabel 1.2 Perubahan Pagu Alokasi Menurut Kelompok Kategori Kinerja DID 2020.....	5
Tabel 1.3 Nilai Maksimal Alokasi Menurut Kelompok Kinerja dan Potensial Maksimal Penerimaan DID Tahun 2020.....	6
Tabel 3.1 Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID Tahun 2021.....	13
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama (<i>Eligible</i>) dan Daerah Penerima DID Tahun 2017-2020.....	18
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama DID Tahun 2017-2020.....	18
Tabel 4.3 Perkembangan Opini BPK WTP atas LKPD untuk DID Tahun 2017-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2023.....	19
Tabel 4.4 Perkembangan Penetapan Perda APBD Tepat Waktu untuk DID Tahun 2017-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2022.....	20
Tabel 4.5 Perkembangan Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> untuk DID Tahun 2018-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021- 2024.....	20
Tabel 4.6 Perkembangan Pelaksanaan E-Budgeting untuk DID Tahun 2018-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2024.....	21
Tabel 4.7 Perkembangan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP untuk DID Tahun 2019-2020.....	21
Tabel 5.1 Daerah yang Tidak Menerima DID dan Rinciannya Menurut Karakteristik Daerah pada DID Tahun 2018-2020.....	24
Tabel 5.2 Persentase Daerah yang Tidak Menerima DID terhadap Masing-Masing Karakteristik Daerah Dikarenakan Tidak Memenuhi Kriteria Utama untuk DID Tahun 2018-2020 (Persen).....	25
Tabel 5.3 Korelasi Antar Kelompok Kategori Kinerja untuk Daerah Penerima dan Besaran Penerimaan DID Tahun 2019 dan 2020 (Sebelum Penyesuaian).....	26
Tabel 5.4 Waktu (Tahun) dan Sumber Data untuk DID Tahun 2020.....	28
Tabel 5.5 Upaya Pemerintah Daerah di Tahun 2020 untuk Pencapaian DID Tahun 2021.....	29
Tabel 5.6 Upaya Pemerintah Daerah di Tahun 2020 untuk Pencapaian DID Tahun 2022.....	30
Tabel 5.7 Korelasi Pajak Daerah dan PRRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016.....	35
Tabel 5.8 Korelasi Retribusi Daerah dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016.....	35
Tabel 5.9 Statistik Deskriptif Belanja Modal Pendidikan Non-Kantor terhadap Belanja Pendidikan untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	36
Tabel 5.10 Statistik Deskriptif Belanja Modal Kesehatan untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	39
Tabel 5.11 Statistik Deskriptif Realisasi Belanja Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	41
Tabel 5.12 Pembiayaan Kreatif Tahun 2019 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	43
Tabel 5.13 Perkembangan Kepatuhan Daerah dalam <i>Mandatory Spending</i> Tahun 2019 untuk DID Tahun 2019.....	44

Tabel 5.14 Perkembangan Kepatuhan Daerah dalam Ketepatan Waktu Pelaporan Tahun 2019 untuk DID Tahun 2020.....	45
Tabel 5.15 Statistik Deskriptif Peta Mutu Pendidikan untuk DID Tahun 2020.....	46
Tabel 5.16 Statistik Deskriptif Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2020	48
Tabel 5.17 Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2020	50
Tabel 5.18 Statistik Deskriptif Penanganan <i>Stunting</i> untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	52
Tabel 5.19 Statistik Deskriptif Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	55
Tabel 5.20 Statistik Deskriptif Persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	57
Tabel 5.21 Statistik deskriptif Sumber Air Minum Layak untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	59
Tabel 5.22 Statistik Deskriptif Akses Sanitasi Layak untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	61
Tabel 5.23 Statistik Deskriptif Persentase Penduduk Miskin untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	64
Tabel 5.24 Statistik Deskriptif IPM untuk DID Tahun 2020.....	66
Tabel 5.25 Daerah Penerima DID untuk Kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2020 (Rp. Juta).....	68
Tabel 5.26 Daerah Penerima DID untuk Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020 (Rp. Juta).....	69
Tabel 5.27 Daerah Penerima DID untuk Kategori SAKIP dan Nilai SAKIP Tahun 2019-2020 (Rp. Juta).....	70
Tabel 5.28 Daerah Penerima DID untuk Kategori Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019-2020 (Rp. Juta).....	73
Tabel 5.29 Daerah Penerima DID untuk Kategori Inovasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Rp. Juta) dan Nilai Inovasi Tahun 2018	75
Tabel 5.30 Daerah Penerima DID untuk Kategori Pengelolaan Sampah Tahun 2019 – 2020 (Rp. Juta)	77
Tabel 5.31 Statistik Deskriptif Peningkatan Investasi untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	78
Tabel 5.32 Statistik Dekriptif Peningkatan Ekspor untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	81
Tabel 5.33 Indikator dan Target Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2020- 2024.....	83

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Alokasi DID Tahun 2020 - 2020 (Rp. Triliun).....	2
Gambar 3.1 Alokasi DID Terhadap TKDD dan APBN Tahun 2010 - 2020 (Persen)	12
Gambar 3.2 Jumlah Daerah Penerima DID Tahun 2020 - 2020	14
Gambar 3.3 Persentase Daerah Penerima DID Tahun 2010 - 2020 (Persen).....	15
Gambar 3.4 Rata-Rata Alokasi DID Menurut Jenis Pemerintah Daerah Tahun 2010-2020 (Rp. Miliar/Pemerintah Daerah).....	15

Gambar 3.5 Rata-Rata Persentase DID Terhadap TKDD Daerah Penerima Tahun 2011 - 2019 (Persen)	16
Gambar 3.6 Rata-Rata Persentase DID Terhadap APBD Daerah Penerima Tahun 2011-2019 (Persen)	16
Gambar 5.1 Statistik Deskriptif Rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku untuk DID Tahun 2020 (Persen)	33
Gambar 5.2 Capaian Rasio PDRD dan PDRB Non Migas Harga Berlaku Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	34
Gambar 5.3 Capaian Rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)	34
Gambar 5.4 Capaian Belanja Modal Pendidikan Non-Kantor terhadap Belanja Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	38
Gambar 5.5 Capaian Belanja Model Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)	38
Gambar 5.6 Capaian Belanja Modal Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2018 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	40
Gambar 5.7 Capaian Belanja Modal Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen).....	40
Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	42
Gambar 5.9 Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)	42
Gambar 5.10 Capaian Peta Mutu Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020	47
Gambar 5.11 Capaian Peta Mutu Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020.....	47
Gambar 5.12 Capaian Rata-Rata Ujian Nasional Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020	49
Gambar 5.13 Capaian Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020.....	49
Gambar 5.14 Capaian Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020	51
Gambar 5.15 Capaian Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020	52
Gambar 5.16 Capaian Penanganan Stunting Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	53
Gambar 5.17 Capaian Penanganan Stunting Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)	54

Gambar 5.18 Capaian Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	56
Gambar 5.19 Capaian Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	56
Gambar 5.20 Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	58
Gambar 5.21 Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	58
Gambar 5.22 Capaian Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	60
Gambar 5.23 Capaian Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)	60
Gambar 5.24 Capaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	62
Gambar 5.25 Capaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)	62
Gambar 5.26 Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)	65
Gambar 5.27 Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen).....	65
Gambar 5.28 Capaian IPM Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020	67
Gambar 5.29 Capaian IPM Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020	67
Gambar 5.30 Daerah Calon Penerima Alokasi DID Tahun 2021 untuk Kategori Inovasi Pemerintah Daerah	76
Gambar 5.31 Capaian Peningkatan Investasi Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	79
Gambar 5.32 Capaian Peningkatan Investasi Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	80
Gambar 5.33 Capaian Peningkatan Ekspor Tahun 2019 dan Perubahannya Tahun 2018 ke 2019 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	82
Gambar 5.34 Capaian Peningkatan Ekspor Tahun 2019 dan Perubahannya Tahun 2018 ke 2019 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar).....	82

DAFTAR SINGKATAN

ADD	Alokasi Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	Aparat pengawasan Intern Pemerintah
APM	Angka Partisipasi Murni
Baduta	Bawah usia dua tahun
Balita	bawah usia lima tahun
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DID	Dana Insentif Daerah
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DTU	Dana Transfer Umum
IGA	<i>Innovative Government Award</i>
IPG	Indeks Pemerataan Guru
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KBI	Kawasan Barat Indonesia
Kemenpan-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KIT	Kawasan Indonesia Timur
KOMPAK	Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KPBU	Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PBGS	<i>Performance-based grant system</i>
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PDRB	<i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Pelaksana
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMP	Peta Mutu Pendidikan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPD	Perencanaan Pembangunan Daerah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	Statistik Tenaga Kerja Nasional
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SKB	Surat Keputusan Bersama
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPM	Standar Pelayanan Minimum
PT SMI	(PT) Sarana Multi Infrastruktur
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
3T	Tertinggal, Terdepan dan Terluar
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPS3R	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle
UN	Ujian Nasional
UU	Undang-Undang
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

1

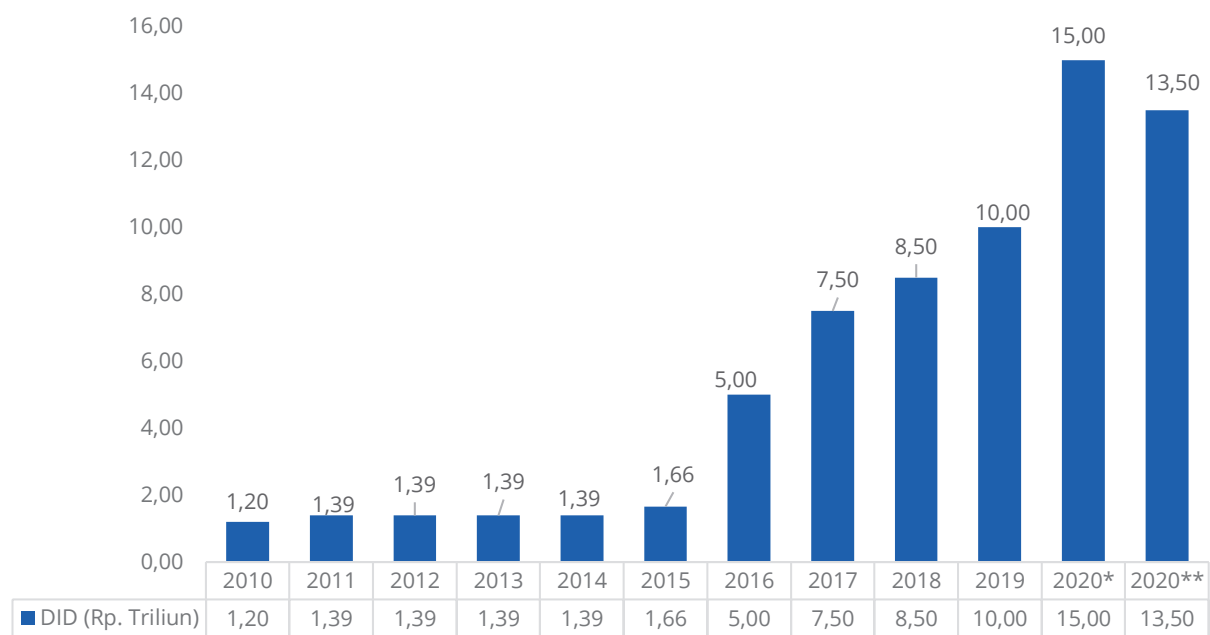
PENDAHULUAN

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata ublic keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar ublic, dan kesejahteraan masyarakat. DID telah dialokasikan kepada daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sejak tahun 2010, dan direncanakan terus dilanjutkan untuk tahun 2021 dengan besaran alokasinya yang terus meningkat secara signifikan khususnya dalam periode tahun 2016-2020. Kebijakan pengelolaan DID selama ini diatur dalam Undang-Undang tentang APBN (tiap tahun), Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden tentang Rincian APBN (tiap tahun) dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk DID tahun 2020, PMK yang mengatur terkait pengelolaan DID adalah PMK No. 141/PMK.07/2019.

Dalam penganggaran dan pengalokasian DID, terdapat beberapa hal yang diatur, khususnya dalam No. 141/PMK.07/2019, antara lain berupa indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID, penyediaan data DID, dan penghitungan dan penetapan alokasi DID untuk DID tahun depannya. Penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2020 telah dilakukan dan diumumkan oleh Pemerintah pada akhir Oktober 2019 dengan total alokasi sebesar Rp. 15 triliun, yang didistribusikan kepada 416 Pemerintah Daerah (307 kabupaten, 81 kota dan 28 provinsi) yang berhak menerima sesuai dengan capaian pemenuhan kriteria utama dan kategori kinerja. Besaran alokasi DID tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp. 15 triliun tersebut tertuang dalam UU tentang APBN Tahun 2020 dan terinci dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 untuk setiap daerah penerimanya (provinsi dan kabupaten/kota).

Terjadinya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang juga melanda Indonesia, menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Kuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020. Perpu tersedut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang terbit pada 3 April 2020. Dalam Perpres tersebut dilakukan penyesuaian terhadap alokasi DID pada tahun 2020, yaitu turun sebesar Rp. 1,5 triliun (10 persen) sehingga menjadi Rp. 13,5 triliun. Untuk rincian penyesuaian pengalokasian DID per daerah dilakukan melalui PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Penyesuaian alokasi DID untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara proporsional berdasarkan pagu alokasi DID. Penyesuaian dilakukan untuk seluruh kelompok kategori DID, kecuali untuk kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan.



Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 1. 1 Alokasi DID Tahun 2020 - 2020 (Rp. Triliun)

Kebijakan DID untuk tahun 2020 merupakan perbaikan dari kebijakan DID tahun 2019, terutama terkait dengan penghitungan alokasi DID berdasarkan kategori kinerja yang dilakukan dengan:

- i. penambahan pada kelompok kategori kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berupa kategori pembiayaan kreatif, kategori *mandatory spending*, kategori ketepatan waktu pelaporan dan kategori efektifitas pengelolaan belanja daerah (belanja modal pendidikan, belanja modal kesehatan, dan realisasi belanja);

- ii. pengurangan indikator pada kelompok kategori kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berupa indikator kualitas pengeluaran, ruang gerak fiskal, dan ralisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bekenaan (SiLPA) terhadap total belanja.
- iii. penambahan kelompok kategori peningkatan investasi;
- iv. penambahan kelompok kategori peningkatan ekspor;
- v. pengurangan indikator pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur berupa indikator persentase jalan kondisi mantap, dan
- vi. penambahan kategori pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan berupa kategori inovasi pemerintahan daerah

Dengan demikian apabila dirinci, kebijakan DID tahun 2020 dalam penghitungan alokasi DID masih mempertahankan 4 kriteria utama seperti pada tahun 2019, dan terdapat 9 kelompok kategori kinerja yang terinci dalam 25 kategori kinerja. Kriteria utama yang dimaksudkan adalah:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- c. Pelaksanaan *e-government* (*e-procurement* dan *e-budgeting*); dan/ atau
- d. Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sementara itu, untuk kategori kinerja secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.1. Adapun untuk indikator untuk setiap kategori kinerja, tahun data yang digunakan dan sumbernya secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran 3.

Tabel 1.1 Kategori Kinerja dalam Perhitungan Alokasi DID Tahun 2020

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja	
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi	
2	Kelompok Ketegori Peningkatan Ekspor	
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	
4	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah	Kategori Kemandirian Daerah
5		Kategori Kualitas Realisasi Belanja
6		Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan
7		Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan
8	Kategori Pembiayaan Kreatif	
9	Kategori <i>Mandatory Spending</i>	
	Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja		
10	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan	
11		Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional	
12		Kategori Angka Partisipasi Murni	
13	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i>	
14		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	
15		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	
16	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak	
17		Kategori Akses Sanitasi Layak	
18	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin	
19		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
20	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaraan Pemerintah	
21		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah	
22		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
23		Inovasi Daerah	Kategori Inovasi Pelayanan Publik
24			Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah
25	Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah		

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

Pengalokasian DID pada tahun 2020 mengalami perubahan dari tahun 2019 sebelumnya, dimana terdapat pagu DID per kategori yang ditentukan berdasarkan prioritas kategori dan jumlah daerah penerima DID per kategori. Dalam PMK No. 141/PMK.07/2019, penggunaan DID tahun 2020 juga tidak lagi *full block grant*, tetapi diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang dicapai. Apabila sudah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang tidak mendapat alokasi DID, disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Namun, berdasarkan PMK No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan pada 16 Maret 2020, DID (untuk penerima semua kategori kinerja) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. Adanya PMK No. 19/PMK.07/2020 ini, tentunya merevisi PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID.

Dalam PMK No. 35/PMK.07/2020, dikarenakan alokasi DID tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan, pagu DID per kelompok kategori juga mengalami penyesuaian. Sehingga, potensi maksimal penerimaan DID dari suatu daerah juga mengalami penurunan. Hal tersebut seperti yang terinci dalam Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Perubahan Pagu Alokasi Menurut Kelompok Kategori Kinerja DID 2020

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja	Semula	Penyesuaian	Perubahan		
		Rp. Ribu	Rp. Ribu	Persen		
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi	1,387,713,650	1,210,420,776	-12.78%		
2	Kelompok Ketegori Peningkatan Ekspor	1,120,845,654	977,647,547	-12.78%		
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Kemandirian Daerah	1,040,785,230	907,815,578	-12.78%	
4		Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah	Kategori Kualitas Realisasi Belanja	884,667,442	771,643,276	-12.78%
5			Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan	711,203,250	620,340,641	-12.78%
6			Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan	702,530,030	612,775,514	-12.78%
7			Kategori Pembiayaan Kreatif	36,027,182	31,424,386	-12.78%
8			Kategori <i>Mandatory Spending</i>	62,500,000	62,500,000	0.00%
9			Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	26,250,000	26,250,000	0.00%
10		Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan	405,639,373	353,815,296	-12.78%
11			Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional	661,832,658	577,277,600	-12.78%
12	Kategori Angka Partisipasi Murni		853,977,629	744,874,315	-12.78%	
13	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i>	1,078,146,759	1,078,146,759	0.00%	
14		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	1,334,340,075	1,334,340,075	0.00%	
15		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	757,905,147	757,905,147	0.00%	
16	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak	757,905,141	661,075,968	-12.78%	
17		Kategori Akses Sanitasi Layak	779,254,600	679,697,828	-12.78%	
18	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin	516,389,591	450,416,180	-12.78%	
19		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	588,443,960	513,264,967	-12.78%	

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja		Semula	Penyesuaian	Perubahan
			Rp. Ribu	Rp. Ribu	Persen
20	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaraan Pemerintah	205,488,367	179,235,380	-12.78%
21		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah	84,063,422	73,323,566	-12.78%
22		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	579,103,578	505,117,898	-12.78%
23		Inovasi Daerah Kategori Inovasi Pelayanan Publik	208,157,044	181,563,110	-12.78%
24		Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah	121,424,942	105,911,819	-12.78%
25	Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah		95,405,276	83,216,374	-12.78%
Total Alokasi DID			15,000,000,000	13,500,000,000	-10.00%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

Tabel 1.3 Nilai Maksimal Alokasi Menurut Kelompok Kinerja dan Potensial Maksimal Penerimaan DID Tahun 2020

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja		Semula	Penyesuaian	
			Rp. Ribu	Rp. Ribu	
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi		14,669,277	12,795,146	
2	Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor		14,680,362	12,804,814	
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Kemandirian Daerah	14,889,631	12,987,347	
4		Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah	Kategori Kualitas Realisasi Belanja	9,923,359	8,655,561
5			Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan	9,809,700	8,556,423
6			Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan	9,650,138	8,417,246
7			Kategori Pembiayaan Kreatif	18,013,591	15,712,193
8			Kategori <i>Mandatory Spending</i>	250,000	250,000
9			Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	250,000	250,000
10	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan	12,194,855	10,636,852	
11		Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional	12,417,123	10,830,724	
12		Kategori Angka Partisipasi Murni	12,010,937	10,476,432	

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja	Semula	Penyesuaian	
		Rp. Ribu	Rp. Ribu	
13	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i>	11,946,224	11,946,224
14		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	11,730,462	11,730,462
15		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	12,224,277	12,224,277
16	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak	12,465,545	10,872,960
17		Kategori Akses Sanitasi Layak	12,458,107	10,866,472
18	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin	13,722,241	11,969,102
19		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13,797,045	12,034,348
20	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaraan Pemerintah	9,609,146	8,381,491
21		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah	9,965,976	8,692,733
22		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	11,359,422	9,908,154
23		Inovasi Daerah Kategori Inovasi Pelayanan Publik	8,700,399	7,588,845
24		Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah	9,023,299	7,870,492
25	Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah		9,540,528	7,756,820
Potensi Penerimaan Total Suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)			275,301,644	244,215,118

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

Terkait dengan rencana kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2021, perlu dilakukan usulan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan juga usulan penghitungan dan penetapan alokasi DID. Usulan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan *review* terlebih dahulu terhadap kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020, serta usulan kemungkinan perbaikannya untuk tahun 2021 ke depan. Usulan perbaikan untuk tahun 2021 ke depan tentunya juga menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dan kondisi terbaru terkait dengan keuangan negara, khususnya terkait dengan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.

2

TUJUAN

Tujuan dari penyusunan kajian tentang *Review* Penganggaran dan Pengalokasian DID Tahun 2020 dan Usulan Perbaikannya untuk Tahun 2021 ini adalah untuk:

- a. Memperkirakan besaran penganggaran terkait dengan nilai indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID tahun 2021 ke depan;
- b. Me-*review* penghitungan alokasi DID tahun 2020, baik untuk kriteria utama maupun kriteria kinerja; dan
- c. Menyusun saran/rekomendasi terkait penganggaran dan penghitungan alokasi DID tahun 2021 ke depan.

3

INDIKASI KEBUTUHAN DANA TKDD UNTUK DID TAHUN 2021

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai dana TKDD untuk DID yang telah dialokasikan sejak tahun 2010, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, dimana pada tahun 2020 alokasi semulanya mencapai Rp. 15 triliun dan setelah penyesuaian menjadi Rp. 13,5 triliun. Untuk memperkirakan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID Tahun 2021, setidaknya perlu mempertimbangkan perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan DID, dan/atau kemampuan keuangan negara. Alokasi DID dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp. 8,5 triliun pada tahun 2018, meningkat menjadi Rp. 10 triliun (naik 18 persen) pada tahun 2019 dan kembali meningkat signifikan menjadi Rp. 13,5 triliun setelah penyesuaian (naik 35 persen) pada tahun 2020.

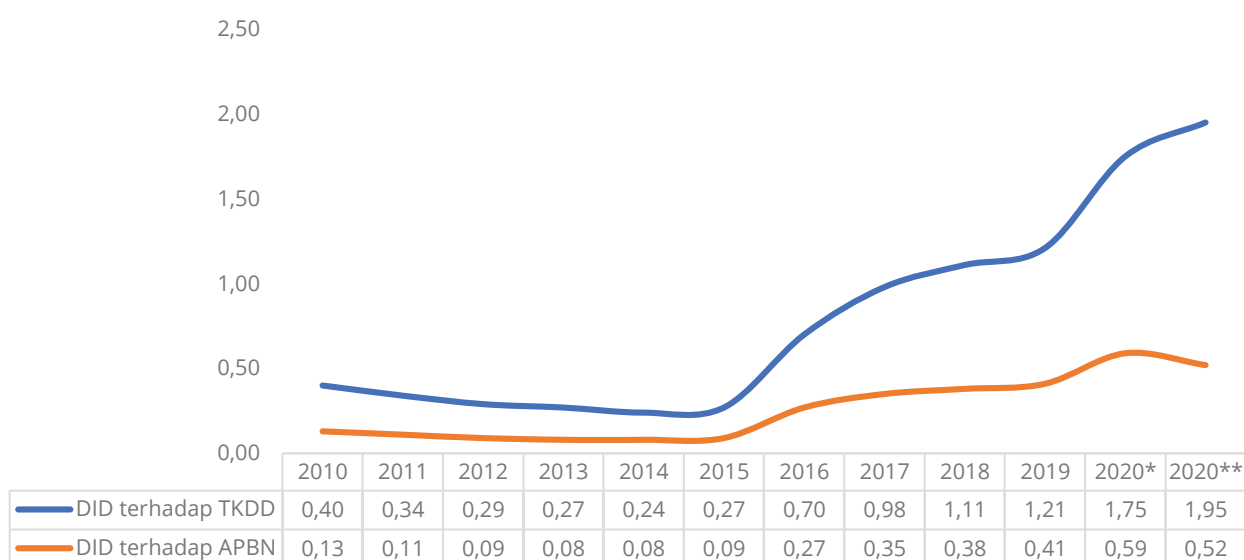
Arah kebijakan DID pada tahun 2021 tentunya merupakan perbaikan dari kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020, dengan tetap perlu mempertahankan kondisi eksisting yang masih penting dan hal-hal baru yang relevan dengan prioritas nasional. Kondisi kebijakan DID sampai dengan tahun 2020 setidaknya memiliki masalah antara lain:

- a. Kebijakan APBD belum sepenuhnya mendukung pencapaian prioritas nasional;
- b. Formula DID dirasa masih kompleks dan masih belum memotret kinerja daerah sesungguhnya;
- c. Semakin banyaknya jumlah daerah penerima DID, mengakibatkan masih kurang signifikannya peran DID dalam TKDD dan penerimaan APBD;

- d. Belum semua pelayanan pemerintahan umum yang penting masuk untuk kategori kinerja dalam penghitungan alokasi DID;
- e. Belum *up-to-date*-nya data yang digunakan untuk beberapa kategori kinerja dalam penghitungan alokasi DID;
- f. Penggunaan DID masih belum terfokus pada kategori kinerja dalam DID; dan
- g. Pelaporan DID masih belum efektif dan efisien.

Terkait dengan hal tersebut, pokok-pokok kebijakan DID pada tahun 2021 sebaiknya:

- a. Melanjutkan peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD;
- b. Melanjutkan kebijakan yang mendukung pencapaian prioritas nasional;
- c. Melanjutkan peran insentif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- d. Melanjutkan *refocusing* dan penajaman indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah;
- e. Mendorong peningkatan investasi dan ekspor;
- f. Mendorong penurunan tingkat pengangguran;
- g. Mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif (*creative financing*);
- h. Mendorong peningkatan kualitas belanja melalui pemenuhan *mandatory spending*;
- i. Mendorong penyampaian pelaporan tepat waktu;
- j. Melanjutkan penguatan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat; dan
- k. Mendorong pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di daerah.



Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 3.1 Alokasi DID Terhadap TKDD dan APBN Tahun 2010 - 2020 (Persen)

Bila dilihat persentase dana DID terhadap TKDD, persentasenya terus meningkat khususnya dalam periode tahun 2015-2020, dimana pada tahun 2020 alokasi DID mencapai 1,95 persen dari TKDD (setelah penyesuaian), yang tadinya hanya sekitar 0,27 persen pada tahun 2015. Sedangkan bila dibandingkan dengan belanja APBN, alokasi DID juga mengalami peningkatan, namun persentasenya masih di bawah 1 persen dari belanja APBN pada tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase alokasi DID terhadap belanja APBN mencapai 0,52 persen (setelah penyesuaian), yang meningkat dari 0,09 persen pada tahun 2015. Hal ini tentunya belum terlalu membebani APBN ke depan apabila alokasi DID untuk tahun 2021 ditingkatkan dari alokasi DID untuk tahun 2020.

Dengan pertimbangan *trend* alokasi anggaran DID setidaknya selama 3 tahun terakhir (2018-2020) tersebut atau bahkan bila dilihat perkembangannya selama 6 tahun terakhir (2015-2020), pertimbangan arah kebijakan DID pada tahun 2021 yang semakin banyak, dan beban alokasi DID dalam TKDD dan APBN (keuangan negara) yang belum terlampau besar, indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 sebaiknya tidak menurun, minimal dapat dipertahankan dan bahkan sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya (tahun 2020, setelah penyesuaian).

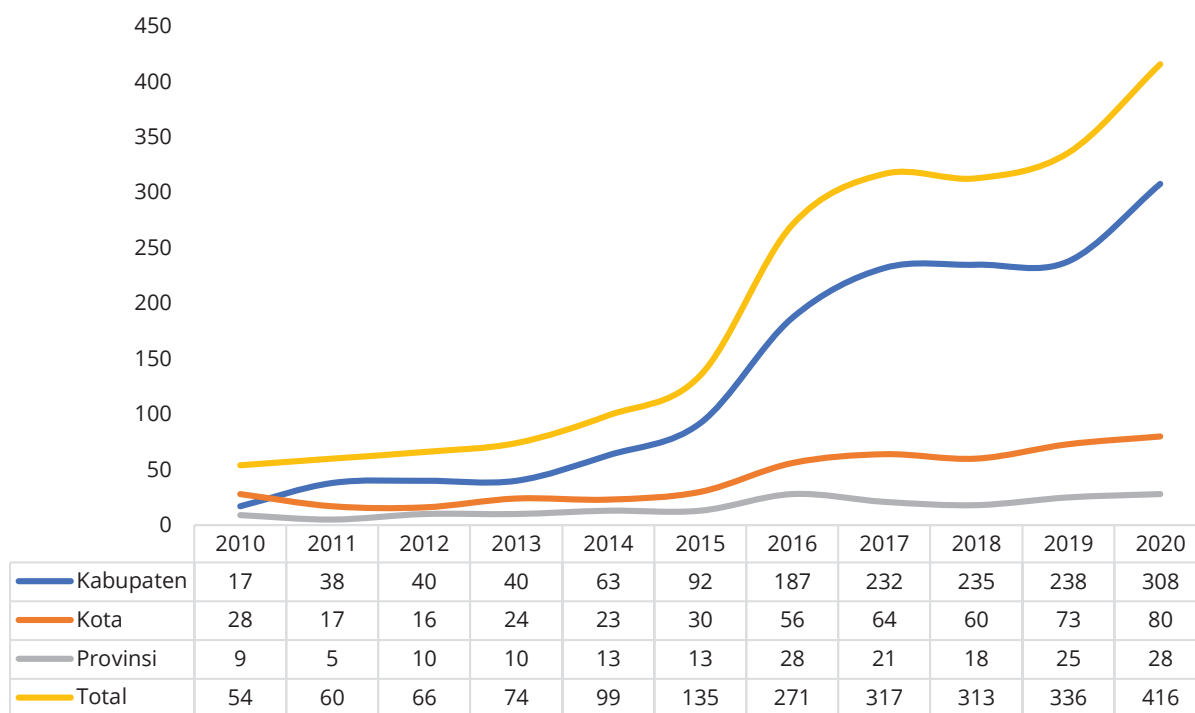
Dengan menggunakan analisa *trend linier* terhadap alokasi anggaran DID selama 6 tahun terakhir (2015-2020, setelah penyesuaian), setidaknya dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 15,2 triliun. Apabila analisa *trend linier* dilakukan untuk persentase DID terhadap TKDD, besaran dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 diperkirakan dapat mencapai Rp. 15,6 triliun (2,04 persen terhadap TKDD). Apabila analisa *trend linier* dilakukan untuk persentase DID terhadap APBN, besaran dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 diperkirakan dapat mencapai Rp. 16,4 triliun (0,59 persen terhadap belanja APBN). Dengan kata lain, apabila digabungkan dari semua perkiraan, maka sebaiknya dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi minimal menjadi Rp. 15,2 triliun (meningkat minimal 12,68 persen dari tahun 2020, setelah penyesuaian). Hal tersebut tentunya dengan asumsi bahwa wabah ublica COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah mulai mereda dan kondisi keuangan negara sudah membaik dan stabil.

Tabel 3.1 Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID Tahun 2021

No.	Dasar Perkiraan	Indikasi Kebutuhan DID 2021 (Rp. Miliar)	Peningkatan dari DID 2020 (Persen)
1	Nilai Alokasi DID Tahun 2015-2020	15,212	12.68
2	Persentase DID terhadap TKDD Tahun 2015-2020	15,642	15.86
3	Persentase DID terhadap APBN Tahun 2015-2020	16,443	21.80

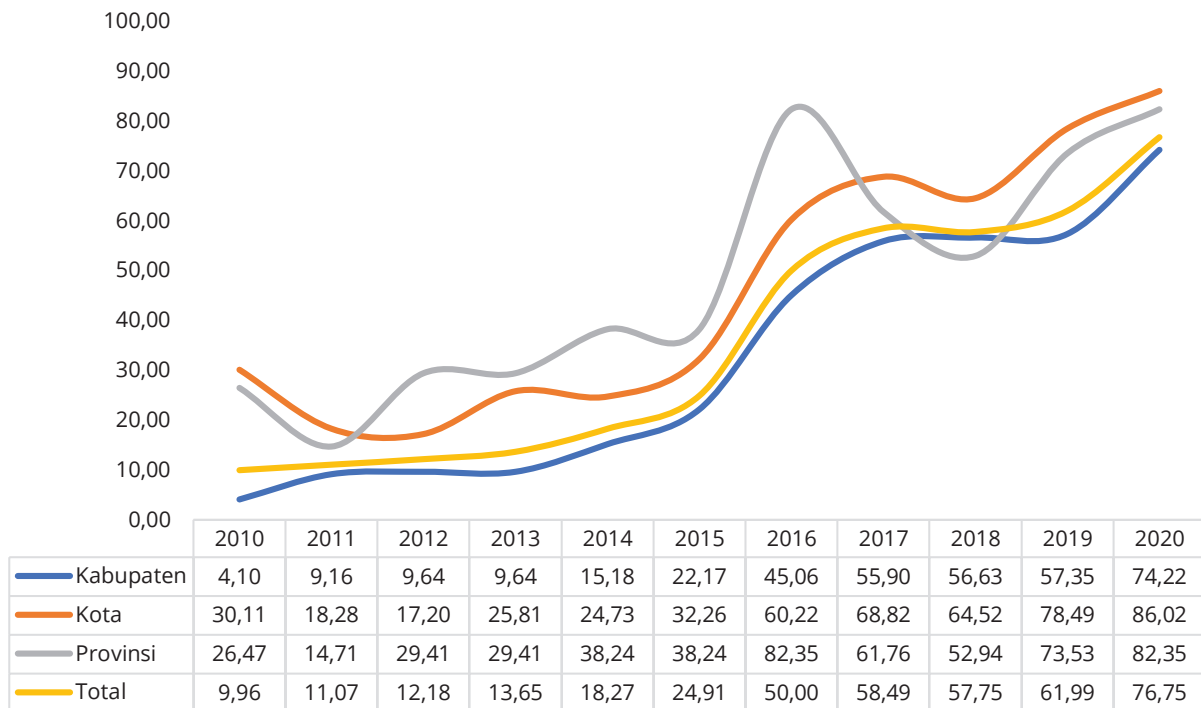
Sumber: Hasil Pengolahan, 2020

Alasan lain yang dapat mendukung perlunya peningkatan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 adalah masih rendahnya persentase penerimaan DID yang diterima oleh Pemerintah Daerah (daerah penerima DID), baik persentase penerimaan DID terhadap TKDD maupun persentase penerimaan DID terhadap APBD selama ini. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat dalam Gambar 6 dan Gambar 7. Dengan semakin besarnya peranan DID dalam TKDD dan penerimaan APBD Pemerintah Daerah, diharapkan daerah dapat semakin berkompetisi dengan baik dan sehat dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam berbagai aspek, baik untuk kriteria utama maupun kategori kinerja. Besaran alokasi DID yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan kontribusinya baik terhadap TKDD maupun penerimaan APBD sangat dipengaruhi oleh besaran indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan jumlah daerah penerima DID. Oleh karena itu, peningkatan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan pembatasan/pengurangan jumlah daerah penerima DID dapat meningkatkan signifikansi besaran alokasi DID yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan kontribusinya baik terhadap TKDD maupun penerimaan APBD.



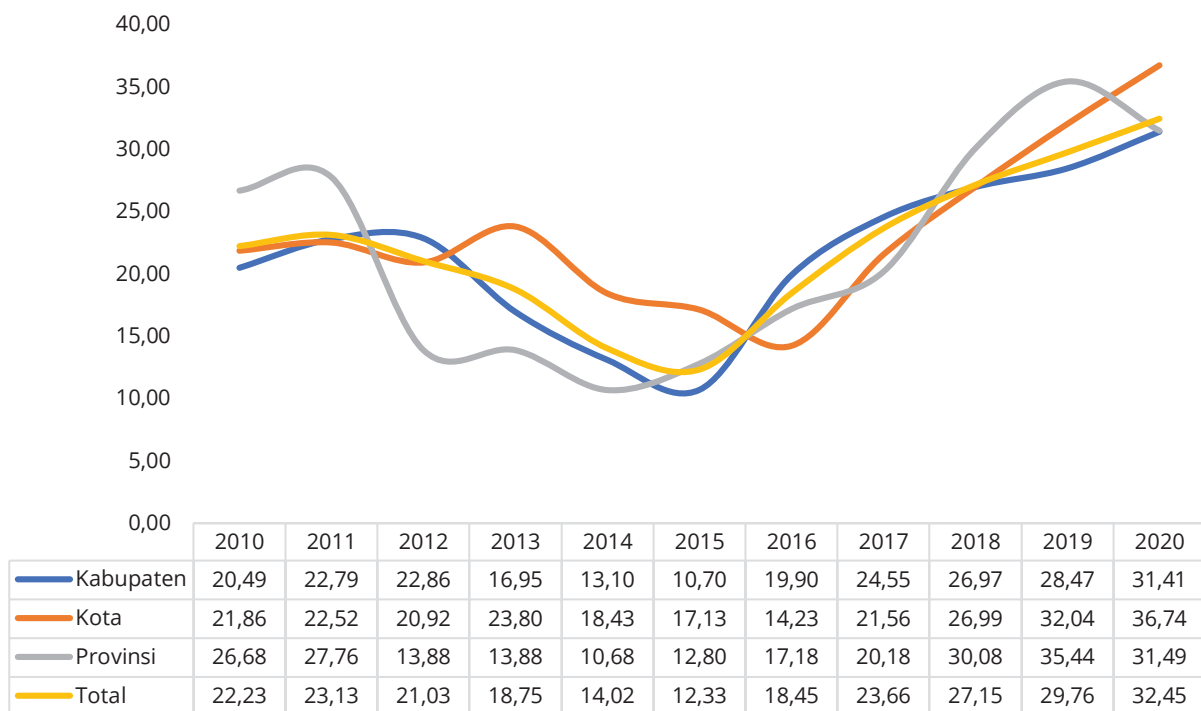
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 3.2 Jumlah Daerah Penerima DID Tahun 2010 - 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

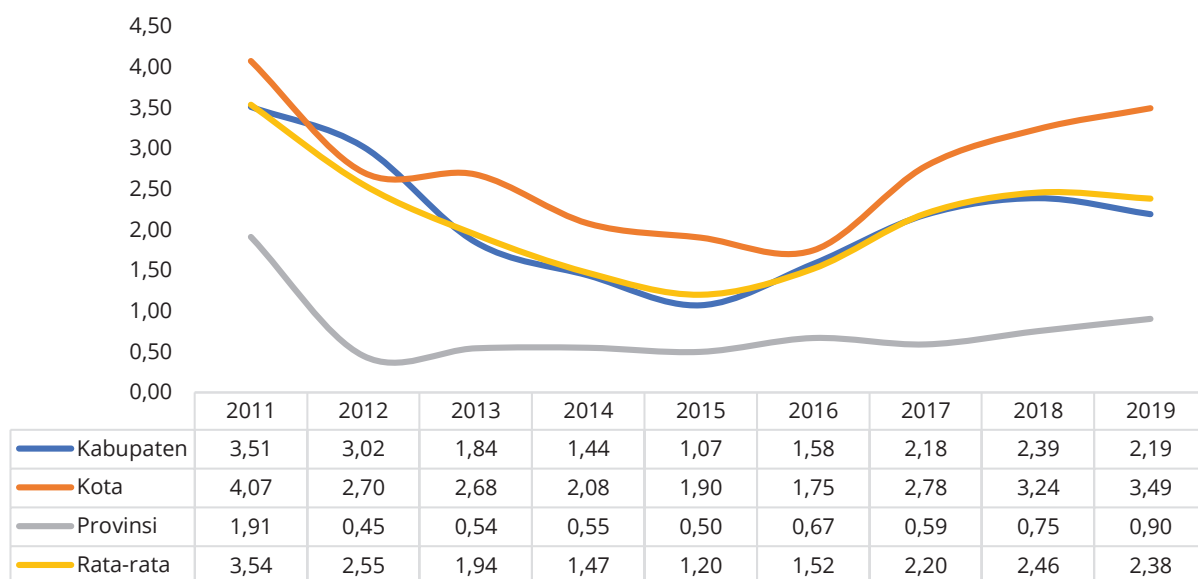
Gambar 3.3 Persentase Daerah Penerima DID Tahun 2010 - 2020 (Persen)



Keterangan: Untuk tahun 2020 adalah Nilai Setelah Penyesuaian

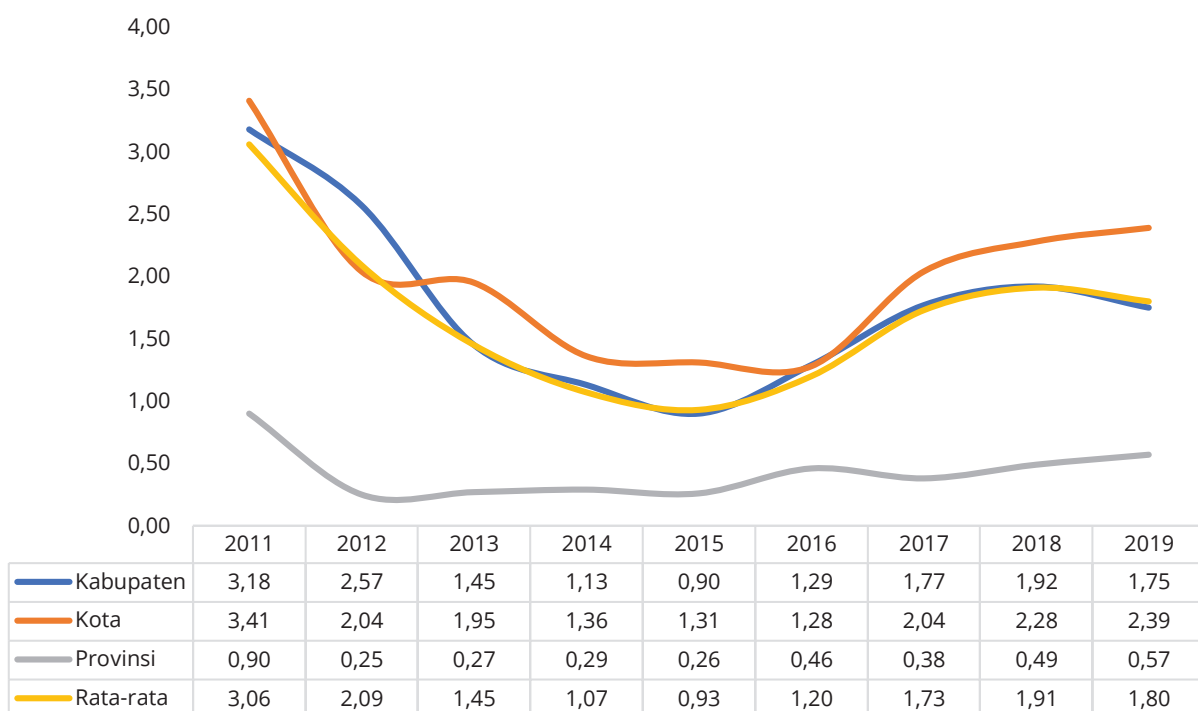
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 3.4 Rata-Rata Alokasi DID Menurut Jenis Pemerintah Daerah Tahun 2010-2020 (Rp. Miliar/Pemerintah Daerah)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 3.5 Rata-Rata Persentase DID Terhadap TKDD Daerah Penerima Tahun 2011 - 2019 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 3.6 Rata-Rata Persentase DID Terhadap APBD Daerah Penerima Tahun 2011-2019 (Persen)

Selain masih kecil terhadap daerah penerima DID, bila digabungkan (dikonsolidasikan) TKDD dan APBD se-provinsi, penerimaan DID juga masih kecil. Secara lebih lengkapnya terkait persentase DID terhadap TKDD dan penerimaan APBD se-provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

4

REVIEW PENGHITUNGAN ALOKASI DID TAHUN 2020 DAN USULAN PERBAIKAN UNTUK DID TAHUN 2021

4.1. Kriteria Utama

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID. Dalam penghitungan alokasi DID Tahun 2020, terdapat 4 kriteria utama, yaitu:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- c. Pelaksanaan *e-government* (*e-procurement* dan *e-budgeting*); dan/ atau
- d. Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam hal Menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan data kriteria utama, kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

Daerah yang memenuhi kriteria utama menjadi hal yang paling penting dalam menentukan suatu daerah untuk mendapatkan alokasi DID atau tidak. Dengan kata lain, kriteria utama jauh lebih penting dibandingkan dengan kategori kinerja. Bila dilihat dalam perkembangannya, daerah yang bukan penerima DID adalah sebagian besar daerah yang tidak memenuhi kriteria utama (*eligible*). Hal tersebut ditunjukkan juga oleh semakin menurunnya jumlah daerah yang telah memenuhi kriteria utama (*eligible*) namun bukan penerima DID dari DID tahun 2017 sampai dengan DID 2020 (lihat Tabel 4.1).

Perkembangan dari 4 kriteria utama tersebut di daerah dari waktu ke waktu mengalami perbaikan, bahkan untuk ketersediaan PTSP sudah seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota. Perbaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah daerah yang mampu memenuhi 4 kriteria utama tersebut dari waktu ke waktu. Untuk DID tahun 2020, terdapat 425 daerah atau sekitar 78,41 persen daerah yang telah memenuhi kriteria utama (lihat Tabel 5 dan Tabel 6). Bila dianalisa dengan *trend linier*, untuk 4 kriteria utama tersebut, diperkirakan seluruh daerah akan mampu menerapkannya untuk DID tahun 2024.

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama (*Eligible*) dan Daerah Penerima DID Tahun 2017-2020

No.	Keterangan	DID 2017				DID 2018			
		Kab.	Kota	Prov.	Total	Kab.	Kota	Prov.	Total
1	Jumlah Daerah	415	93	34	542	415	93	34	542
2	Daerah Eligible	318	78	23	419	238	63	23	324
3	Daerah Tidak Eligible	97	15	11	123	177	30	11	218
4	Daerah Penerima DID	232	64	21	317	235	60	18	313
5	Daerah Bukan Penerima DID	183	29	13	225	180	33	16	229
6	Daerah Eligible Namun Bukan Penerima DID	86	14	2	102	3	3	5	11

No.	Keterangan	DID 2019				DID 2020			
		Kab.	Kota	Prov.	Total	Kab.	Kota	Prov.	Total
1	Jumlah Daerah	415	93	34	542	415	93	34	542
2	Daerah Eligible	272	79	30	381	313	82	30	425
3	Daerah Tidak Eligible	143	14	4	161	102	11	4	117
4	Daerah Penerima DID	237	74	25	336	308	80	28	416
5	Daerah Bukan Penerima DID	178	19	9	206	107	13	6	126
6	Daerah Eligible Namun Bukan Penerima DID	35	5	5	45	5	2	2	9

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama DID Tahun 2017-2020

Jumlah Pemerintah Daerah					
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten	318	238	272	313
2	Kota	78	63	79	82
3	Provinsi	23	23	30	30
Total		419	324	381	425

Persentase Pemerintah Daerah					
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten	76.63	57.35	65.54	75.42
2	Kota	83.87	67.74	84.95	88.17
3	Provinsi	67.65	67.65	88.24	88.24
Total		77.31	59.78	70.30	78.41

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Untuk DID tahun 2021, beberapa kriteria utama masih perlu dipertahankan, mengingat belum semua daerah mampu memenuhinya dan daerah yang telah memenuhi kriteria utama perlu mempertahankannya dari waktu ke waktu. Beberapa kriteria utama yang perlu dipertahankan adalah:

- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena diperkirakan akan tercapai untuk seluruh daerahnya adalah untuk DID tahun 2023 (lihat Tabel 7);
- Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, karena diperkirakan akan tercapai untuk seluruh daerahnya untuk DID tahun 2022 (lihat Tabel 8); dan
- Pelaksanaan e-government (*e-procurement* dan *e-budgeting*), karena diperkirakan akan tercapai untuk seluruh daerahnya untuk DID tahun 2024 (lihat Tabel 9 dan Tabel 10).

Sementara itu, untuk kriteria utama berupa Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk DID tahun 2021 sebaiknya tidak perlu dimasukkan lagi karena sejak DID tahun 2019 dan berlanjut pada DID tahun 2020, kriteria ini telah tercapai untuk seluruh daerahnya (lihat Tabel 11).

Tabel 4.3 Perkembangan Opini BPK WTP atas LKPD untuk DID Tahun 2017-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2023

No.	Daerah	Jumlah Pemerintah Daerah				Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten	223	275	298	327	365	398	415
2	Kota	60	72	80	84	93	93	93
3	Provinsi	29	31	33	32	34	34	34
Total		312	378	411	443	492	525	542

Persentase Pemerintah Daerah						Proyeksi		
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten	53.73	66.27	71.81	78.80	87.83	95.90	100.00
2	Kota	64.52	77.42	86.02	90.32	100.00	100.00	100.00
3	Provinsi	85.29	91.18	97.06	94.12	100.00	100.00	100.00
Total		57.56	69.74	75.83	81.73	90.68	96.86	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Tabel 4.4 Perkembangan Penetapan Perda APBD Tepat Waktu untuk DID Tahun 2017-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2022

Jumlah Pemerintah Daerah						Proyeksi	
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten	342	335	369	391	405	415
2	Kota	79	75	87	92	93	93
3	Provinsi	23	25	30	31	34	34
Total		444	435	486	514	532	542

Persentase Pemerintah Daerah						Proyeksi	
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten	82.41	80.72	88.92	94.22	97.47	100.00
2	Kota	84.95	80.65	93.55	98.92	100.00	100.00
3	Provinsi	67.65	73.53	88.24	91.18	100.00	100.00
Total		81.92	80.26	89.67	94.83	98.06	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Tabel 4.5 Perkembangan Pelaksanaan E-Procurement untuk DID Tahun 2018-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021- 2024

Jumlah Pemerintah Daerah					Proyeksi			
No.	Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	408	406	408	410	412	414	415
2	Kota	93	93	93	93	93	93	93
3	Provinsi	34	34	34	34	34	34	34
Total		535	533	531	537	539	541	542

Persentase Pemerintah Daerah				Proyeksi				
No.	Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	98.31	97.83	98.31	98.80	99.28	99.76	100.00
2	Kota	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total		98.71	98.34	97.97	99.08	99.45	99.82	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Tabel 4.6 Perkembangan Pelaksanaan *E-Budgeting* untuk DID Tahun 2018-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2024

Jumlah Pemerintah Daerah				Proyeksi			
No.	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	410	404	410	412	414	415
2	Kota	93	93	93	93	93	93
3	Provinsi	34	34	34	34	34	34
Total		537	531	537	539	541	542

Persentase Pemerintah Daerah				Proyeksi			
No.	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	98.80	97.35	98.80	99.28	99.76	100.00
2	Kota	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total		99.08	97.97	99.08	99.45	99.82	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Tabel 4.7 Perkembangan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP untuk DID Tahun 2019-2020)

Jumlah Pemerintah Daerah			
No.	Daerah	2019	2020
1	Kabupaten	415	415
2	Kota	93	93
3	Provinsi	34	34
Total		542	531

Persentase Pemerintah Daerah			
No.	Daerah	2019	2020
1	Kabupaten	100.00	100.00
2	Kota	100.00	100.00
3	Provinsi	100.00	100.00
Total		100.00	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

4.2. Kategori Kinerja

Dalam PMK No. 141/PMK.07/2019 disebutkan bahwa untuk DID tahun 2020, terdapat 9 kelompok kategori kinerja daerah yang terinci dalam 25 kategori kinerja daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Daerah yang mendapat alokasi DID adalah daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi ketentuan antara lain:

- a. paling kurang mendapat nilai baik (B) untuk kelompok kategori: 1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah 2. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan 3. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan 4. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur 5. Kesejahteraan Masyarakat 6. Peningkatan Ekspor 7. Peningkatan Investasi
- b. pemenuhan *Mandatory Spending*;
- c. ketepatan waktu pelaporan; dan/atau
- d. mendapatkan penilaian oleh kementerian/lembaga nonkementerian untuk kelompok kategori: 1. Pelayanan umum pemerintahan dan 2. Pengelolaan Sampah

Selanjutnya, berdasarkan pagu alokasi DID ditetapkan alokasi DID menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota. Artinya terdapat tiga kluster dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID, yaitu provinsi, kabupaten dan kota.

5

KLUSTER PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DID

Selama ini, kluster penetapan dan penghitungan alokasi DID dilakukan berdasarkan jenis pemerintahan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut tentunya sesuai dengan kewenangan dan karakteristik daerahnya. Terdapat beberapa aspirasi terkait dengan kluster wilayah, antara lain yaitu wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan wilayah non-3T, kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, Jawa dan non-Jawa, dan lain-lain. Terdapat pendapat yang pro dan kontra terkait hal tersebut. Pendapat kontra beralasan bahwa DID ditujukan untuk menghargai daerah yang berkinerja baik, bukan untuk pemerataan keuangan daerah. Sedangkan pendapat pro beralasan agar lebih berkeadilan.

Bila melihat data secara keseluruhan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan daerah tidak menerima DID lebih disebabkan karena kriteria utamanya yang tidak terpenuhi. Bila dirinci lebih jauh, sebagian besar daerah yang tidak menerima DID merupakan daerah yang berada di daerah 3T, Non Jawa dan KIT. Proporsi jumlah daerah 3T, Non Jawa dan KIT yang tidak menerima DID lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya menunjukkan memang terdapat masalah yang lebih besar di daerah 3T, Non Jawa, dan KIT. Menurunnya jumlah dan persentase daerah yang tidak menerima DID secara umum dari DID tahun 2018 sampai dengan 2020 juga diikuti oleh menurunnya jumlah dan persentase daerah yang tidak menerima DID untuk daerah 3T, Non Jawa dan KIT, namun ublca lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional (daerah secara umum). Hal tersebut menunjukkan bahwa memang untuk daerah 3T, Non Jawa dan KIT, kurang diuntungkan dengan penghitungan alokasi DID dalam beberapa tahun ini. Di sisi lain, dengan semakin menurunnya jumlah daerah yang tidak menerima DID (semakin meningkatnya jumlah daerah yang menerima DID), pemerataan mulai meningkat. Hal tersebut dapat ditunjukkan secara rinci dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Daerah yang Tidak Menerima DID dan Rinciannya Menurut Karakteristik Daerah pada DID Tahun 2018-2020

Jumlah Pemerintah Daerah						
No.	Daerah	2018	2019	2020	2018-2020	Total Daerah
1	Daerah Tidak Menerima DID	229	206	126	95	542
2	Daerah Tidak Eligible	218	161	117	91	542
3	Daerah Eligible Namun Tidak Menerima DID	11	45	9	4	542
4	Daerah 3T Tidak Menerima DID	111	107	74	65	178
5	Daerah 3T Tidak Eligible	108	91	73	64	178
6	Daerah 3T Eligible Namun Tidak Menerima DID	3	16	1	1	178
7	Daerah Non Jawa Tidak Menerima DID	202	192	118	92	423
8	Daerah Non Jawa Tidak Eligible	193	150	109	88	423
9	Daerah Non Jawa Eligible Namun Tidak Menerima DID	9	42	9	4	423
10	Daerah KIT Tidak Menerima DID	103	105	76	61	204
11	Daerah KIT Tidak Eligible	97	88	72	61	204
12	Daerah KIT Eligible Namun Tidak Menerima DID	6	17	4	0	204

Persentase Pemerintah Daerah						
No.	Daerah	2018	2019	2020	2018-2020	Total Daerah
1	Daerah Tidak Menerima DID	42.25	38.01	23.25	17.53	100.00
2	Daerah Tidak Eligible	40.22	29.70	21.59	16.79	100.00
3	Daerah Eligible Namun Tidak Menerima DID	2.03	8.30	1.66	0.74	100.00
4	Daerah 3T Tidak Menerima DID	62.36	60.11	41.57	36.52	100.00
5	Daerah 3T Tidak Eligible	60.67	51.12	41.01	35.96	100.00
6	Daerah 3T Eligible Namun Tidak Menerima DID	1.69	8.99	0.56	0.56	100.00
7	Daerah Non Jawa Tidak Menerima DID	47.75	45.39	27.90	21.75	100.00
8	Daerah Non Jawa Tidak Eligible	45.63	35.46	25.77	20.80	100.00
9	Daerah Non Jawa Eligible Namun Tidak Menerima DID	2.13	9.93	2.13	0.95	100.00
10	Daerah KIT Tidak Menerima DID	50.49	51.47	37.25	29.90	100.00
11	Daerah KIT Tidak Eligible	47.55	43.14	35.29	29.90	100.00
12	Daerah KIT Eligible Namun Tidak Menerima DID	2.94	8.33	1.96	0.00	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Apabila dilihat lebih jauh menurut daerah 3T dan non-3T, Jawa dan Non Jawa serta KBI dan KTI, penyebab utama tidak menerima DID sebagian besar daerah 3T, daerah non Jawa dan daerah KTI adalah karena tidak terpenuhinya kriteria utama, dibandingkan dengan kategori kinerja (lihat Tabel 11). Dengan melihat fakta tersebut, maka penentuan berdasarkan daerah 3T dan non-3T, Jawa dan Non Jawa serta KBI dan KTI dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID menjadi kurang relevan, karena penentuan hanya berpengaruh terhadap penilaian pada kategori kinerja, khususnya untuk untuk kelompok kategori: 1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; 2. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan; 3. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan; 4. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; 5. Kesejahteraan Masyarakat; 6. Peningkatan Ekspor; 7. Peningkatan Investasi.

Tabel 5.2 Persentase Daerah yang Tidak Menerima DID terhadap Masing-Masing Karakteristik Daerah Dikarenakan Tidak Memenuhi Kriteria Utama untuk DID Tahun 2018-2020 (Persen)

No.	Daerah	2018	2019	2020	2018-2020
1	Semua Daerah	95.20	78.16	92.86	95.79
2	Daerah 3T	97.30	85.05	98.65	98.46
3	Daerah Non Jawa	95.54	78.13	92.37	95.65
4	Daerah KIT	94.17	83.81	94.74	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Dari penjelasan tersebut, penentuan kluster dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID untuk tahun 2021 sebaiknya tetap menggunakan kluster seperti DID tahun-tahun sebelumnya (khususnya DID untuk tahun 2020), yaitu menurut jenis pemerintahan daerahnya yang berjumlah 3 kluster, yakni provinsi, kabupaten, dan kota.

5.1 Hubungan Antar Kategori Kinerja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 9 kelompok kategori kinerja yang terinci dalam 25 kategori kinerja dalam penghitungan alokasi DID tahun 2020. Dari 25 kategori kinerja, apabila dikorelasikan antar jenis kategori kinerja, tidak ada satupun jenis kategori kinerja yang memiliki nilai koefisien korelasi yang besar (dengan nilai $\geq 0,75$) dengan kategori kinerja yang lainnya, baik menurut daerah penerima DID maupun besaran penerimaan DID. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci dalam Lampiran 4 dan Lampiran 5. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi hubungan yang kuat (*no-multicollinearity*) antar kategori kinerja, sehingga dapat dinyatakan bahwa kategori-kategori kinerja yang ada untuk DID tahun 2020 secara umum sudah cukup baik.

Selain hubungan antar kategori kinerja dalam satu waktu (yaitu DID untuk tahun 2020), perlu juga dilihat korelasi menurut kategori kinerja antar tahun, yaitu antara DID

tahun 2020 dan DID tahun 2019 sebelumnya. Dari hasil pengolahan koefisien korelasi tersebut, diperoleh bahwa semua kategori kinerja cukup baik, kecuali untuk kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang nilai koefisien korelasinya cukup tinggi (dengan nilai $\geq 0,75$) (lihat Tabel 12). Koefisien korelasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang menerima DID pada tahun 2019, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan DID kembali pada kategori SAKIP. Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan seolah-olah memberikan kepastian bagi daerah untuk mendapatkan alokasi DID di tahun berikutnya untuk kategori kinerja tersebut. Ke depan, untuk DID tahun 2021, perlu dilakukan reformulasi dan penilaian yang jelas dalam penentuan alokasi DID untuk kategori kinerja tersebut oleh kementerian teknis terkait, dimana untuk kategori SAKIP adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

Selain kategori SAKIP, terdapat dua kategori yang juga perlu mendapatkan perhatian karena memiliki koefisien korelasi yang agak tinggi (lebih besar dari 0,5), yaitu untuk kategori Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Sampah. Koefisien korelasi yang agak tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang telah mendapatkan alokasi pada kinerja tersebut pada tahun 2019, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan alokasi kembali pada kategori yang bersangkutan pada tahun 2020.

Tabel 5.3 Korelasi Antar Kelompok Kategori Kinerja untuk Daerah Penerima dan Besaran Penerimaan DID Tahun 2019 dan 2020 (Sebelum Penyesuaian)

No.	Kelompok Kategori Kinerja	Daerah Penerima DID	Besaran Alokasi DID
1	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Daerah	0.2220	0.1119
2	Kesejahteraan	0.1905	0.1757
3	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	0.1856	0.2012
4	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	0.2391	0.2752
5	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	0.1395	0.0963
6	Penyelenggaraan Pemerintahan	0.5736	0.5823
7	Perencanaan	0.2091	0.2058
8	SAKIP	0.7302	0.7517
9	Inovasi Pelayan Publik	0.2321	0.2848
10	Pengelolaan Sampah	0.4963	0.5208

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

5.2 Ke-*up to date*-an, Ketersediaan dan Kestabilan Data yang Digunakan

Data yang digunakan memang sebaiknya adalah data-data yang terbaru agar dapat lebih mencerminkan kinerja dari pemerintah daerah yang sesungguhnya. Bila dilihat dari waktu (tahun) data yang digunakan untuk DID tahun 2020, berdasarkan ketersediaan data yang paling *up to date*, memang sudah yang terbaik. Setidaknya terdapat 3 klasifikasi sumber data yang digunakan untuk penghitungan DID tahun 2020, yaitu (i) data terkait keuangan daerah yang bersumber dari BPK, DJPK Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, (ii) data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari BPS (diolah dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), dan (iii) data yang berasal dari Kementerian/ Lembaga terkait dengan pelayanan umum pemerintahan.

Data yang kurang *up to date* dari ketiga klasifikasi tersebut dalam penghitungan DID tahun 2020 adalah data-data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat sumber data yang dilakukan melalui Susenas (yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September), dan juga waktu penetapan dan penghitungan alokasi DID yang baru diumumkan paling cepat akhir Oktober pada tahun yang bersangkutan, sebenarnya ada potensi untuk menggunakan data yang lebih *up to date*. Tentunya hal ini perlu dikomunikasikan dengan BPS sebagai penyedia data terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kinerja kesejahteraan masyarakat. Apabila ke depan BPS dapat menyediakan data yang lebih *up to date*, maka DID tahun 2021 untuk kategori pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan data kondisi tahun 2019 dan 2020, tidak lagi menggunakan data tahun 2018 dan 2019 yang sudah tidak *up to date*.

Ketersediaan data juga menjadi masalah tersendiri terutama untuk kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan, terutama terkait data penanganan *stunting*, dimana untuk DID tahun 2010 data yang digunakan adalah data tahun 2013 dan tahun 2018 dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Tentunya untuk DID tahun 2021 perlu dicarikan alternatif solusi datanya apabila tidak tersedia data penanganan *stunting* dari Riskesdas yang lebih *up to date*, seperti misalnya menggunakan data dari Tim Pemantau Status Gizi (PSG) dari Kementerian Kesehatan. Hal ini tentunya juga perlu dikomunikasikan segera dengan Kementerian Kesehatan.

Data yang stabil terus meningkat dan data yang sangat tidak stabil (fluktuatif) juga menjadi masalah tersendiri dalam penghitungan alokasi DID untuk tahun 2020. Data yang cenderung stabil meningkat terus adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, data balita yang mendapatkan imunisasi lengkap yang digunakan dalam DID tahun 2020 adalah data tahun 2013 dan 2018, bukan data tahun 2017 dan tahun

2018. Hal tersebut dikarenakan data tersebut sangat tidak stabil antara tahun 2017 dan 2018. Hal ini tentunya juga perlu mendapatkan perhatian yang serius ke depan dalam penghitungan alokasi DID untuk tahun 2021.

Semakin data tidak *up to date*, semakin sulit juga data tersebut dalam mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang sesungguhnya. Hal tersebut juga cukup menyulitkan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengupayakan dan mencapai capaian alokasi DID di masa mendatang. Sebagai ilustrasi, yang pemerintah daerah dapat upayakan dan capai pada tahun 2020, hanya sedikit yang nantinya dinilai untuk DID tahun 2021 (lihat Tabel 5.6), dan terbanyak adalah untuk pencapaian DID tahun 2022 (lihat Tabel 5.7).

Tabel 5.4 Waktu (Tahun) dan Sumber Data untuk DID Tahun 2020



No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2019	PEMDA
3	<i>e-budgeting</i>	2019	KEMENDAGRI
4	<i>e-procurement</i>	2019	LKPP

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2017-2018	PEMDA
2	Realisasi APBD	2017-2018	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2017-2018	BPS
4	Pembiayaan Kreatif	2019	PT SMI
5	<i>Mandatory Spending</i>	2019	PEMDA
6	Ketepatan waktu pelaporan	2019	DJPK
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2017-2018	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2017-2018	BPS
3	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)	2018-2019	KEMENDIKBUD
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			
1	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2013-2018	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2013-2018	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	2017-2018	BPS
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2017-2018	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2017-2018	BPS
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2017-2018	BPS

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
2	Indeks Pembangunan Manusia	2017-2018	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2019	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2019/2018	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2017-2018	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2019	KLHK

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

Tabel 5.5 Upaya Pemerintah Daerah di Tahun 2020 untuk Pencapaian DID Tahun 2021

No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2019	PEMDA
3	<i>e-budgeting</i>	2019	KEMENDAGRI
4	<i>e-procurement</i>	2019	LKPP

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2017-2018	PEMDA
2	Realisasi APBD	2017-2018	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2017-2018	BPS
4	Pembiayaan Kreatif	2019	PT SMI
5	<i>Mandatory Spending</i>	2019	PEMDA
6	Ketepatan waktu pelaporan	2019	DJPK
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2017-2018	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2017-2018	BPS
3	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)	2018-2019	KEMENDIKBUD
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			
1	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2013-2018	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2013-2018	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	2017-2018	BPS

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2017-2018	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2017-2018	BPS
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2017-2018	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	2017-2018	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2019	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2019/2018	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2017-2018	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2019	KLHK

Keterangan: Yang **dilingkarin merah** adalah yang dapat diupayakan dan dicapai di tahun 2020

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

Tabel 5.6 Upaya Pemerintah Daerah di Tahun 2020 untuk Pencapaian DID Tahun 2022

No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2019	PEMDA
3	<i>e-budgeting</i>	2019	KEMENDAGRI
4	<i>e-procurement</i>	2019	LKPP

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2017-2018	PEMDA
2	Realisasi APBD	2017-2018	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2017-2018	BPS
4	Pembiayaan Kreatif	2019	PT SMI
5	<i>Mandatory Spending</i>	2019	PEMDA
6	Ketepatan waktu pelaporan	2019	DJPK
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2017-2018	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2017-2018	BPS
3	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)	2018-2019	KEMENDIKBUD
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
1	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2013-2018	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2013-2018	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	2017-2018	BPS
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2017-2018	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2017-2018	BPS
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2017-2018	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	2017-2018	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2019	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2018/2018	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2017-2018	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2019	KLHK

Keterangan: Yang **dilingkarin merah** adalah yang dapat diupayakan dan dicapai di tahun 2021

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

5.3 Penambahan/Pengurangan Kategori dan Indikator Kinerja

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kategori dan indikator kinerja seharusnya mengalami perbaikan di berbagai daerah. Mungkin saja terdapat beberapa kategori dan indikator kinerja yang sudah tidak relevan lagi karena sudah menunjukkan kinerja yang baik, dan mungkin saja terdapat beberapa kategori kinerja baru yang diusulkan/diaspirasikan oleh berbagai pihak untuk menjadi kategori kinerja tersendiri dalam penghitungan alokasi DID untuk tahun 2021 seiring dengan perkembangan terbaru, misalnya terkait dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kondisi terjadinya wabah COVID-19 juga menyebabkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan keuangan negara dan TKDD juga mengalami penyesuaian.

Tentunya penambahan atau pengurangan kategori dan indikator kinerja membutuhkan pertimbangan atas prasyarat berupa ketersediaan data yang objektif dan *up to date* serta kontinyu untuk seluruh daerah di Indonesia yang dikeluarkan oleh pihak lembaga/institusi yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari penghitungan alokasi

DID, dimana kategori dan indikator kinerja dari pemerintah daerah perlu:

- i. Keadilan (*fairness*), setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh DID.
- ii. Dapat diperbandingkan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- iii. Objektif, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- iv. Terukur, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- v. Berkesinambungan, dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
- vi. Akuntabel, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum adanya penambahan dan/atau pengurangan kategori dan indikator kinerja, ada baiknya dilakukan *review* terlebih dahulu terhadap setiap kategori dan indikator kinerja yang digunakan untuk DID tahun 2020.

1. Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

i). Kategori Kemandirian Daerah

Kategori kinerja kemandirian daerah dalam DID tahun 2020 didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau produk domestik regional bruto (PDRB). Bila melihat data indikator Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per PDRB Non Migas Harga Belaku (dalam persen) tahun 2017, 2018 dan perubahannya, menunjukkan bahwa kemandirian daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota masih rendah, bervariasi antar daerah, dan belum stabil perubahannya. Umumnya, nilai rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku yang tinggi pada 2018 (nilai capaian akhirnya), nilai deltanya juga tinggi (korelasi positif, seperti yang terlihat dalam Gambar 5.2). Untuk daerah yang memperoleh DID tahun 2020 adalah daerah yang memiliki nilai capaian akhir ublica tinggi di atas rata-rata dan perubahannya juga positif (lihat Gambar 5.1). Kategori ini tentunya masih layak untuk dipertahankan dalam DID tahun 2021.

Namun, yang menjadi catatan khusus adalah penggunaan data PDRB Non Migas (secara total) sebagai basis PDRD. Berdasarkan hasil studi DJPK Kementerian Keuangan (2018), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai koefisien korelasi yang tertinggi dengan PDRB Non Migas untuk Sektor 6 (Konstruksi) sampai dengan Sektor 17 (Jasa Lainnya) (lihat

Tabel 5.8 dan Tabel 5.9). Artinya, PDRB Non Migas untuk Sektor 6 (Konstruksi) sampai dengan Sektor 17 (Jasa Lainnya) dapat menjadi alternatif basis PDRD dan juga pengganti dari PDRB Non Migas dalam penghitungan kategori kinerja kemandirian daerah.

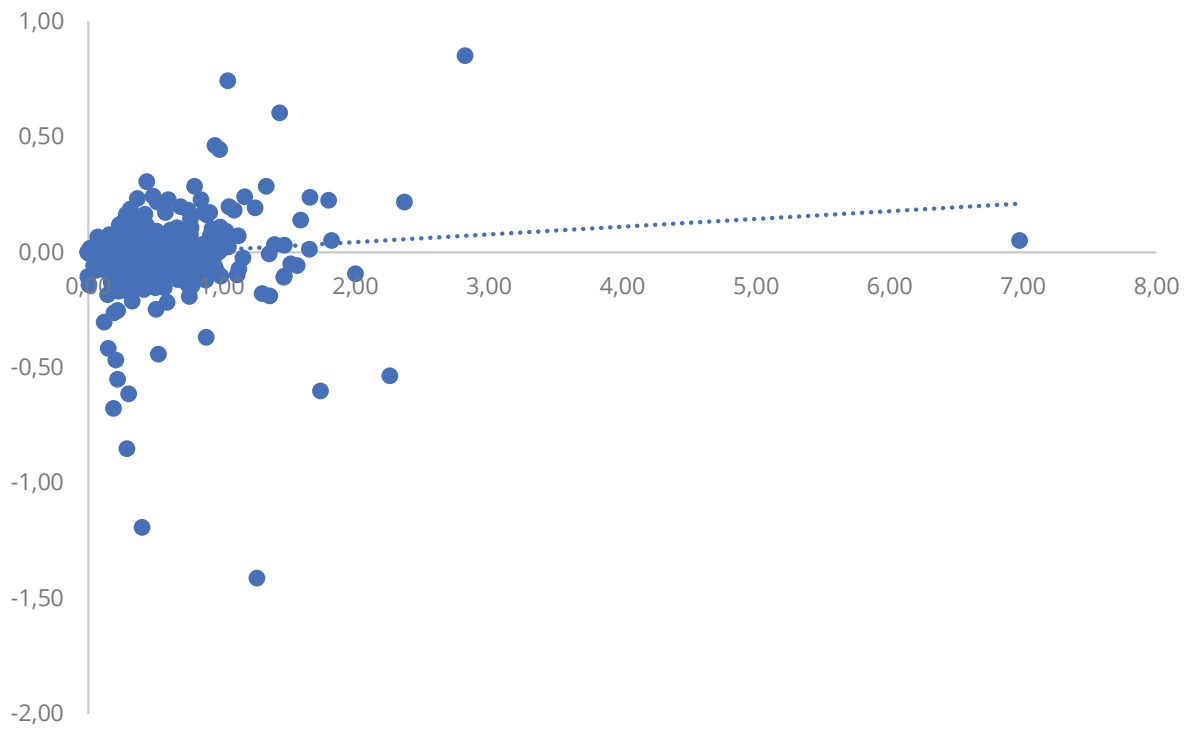
Gambar 5.1 Statistik Deskriptif Rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	6.93	6.98	0.85	6.93	6.98	0.85
Minimum	0.00	0.00	-1.41	0.13	0.31	0.02
Rata-rata	0.40	0.40	0.00	0.66	0.80	0.14
St.Deviasi	0.46	0.45	0.15	0.92	0.94	0.15
Koefisien Variasi	114.00	113.43	-3,766.45	138.51	116.99	111.16

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	2.10	2.00	0.22	1.77	1.82	0.22
Minimum	0.11	0.09	-1.19	0.54	0.63	0.01
Rata-rata	0.73	0.70	-0.03	1.01	1.09	0.08
St.Deviasi	0.39	0.37	0.15	0.44	0.45	0.06
Koefisien Variasi	53.42	52.39	-561.62	43.39	40.96	70.09

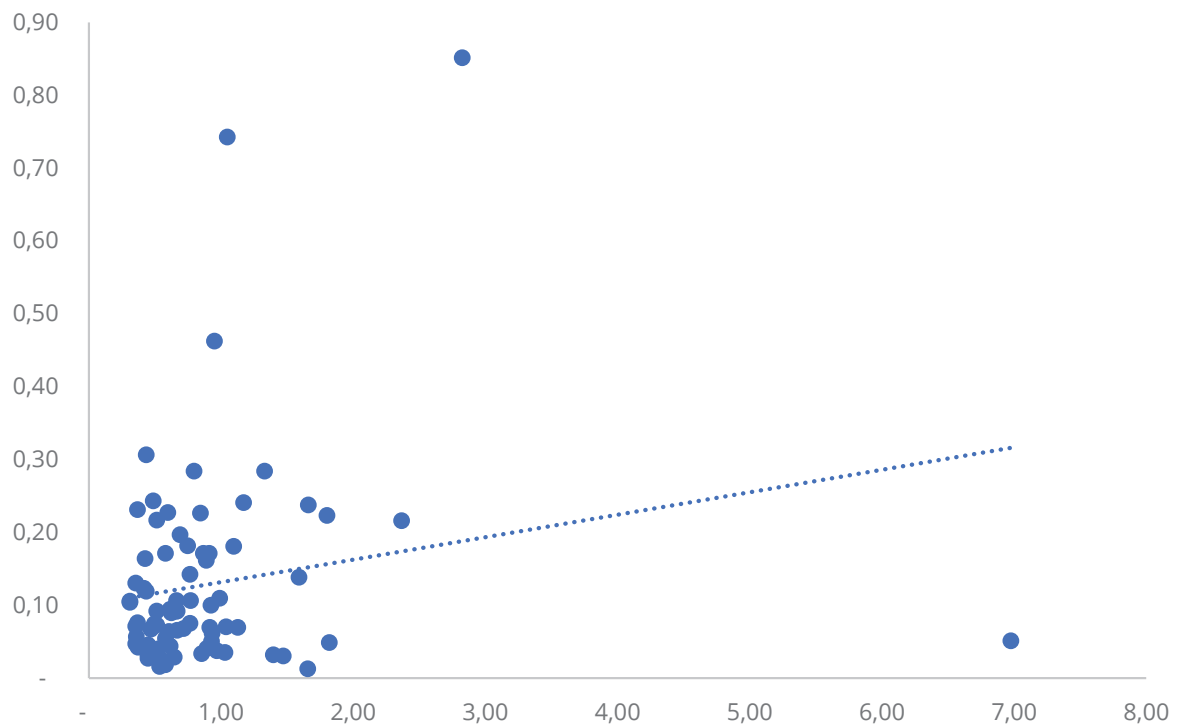
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	1.57	1.66	0.24	1.43	1.66	0.24
Minimum	0.42	0.41	-0.19	0.74	0.91	0.03
Rata-rata	0.88	0.89	0.02	1.04	1.16	0.12
St.Deviasi	0.27	0.28	0.08	0.26	0.27	0.08
Koefisien Variasi	30.24	31.52	511.54	24.55	23.19	66.47

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.2 Capaian Rasio PDRD dan PDRB Non Migas Harga Berlaku Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.3 Capaian Rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)

Tabel 5.7 Korelasi Pajak Daerah dan PRRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

	2014	2015	2016
PDRB	0.9353	0.9441	0.9386
PDRBMIG	0.9353	0.9441	0.9386
PDRBNONMIG	0.9487	0.9534	0.9474
PDRBNON23	0.9680	0.9749	0.9706
1.Pertanian,Kehutanan,danPerikanan	0.5256	0.5302	0.5117
2.PertambangandanPenggalian	0.2455	0.2198	0.2052
3.IndustriPengolahan	0.7644	0.7740	0.7663
4.PengadaanListrikdanGas	0.6361	0.6135	0.6438
5.PengadaanAir,PengelolaanSampah,LimbahdanDaurUlang	0.7778	0.7720	0.7561
6.Konstruksi	0.9603	0.9643	0.9569
7.PerdaganganBesardanEceran;ReparasiMobildanSepedaMotor	0.9370	0.9405	0.9310
8.TransportasidanPergudangan	0.8767	0.8735	0.8764
9.PenyediaanAkomodasidanMakanMinum	0.8683	0.8775	0.8581
10.InformasidanKomunikasi	0.9528	0.9627	0.9643
11.JasaKeuandangandanAsuransi	0.9346	0.9387	0.9462
12.RealEstat	0.9114	0.9166	0.9191
13.JasaPerusahaan	0.8312	0.8367	0.8448
14.AdministrasiPemerintahan,PertahanandanJaminanSosialWajib	0.9649	0.9685	0.9660
15.JasaPendidikan	0.9705	0.9795	0.9806
16.JasaKesehatandanKegiatanSosial	0.9623	0.9690	0.9703
17.Jasalainnya	0.9715	0.9769	0.9811
SEKTOR6SD17	0.9783	0.9850	0.9831

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2018

Tabel 5.8 Korelasi Retribusi Daerah dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

	2014	2015	2016
PDRB	0.1932	0.5745	0.6644
PDRBMIG	0.1932	0.5745	0.6644
PDRBNONMIG	0.2007	0.5869	0.6781
PDRBNON23	0.2154	0.6186	0.7301
1.Pertanian,Kehutanan,danPerikanan	0.0555	0.2020	0.1708

	2014	2015	2016
2.PertambangandanPenggalian	0.0060	0.0530	0.0501
3.IndustriPengolahan	0.1430	0.4397	0.4685
4.PengadaanListrikdanGas	0.1310	0.3890	0.4659
5.PengadaanAir,PengelolaanSampah,LimbahdanDaurUlang	0.1696	0.5517	0.5172
6.Konstruksi	0.2180	0.6163	0.7311
7.PerdaganganBesardanEceran;ReparasiMobildanSepedaMotor	0.2100	0.6279	0.6896
8.TransportasidanPergudangan	0.1759	0.5348	0.5996
9.PenyediaanAkomodasidanMakanMinum	0.2291	0.7147	0.7380
10.InformasidanKomunikasi	0.2324	0.6436	0.7865
11.JasaKeuangandanAsuransi	0.2343	0.6227	0.8097
12.RealEstat	0.2292	0.6120	0.7920
13.JasaPerusahaan	0.2227	0.5665	0.7791
14.AdministrasiPemerintahan,PertahanandanJaminanSosialWajib	0.2160	0.5775	0.7531
15.JasaPendidikan	0.2162	0.5990	0.7602
16.JasaKesehatandanKegiatanSosial	0.2275	0.6092	0.7738
17.Jasalainnya	0.2224	0.5954	0.7714
SEKTOR6SD17	0.2292	0.6493	0.7775

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2018

ii). Kategori Kualitas Belanja Modal untuk Pendidikan

Kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan diukur melalui rasio atau persentase belanja modal non-kantor terhadap total belanja pendidikan. Daerah penerima DID untuk kategori ini adalah daerah yang memiliki rasio belanja modal pendidikan non kantor terhadap total belanja pendidikan tinggi capain akhirnya pada 2018 dan perubahannya dari 2017 juga cukup tinggi. Yang menjadi catatan adalah masih terdapat daerah yang perubahannya kecil, namun masuk sebagai daerah penerima DID pada tahun 2020. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih untuk DID 2021. Bila melihat penilaiann deskriptif dari indikatornya, kategori ini masih layak untuk digunakan dalam formula DID tahun 2021, namun dengan catatan agar daerah yang mengalami penurunan dalam kinerjanya, sebaiknya tidak menjadi penerima DID. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar bobot untuk delta atau perubahannya dibandingkan dengan bobot pencapaian nilai terakhir.

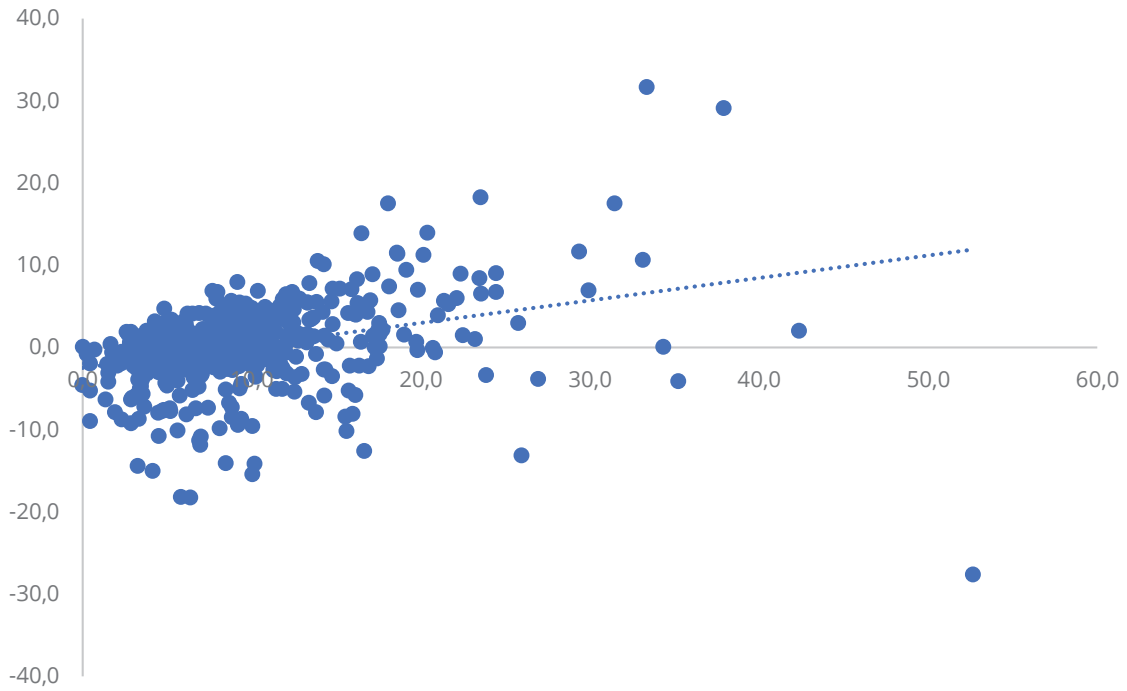
Tabel 5.9 Statistik Deskriptif Belanja Modal Pendidikan Non-Kantor terhadap Belanja Pendidikan untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	80.30	52.65	31.68	34.26	34.34	11.52
Minimum	0.15	0.00	-27.65	1.27	7.91	0.08
Rata-rata	9.19	9.19	0.01	10.13	14.33	4.20
St.Deviasi	6.71	6.32	4.88	5.37	5.33	2.76
Koefisien Variasi	73.03	68.81	59,358.56	53.01	37.16	65.74

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	29.24	31.47	18.21	20.81	31.47	18.21
Minimum	0.00	0.04	-15.47	0.55	9.83	-0.08
Rata-rata	9.29	9.19	-0.10	9.36	16.56	7.20
St.Deviasi	5.96	5.54	6.03	5.63	5.52	6.08
Koefisien Variasi	64.10	60.28	-6,161.66	60.14	33.35	84.47

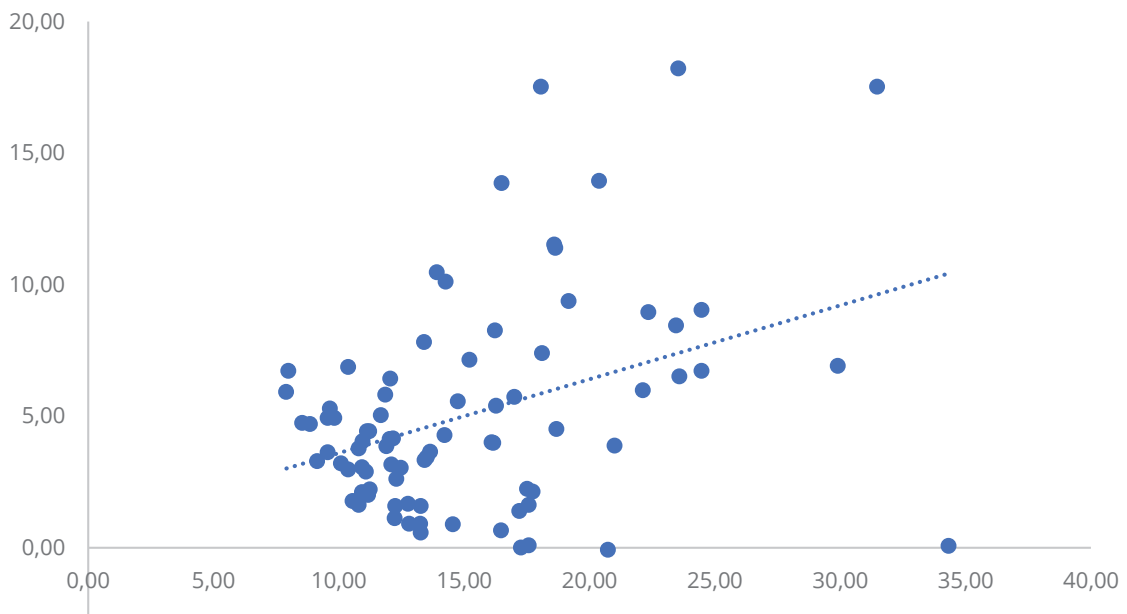
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	22.83	25.79	7.39	16.16	22.14	7.39
Minimum	1.92	3.40	-9.58	8.07	14.74	2.23
Rata-rata	9.37	10.23	0.86	11.88	17.55	5.66
St.Deviasi	5.58	5.46	3.91	3.64	2.95	2.06
Koefisien Variasi	59.59	53.42	453.22	30.64	16.80	36.46

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.4 Capaian Belanja Modal Pendidikan Non-Kantor terhadap Belanja Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.5 Capaian Belanja Model Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)

iii). Kategori Kualitas Belanja Modal untuk Kesehatan

Hampir sama dengan kualitas belanja modal untuk kesehatan, kualitas belanja modal untuk kesehatan diukur melalui rasio atau persentase belanja modal kesehatan non-kantor terhadap total belanja kesehatan. Dengan melihat penialain deskriptif yang ada, indikator ini juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas belanja modal untuk kesehatan. Untuk DID tahun 2021, kategori kualitas belanja modal untuk kesehatan layak untuk dipertahankan, namun dengan catatan, agar daerah yang mengalami penurunan dalam kinerjanya, sebaiknya tidak mendapatkan alokasi DID. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar bobot untuk delta atau perubahannya dibandingkan dengan bobot pencapaian nilai terakhir.

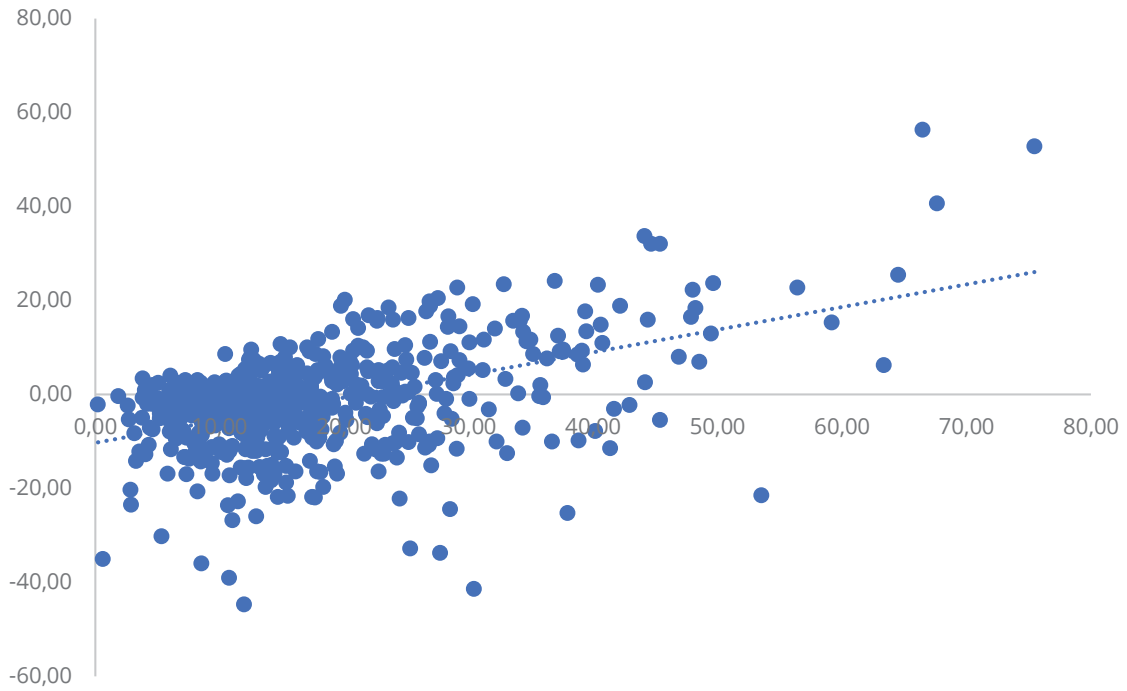
Tabel 5.10 Statistik Deskriptif Belanja Modal Kesehatan untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Daerah Kabupaten	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	75.03	75.46	52.76	41.65	49.47	32.06
Minimum	0.46	0.60	-44.70	4.73	18.52	2.54
Rata-rata	20.26	18.55	-1.72	17.88	30.24	12.37
St.Deviasi	11.57	11.48	11.33	8.06	8.35	7.00
Koefisien Variasi	57.11	61.92	-658.77	45.11	27.60	56.63

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
	Maksimum	44.85	66.50	56.36	33.87	66.50
Minimum	0.00	1.86	-21.97	0.00	17.39	-1.80
Rata-rata	16.55	15.45	-1.10	15.53	27.33	11.80
St.Deviasi	9.63	10.14	11.09	9.85	11.22	14.05
Koefisien Variasi	58.19	65.61	-1,008.23	63.45	41.06	119.04

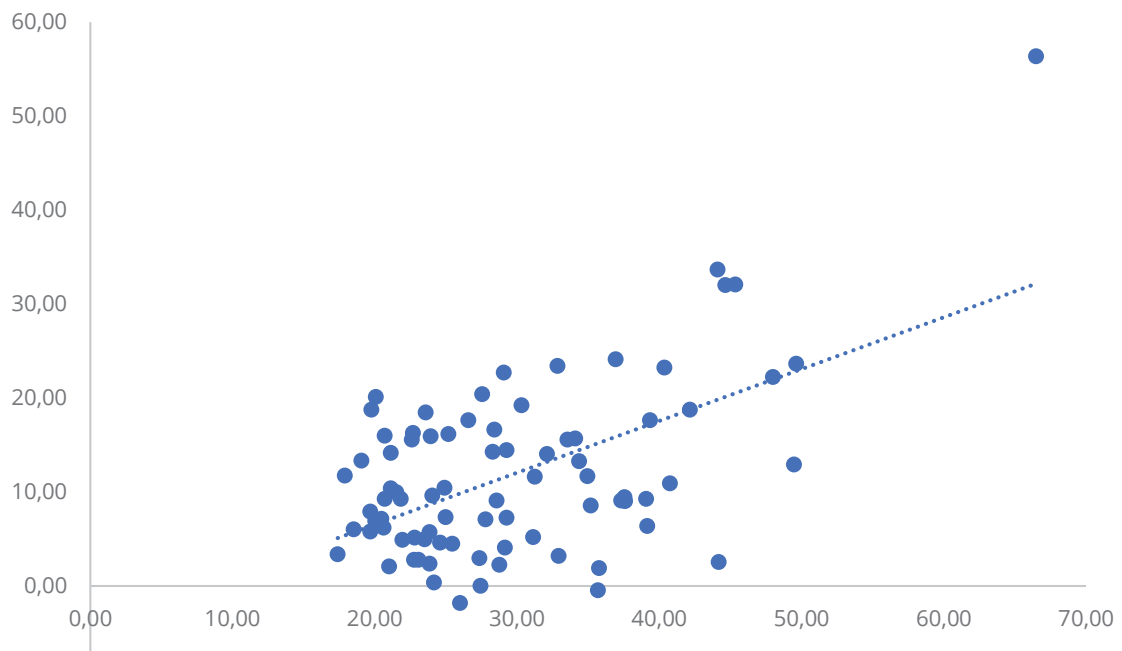
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
	Maksimum	52.88	49.64	23.66	36.15	49.64
Minimum	2.09	0.21	-19.74	11.79	19.69	-0.46
Rata-rata	20.91	19.69	-1.23	22.81	31.31	8.50
St.Deviasi	11.41	10.97	8.62	9.02	10.07	7.54
Koefisien Variasi	54.56	55.73	-703.50	39.53	32.16	88.70

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.6 Capaian Belanja Modal Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2018 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.7 Capaian Belanja Modal Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)

iv). Kategori Realisasi Belanja Daerah

Indikator dari kategori realisasi belanja daerah adalah persentase realisasi belanja daerah terhadap belanja APBD (sebelum ada perubahan). Umumnya, daerah yang memiliki nilai yang tinggi pada 2018 adalah karena nilai delta atau perubahannya yang juga tinggi. Namun, daerah penerima DID tahun 2020 memiliki karakteristik yang berbeda, dimana daerah penerima DID umumnya merupakan daerah yang realisasinya tinggi namun memiliki perubahan yang mengecil dari tahun 2017. Terdapat juga beberapa daerah yang perubahannya adalah menurun, namun tetap mendapatkan alokasi DID. Hal tersebut disebabkan adanya perbandingan atau rasio yang tidak *apple to apple* antara realisasi belanja daerah (yang merupakan hasil perubahan APBD) terhadap belanja APBD (sebelum adanya perubahan APBD). Penyebabnya adalah karena ketiadaan informasi belanja APBD yang ada dalam APBD Perubahan, dimana pada waktu penilaian, belum semua daerah melaporkan APBD Perubahannya. Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian dan koreksi. Apabila memang tidak tersedia data yang dapat menjadi perbandingan atau rasio yang *apple to apple*, maka sebaiknya indikator realisasi belanja daerah ini dapat di hilangkan dalam kelompok kategori Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 5.11 Statistik Deskriptif Realisasi Belanja Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)

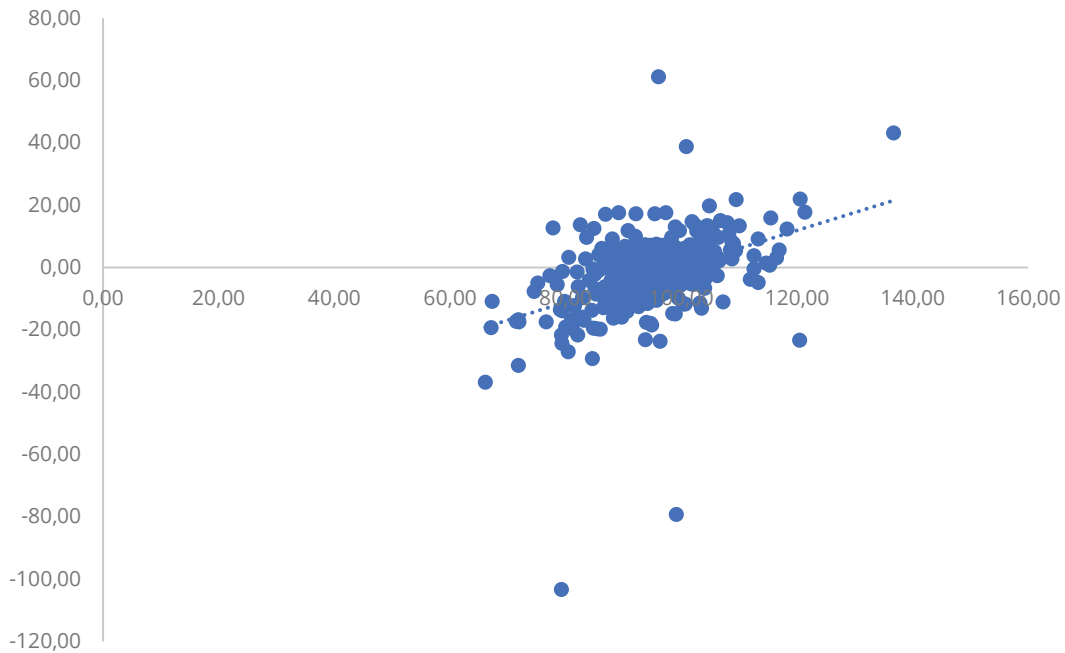
Daerah Kabupaten	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	178.52	121.38	38.75	178.52	103.54	38.75
Minimum	62.14	66.14	-79.34	62.14	88.91	-79.34
Rata-rata	98.50	96.04	-2.46	100.36	99.39	-0.97
St.Deviasi	8.60	7.43	8.85	12.45	2.09	12.39
Koefisien Variasi	8.73	7.73	-359.47	12.41	2.11	-1,277.10

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
	Maksimum	182.80	115.56	61.16	113.97	104.10
Minimum	34.93	71.52	-103.49	34.93	94.61	-14.99
Rata-rata	95.07	93.37	-1.70	93.85	98.57	4.72
St.Deviasi	13.90	7.79	14.71	15.38	2.22	14.19
Koefisien Variasi	14.62	8.35	-863.42	16.39	2.25	300.73

Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
	Maksimum	105.66	136.76	43.12	105.66	100.74
Minimum	80.28	74.58	-12.80	92.54	98.33	-6.32

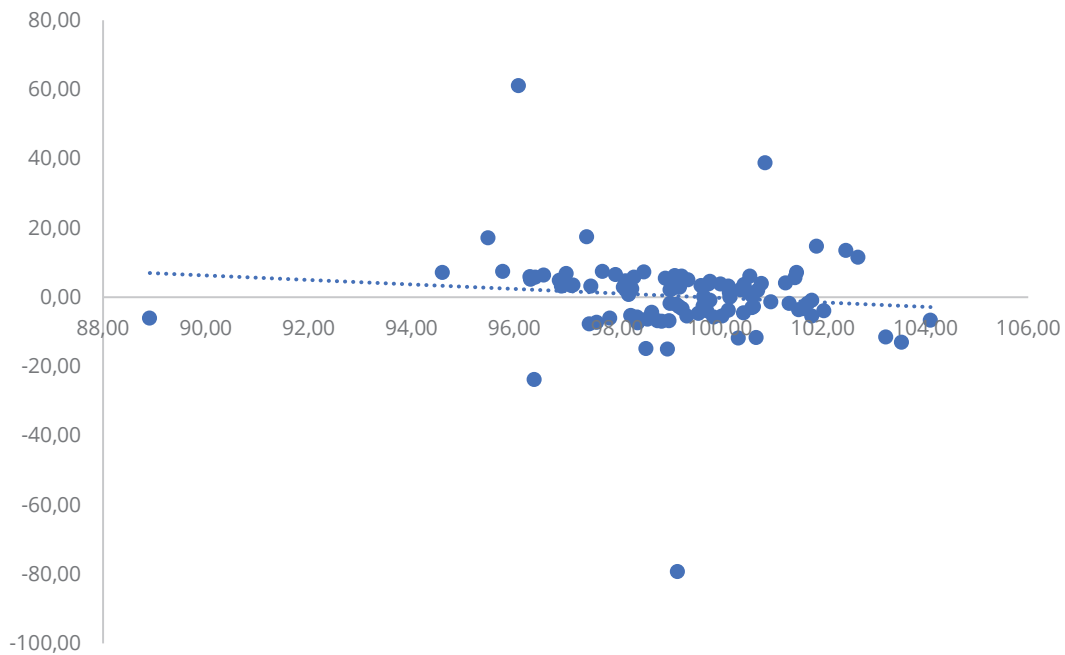
Rata-rata	95.04	94.47	-0.56	99.77	99.63	-0.14
St.Deviasi	6.51	10.39	10.12	5.45	1.00	5.55
Koefisien Variasi	6.85	11.00	-1,794.90	5.46	1.00	-3,941.41

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 202



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.9 Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID Tahun 2020 (Persen)

v). Kategori Pembiayaan Kreatif

Dalam DID tahun 2020, penilaian kategori pembiayaan kreatif merupakan hasil penilaian kementerian/lembaga non kementerian terkait, dimana untuk DID tahun 2020 adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kategori pembiayaan kreatif dalam DID tahun 2020 merupakan kategori dengan jumlah daerah penerima paling sedikit, yaitu hanya 3 pemerintah daerah. Tentunya hal ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan sistem penentuan daerah penerima untuk kategori ini, dimana pihak pemerintah daerah yang menerima DID tahun 2020 adalah pihak yang menjadi debitur PT SMI. Perlu dilakukan reformulasi atau penambahan indikator atau jenis pembiayaan kreatif yang lain, misalnya tidak hanya dari PT SMI, tetapi dapat juga dari pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dimana Penanggung Jawab Proyek Pelaksana (PJPK)-nya adalah Kepala Daerah. Penilaian untuk KPBU dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan (DJPPR) dan Bappenas. Pembiayaan kreatif dapat juga terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi, kategori ini tetap layak untuk dipertahankan untuk DID tahun 2021, namun harus dengan penyempurnaan berupa jenis-jenis pembiayaan kreatif yang lain dan penentuan kriteria yang jelas, tidak hanya dari PT SMI saja. Namun, apabila tidak terdapat indikator yang cukup baik, walaupun kategori pembiayaan kreatif ini bagus, sebaiknya kategori ini dihilangkan dalam kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 5.12 Pembiayaan Kreatif Tahun 2019 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)

Daerah	Nilai Pembiayaan dari PT SMI (Rp. Miliar)	Alokasi DID (Rp. Ribu)
Provinsi Sulawesi Tenggara	570.0	18,013,591
Kota Bandar Lampung	330.0	10,428,921
Kab. Lampung Selatan	240.0	7,584,670

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

vi). Kategori *Mandatory Spending*

Mandatory spending merupakan anggaran dalam APBD sesuai persentase yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran untuk belanja pendidikan (minimal 20 persen dari total belanja APBD), belanja kesehatan (minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji), belanja infrastruktur (minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH), dan Alokasi Dana Desa (ADD) (minimal 10 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH)). Kondisi kepatuhan daerah dalam *mandatory spending* pada tahun 2019 untuk DID tahun 2020 adalah seperti yang terinci dalam Tabel 25 berikut ini:

Tabel 5.13 Perkembangan Kepatuhan Daerah dalam *Mandatory Spending* Tahun 2019 untuk DID Tahun 2019

No.	Kepatuhan	Jumlah Pemerintah Daerah				Persentase Pemerintah Daerah			
		Kab.	Kota	Provinsi	Total	Kab.	Kota	Provinsi	Total
1	Alokasi Dana Desa/ Kelurahan	379	88	34	501	91.33	94.62	100.00	92.44
2	Belanja Pendidikan	327	89	32	448	78.80	95.70	94.12	82.66
3	Belanja Kesehatan	413	91	27	531	99.52	97.85	79.41	97.97
4	Belanja Infrastruktur	262	62	29	353	63.13	66.67	85.29	65.13

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Dalam PMK No. 141/PMK.07/2019, disebutkan bahwa penentuan pagu DID per kategori dikecualikan untuk pagu DID kategori *Mandatory Spending*. Pagu DID kategori *Mandatory Spending* ditentukan berdasarkan jumlah daerah yang memenuhi *Mandatory Spending* serta jumlah alokasi DID per Daerah.

Kriteria ini dapat tetap menjadi kategori kinerja dalam DID tahun 2021. Nilai alokasi untuk kategori ini untuk tahun 2021 sebaiknya juga diperbesar dari nilai DID tahun 2020 yang sebesar Rp. 250 juta per daerah, dimana nilai ini dirasa terlalu kecil sebagai bentuk insentif bagi pemerintah daerah yang mematuhi.

Dikarenakan terdapat beberapa kebijakan terbaru terkait *mandatory spending* dalam APBD tahun 2020, untuk kategori *mandatory spending* dalam DID tahun 2021 sebaiknya menggunakan indikator:

- Pemenuhan anggaran untuk belanja pendidikan (minimal 20 persen dari total belanja APBD);
- Pemenuhan belanja kesehatan (minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji);
- Pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) (minimal 10 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH));
- Pemenuhan Anggaran Pengawasan (yaitu untuk APIP), untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang didasarkan atas besaran dari total belanja daerah sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2019; dan
- Pemenuhan penyesuaian belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam APBD Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK No.

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Sesuai PMK No. 35/PMK.07/2020, belanja infrastruktur sebesar 25% dari DTU dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk penanganan COVID-19, baik untuk sektor Kesehatan maupun jaring pengaman sosial.

vii). Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan

Kepatuhan daerah dalam ketepatan waktu pelaporan mencakup penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan, penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya. Sama seperti kategori *mandatory spending*, penentuan pagu DID per kategori dikecualikan juga untuk pagu DID kategori ketepatan waktu pelaporan. Pagu DID kategori ketepatan waktu pelaporan juga ditentukan berdasarkan jumlah daerah yang memenuhi ketepatan waktu pelaporan serta jumlah alokasi DID per Daerah.

Tabel 5.14 Perkembangan Kepatuhan Daerah dalam Ketepatan Waktu Pelaporan Tahun 2019 untuk DID Tahun 2020

No.	Kepatuhan	Jumlah Pemerintah Daerah				Persentase Pemerintah Daerah			
		Kab.	Kota	Provinsi	Total	Kab.	Kota	Provinsi	Total
1	Penyampaian Perda APBD	375	86	31	492	90.36	92.47	91.18	90.77
2	Realisasi Semester I	124	32	7	163	29.88	34.41	20.59	30.07
3	Laporan Pertanggungjawaban	313	71	24	408	75.42	76.34	70.59	75.28

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Kriteria ini dapat tetap menjadi kategori kinerja dalam DID tahun 2021. Nilai alokasi untuk kategori ini sebaiknya juga diperbesar dari nilai DID tahun 2020 yang sebesar Rp. 250 juta per daerah, dimana nilai ini dirasa terlalu kecil sebagai bentuk insentif bagi pemerintah daerah yang mematuhi. Untuk kategori ketepatan waktu pelaporan untuk DID tahun 2021, selain ketiga indikator di atas, sebaiknya juga ditambahkan dengan:

- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyesuaian APBD ke Kementerian Keuangan, yang paling lambat tanggal 23 April 2020; dan
- Penyampaian laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19, yang mencakup laporan kinerja bidang ublican dan laporan bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

2. Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

i). Kategori Peta Mutu Pendidikan (PMP)

Peta mutu Pendidikan (PMP) disusun dengan berdasarkan penerapan standar nasional pendidikan (SNP), dimana datanya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam penilaian PMP, skor tertinggi adalah 7, dimana belum ada daerah yang mampu mencapainya. Secara umum, PMP mengalami peningkatan, baik nilai maksimum, minimum, maupun rata-rata. Namun, terdapat juga daerah yang mengalami penurunan. Nilai PMP yang tinggi pada 2018, umumnya justru mengalami peningkatan yang rendah dari PMP 2017. Begitu juga daerah yang mendapatkan alokasi DID pada tahun 2020 adalah daerah yang memiliki kecendrungan bahwa nilai akhir PMP-nya tinggi, namun perubahannya tidak terlalu besar. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian, dimana bobot delta atau perubahan ke depan lebih dibesarkan dibandingkan dengan bobot untuk pencapaian terakhir. Oleh karena itu, indikator ini tetap dapat digunakan untuk DID tahun 2020, namun dengan pertimbangan nilai bobot untuk delta-nya diperbesar.

Tabel 5.15 Statistik Deskriptif Peta Mutu Pendidikan untuk DID Tahun 2020

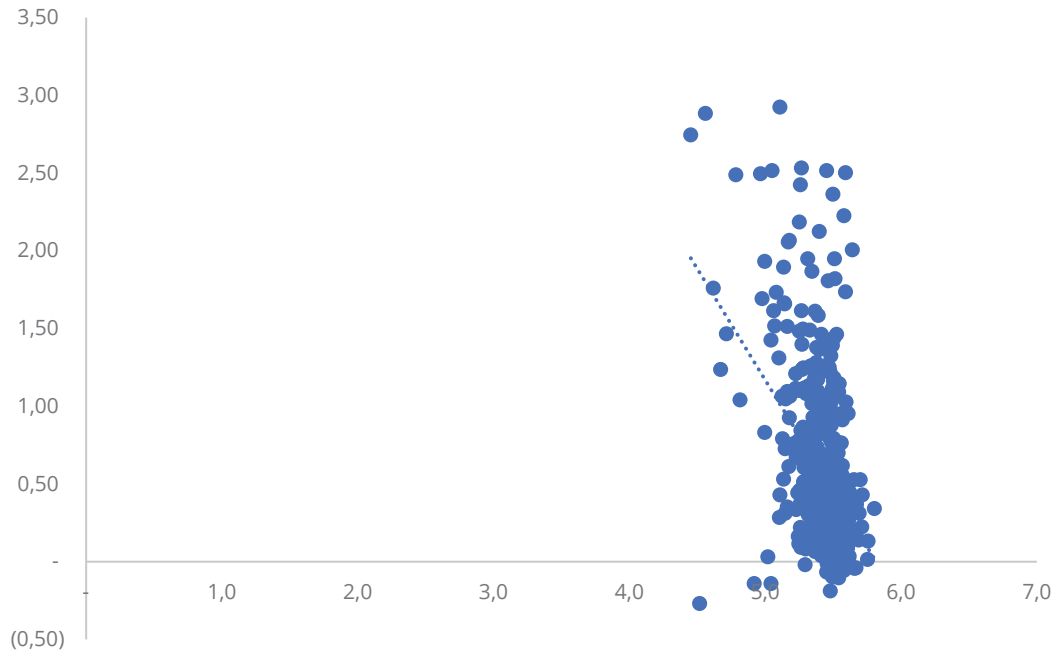
Daerah Kabupaten	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	5.74	5.76	2.92	5.19	5.70	2.36
Minimum	1.68	4.45	-0.27	3.14	5.44	0.39
Rata-rata	4.82	5.40	0.58	4.61	5.53	0.92
St.Deviasi	0.66	0.17	0.57	0.49	0.05	0.45
Koefisien Variasi(%)	13.75	3.14	98.15	10.54	0.95	49.38

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
	Maksimum	5.71	5.80	2.50	5.46	5.80
Minimum	3.09	5.25	-0.10	3.09	5.54	0.34
Rata-rata	5.09	5.52	0.43	4.93	5.63	0.69
St.Deviasi	0.45	0.09	0.43	0.67	0.08	0.64
Koefisien Variasi(%)	8.92	1.59	100.10	13.59	1.42	92.06

Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
	Maksimum	5.45	5.62	1.95	4.66	5.57
Minimum	3.07	5.00	0.12	4.66	5.57	0.91

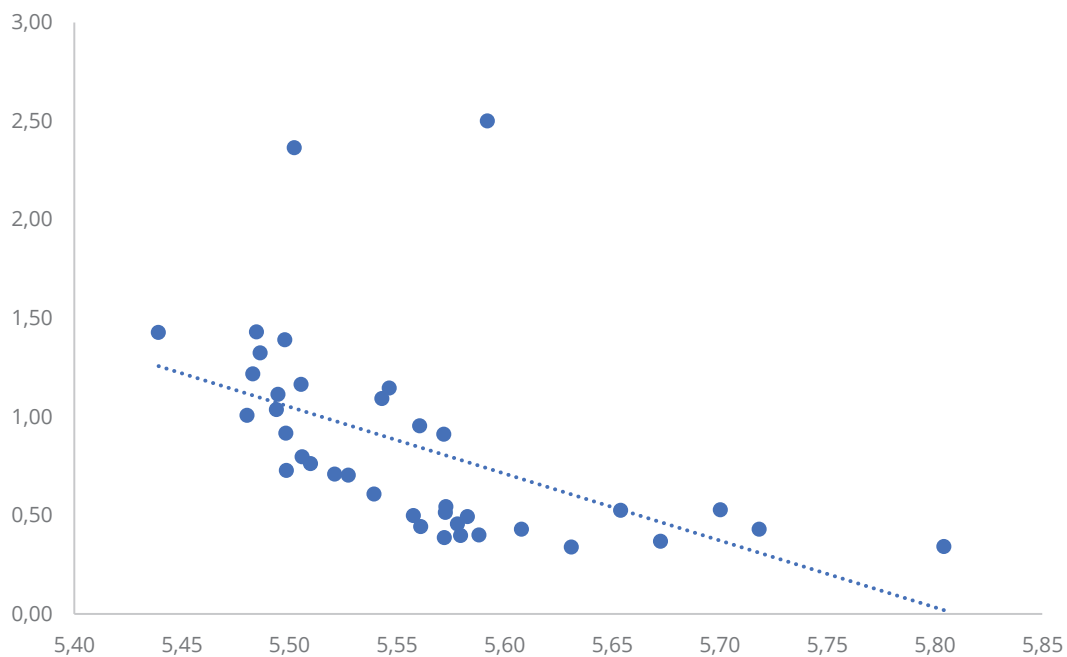
Rata-rata	4.82	5.50	0.69	4.66	5.57	0.91
St.Deviasi	0.55	0.11	0.46	0.00	0.00	0.00
Koefisien Variasi(%)	11.32	2.08	66.41	0.00	0.00	0.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.10 Capaian Peta Mutu Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.11 Capaian Peta Mutu Pendidikan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020

ii). Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)

Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Kabupaten/Kota dan SMA/SMK untuk Provinsi) bervariasi antara daerah, dimana secara rata-rata peningkatannya sedikit dan beberapa daerah mengalami penurunan. Bila dilihat dari rata-ratanya, baik daerah secara keseluruhan maupun daerah penerima DID tahun 2020, nilai rata-rata UN masih rendah. Daerah yang tinggi nilai rata-rata UN-nya pada tahun 2018, mengalami peningkatan yang rendah dari posisi tahun 2017. Begitu juga pola untuk daerah penerima DID tahun 2020.

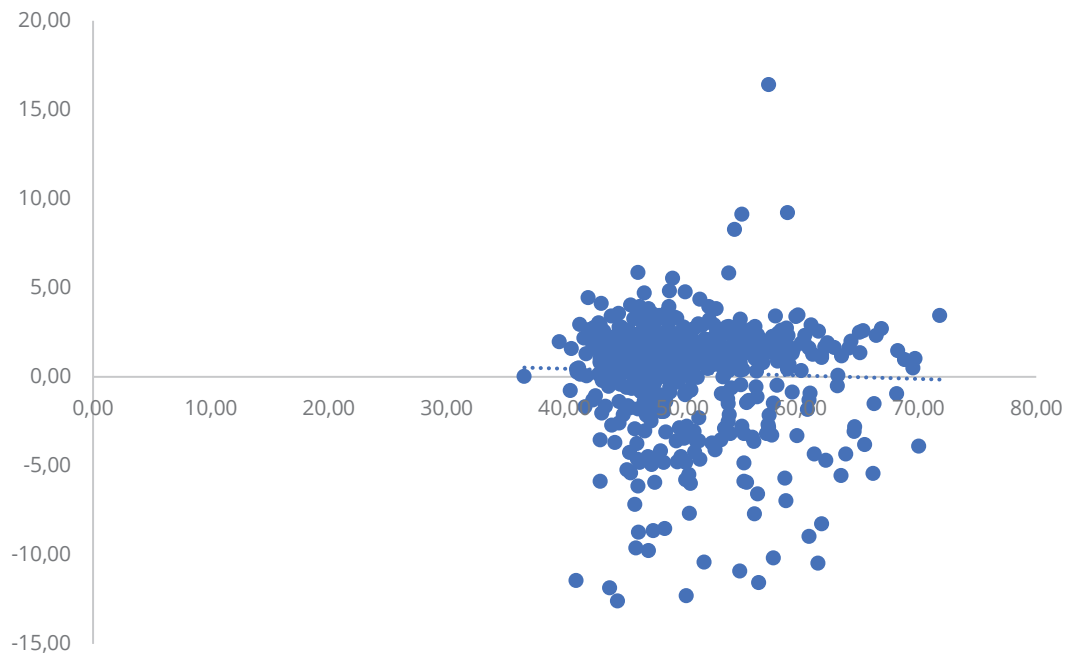
Tabel 5.16 Statistik Deskriptif Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2020

Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	73.95	70.05	16.40	64.13	66.44	16.40
Minimum	36.57	36.58	-12.59	40.91	48.70	1.26
Rata-rata	50.01	49.92	-0.09	52.95	55.72	2.76
St.Deviasi	6.99	5.78	3.29	4.81	3.73	2.57
Koefisien Variasi(%)	13.97	11.57	-3,694.94	9.09	6.70	93.06

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	68.39	71.83	4.81	68.39	71.83	3.46
Minimum	39.99	41.02	-4.86	51.70	54.93	1.98
Rata-rata	52.57	54.05	1.47	58.01	60.90	2.88
St.Deviasi	6.52	6.22	1.69	4.82	4.75	0.52
Koefisien Variasi(%)	12.39	11.51	114.81	8.31	7.79	18.17

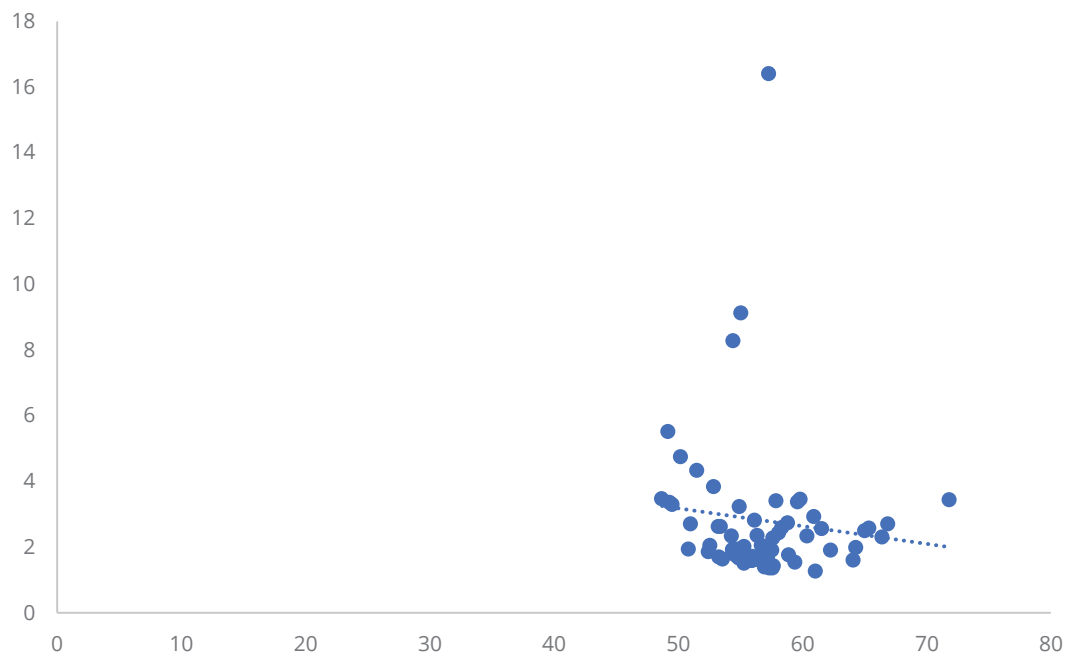
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	64.20	66.90	4.75	64.20	66.90	4.75
Minimum	40.12	43.01	-11.87	45.47	50.22	2.58
Rata-rata	49.68	50.75	1.08	55.77	58.93	3.16
St.Deviasi	5.94	5.91	2.81	9.18	8.42	1.06
Koefisien Variasi(%)	11.95	11.65	261.35	16.45	14.29	33.50

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.12 Capaian Rata-Rata Ujian Nasional Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.13 Capaian Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020

Nilai rata-rata UN sekolah menengah pada tahun 2019 sudah dapat diperoleh dari Kemendikbud, namun ke depan, untuk nilai UN pada tahun 2020 tidak ada, dikarenakan

ditiadakannya UN akibat wabah COVID-19 yang terjadi. Nilai rata-rata UN, menurut beberapa ahli, sudah tidak akan relevan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kemendikbud saat ini telah mempunyai alat untuk mengukur Indeks Pemerataan Guru (IPG) PNS. IPG PNS menyajikan data tingkat pemerataan guru PNS Kabupaten/Kota, Provinsi, atau lingkup Nasional. Pemerataan sempurna guru dapat terjadi apabila ketersediaan guru PNS sama dengan kebutuhan guru pada semua sekolah di satu wilayah yang ditunjukkan oleh IPG dengan angka 0. Namun apabila terdapat ketimpangan penugasan yang menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan guru, IPG akan bergerak dari angka 0 menuju angka 1 (satu). Ketidakmerataan sempurna guru dicerminkan oleh IPG dengan angka 1 (satu). Oleh karena itu, untuk DID tahun 2021, kategori rata-rata UN sekolah menengah sebaiknya diganti dengan IPG PNS.

iii). Kategori Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) untuk kabupaten/kota adalah APM SMP dan untuk provinsi adalah APM SMA/SMK. Apabila dilihat secara umum, nilai rata-rata APM memang meningkat, namun masih terdapat beberapa daerah yang menurun. Pola secara umumnya adalah bahwa APM yang tinggi pada tahun 2018 merupakan APM yang delatanya cukup tinggi dari 2017. Hal tersebut juga menjadi pola bagi daerah penerima DID tahun 2020. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa terdapat daerah yang menurun nilai APM-nya, justru mendapatkan alokasi DID. Oleh karena itu, kategori APM dan indikator kinerjanya masih dapat digunakan dalam alokasi DID tahun 2021, namun dengan mempertimbangkan untuk tidak memasukan daerah yang menurun nilai APM-nya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan bobot delta atau perubahannya dibandingkan nilai capaian tahun terakhirnya.

Tabel 5.17 Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2020

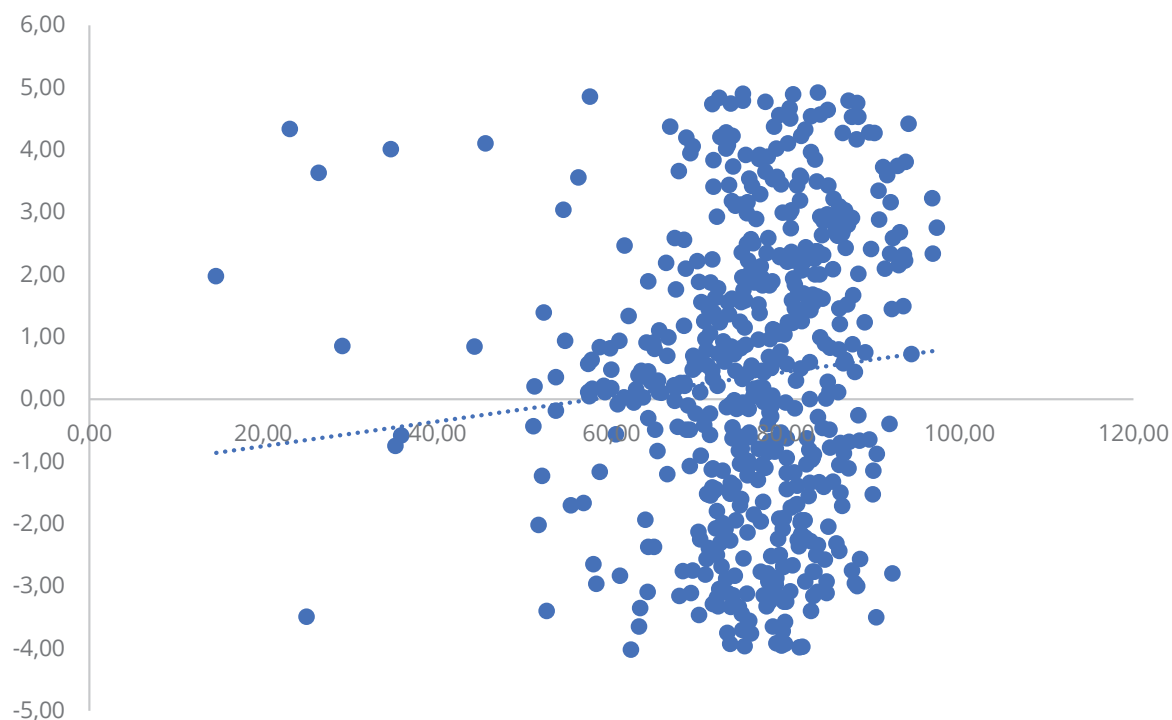
Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	94.66	97.41	4.92	94.66	97.41	4.92
Minimum	12.61	14.58	-4.03	74.13	72.44	1.44
Rata-rata	75.70	76.03	0.33	83.16	86.02	2.86
St.Deviasi	10.71	10.66	2.38	4.99	4.74	1.37
Koefisien Variasi	14.15	14.02	727.69	6.00	5.51	47.86

Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	95.12	96.96	4.79	94.63	96.96	4.53
Minimum	64.55	64.24	-3.99	77.64	81.86	2.14

Rata-rata	79.70	80.17	0.47	86.74	89.87	3.12
St.Deviasi	7.10	7.03	2.48	4.90	4.65	0.84
Koefisien Variasi	8.91	8.77	521.87	5.64	5.18	26.81

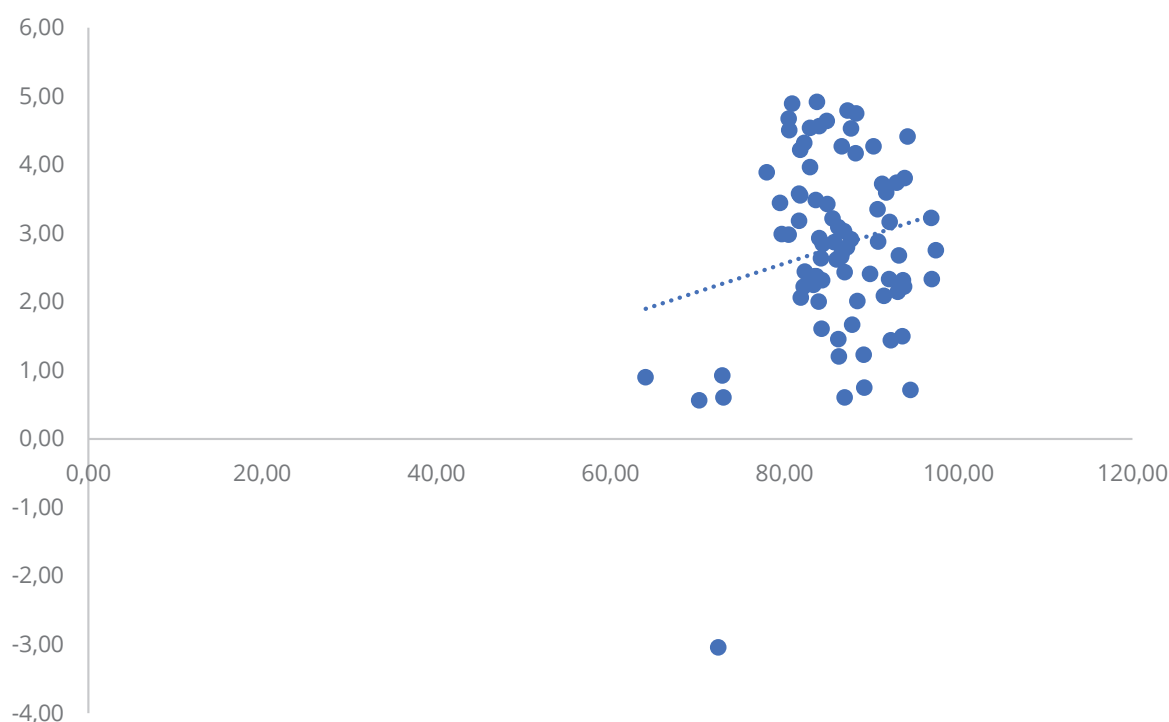
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	72.40	73.00	0.93	72.40	73.00	0.92
Minimum	43.48	44.31	-0.19	63.15	64.05	0.56
Rata-rata	61.39	61.74	0.36	69.29	70.04	0.75
St.Deviasi	6.09	6.09	0.31	4.27	4.20	0.19
Koefisien Variasi	9.93	9.87	86.19	6.16	5.99	25.79

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.14 Capaian Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.15 Capaian Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020

3. Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

i). Kategori Penanganan *Stunting*

Kategori penurunan *stunting* dinilai dengan menggunakan data hasil Riskesdas tahun 2013 dan 2018. Secara umum, rata-rata *stunting* mengalami penurunan, terutama untuk daerah penerima DID. Selain daerah penerima DID, terdapat daerah-daerah yang justru mengalami peningkatan. Pola umum daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai *stunting* rendah pada tahun 2018 adalah daerah yang penurunannya lebih tinggi dari nilai tahun 2018. Begitu juga untuk daerah penerima DID tahun 2020, dan semua daerah penerima DID tahun 2020 merupakan daerah yang mengalami penurunan *stunting*.

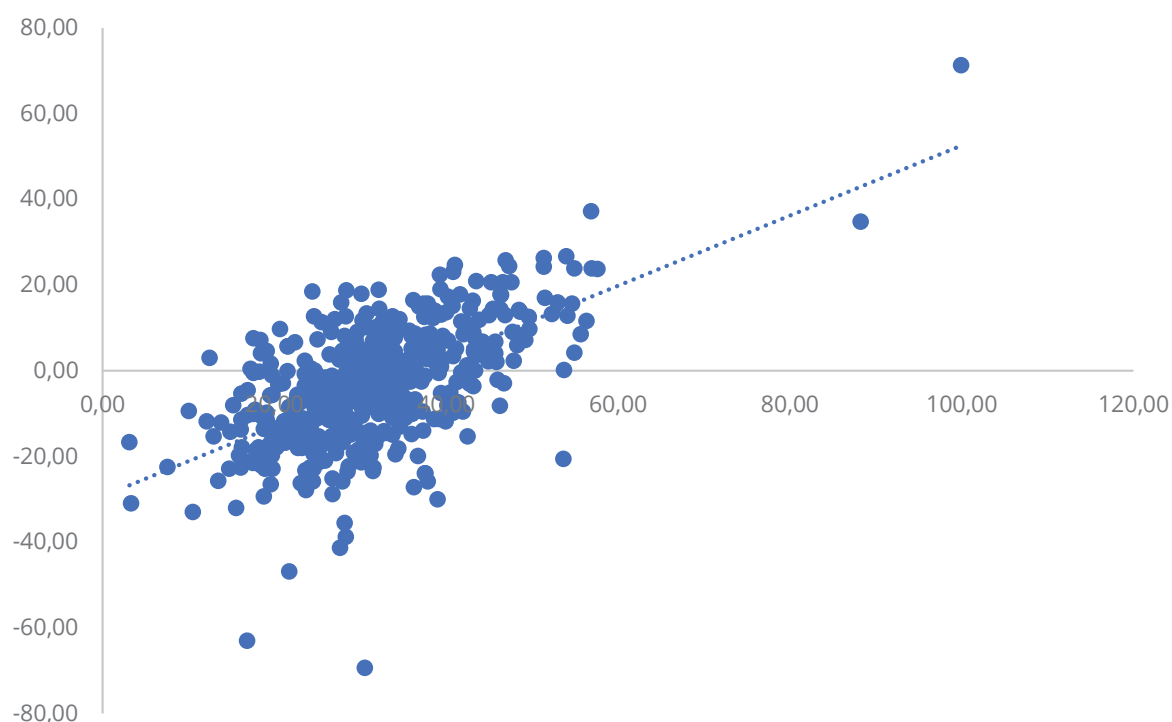
Tabel 5.18 Statistik Deskriptif Penanganan *Stunting* untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Kabupaten	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Maksimum	100.00	100.00	71.18	79.90	31.58	-5.36
Minimum	5.96	3.12	-69.46	21.51	3.38	-63.04
Rata-rata	36.36	32.50	-3.70	41.74	22.42	-19.32
St.Deviasi	11.22	10.09	14.30	9.17	5.09	8.54
Koefisien Variasi	30.85	31.05	-386.05	21.97	22.70	-44.22

Kota	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Maksimum	48.81	56.90	37.19	40.84	22.74	-4.62
Minimum	9.55	12.13	-25.75	21.56	12.13	-25.75
Rata-rata	29.55	27.11	-2.44	32.55	17.69	-14.86
St.Deviasi	8.92	8.88	11.49	6.33	2.94	5.66
Koefisien Variasi	30.20	32.76	-471.20	19.45	16.64	-38.07

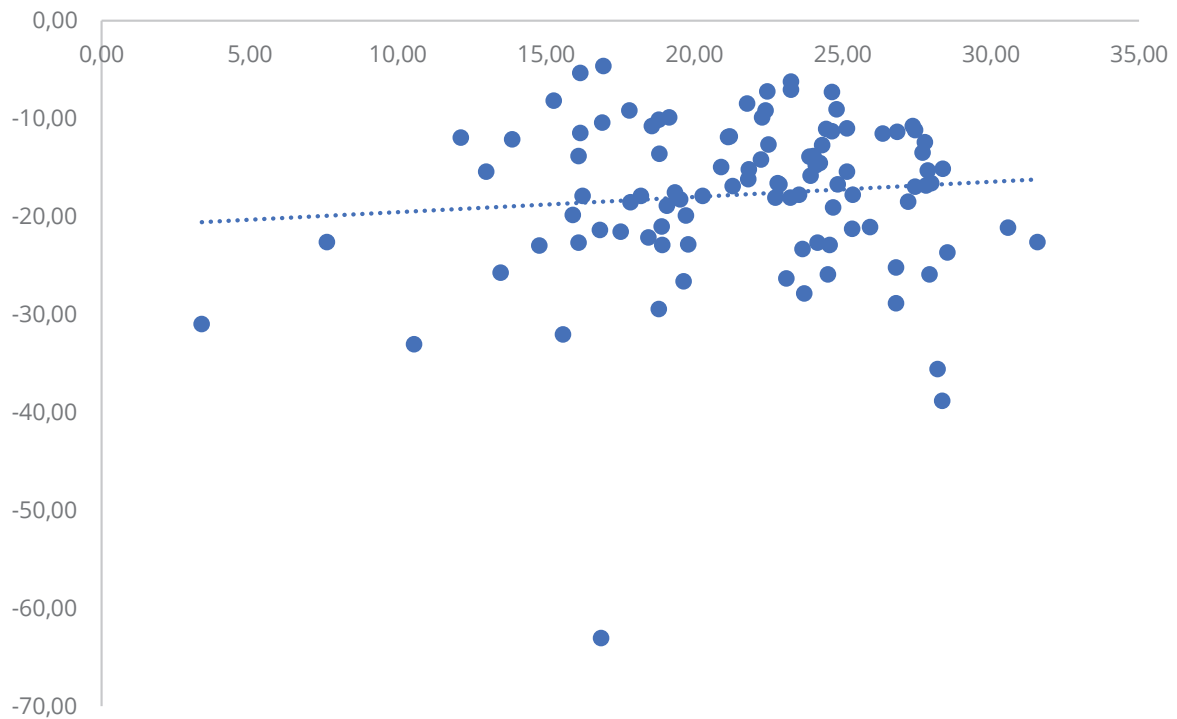
Provinsi	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Maksimum	43.54	37.87	4.61	40.18	27.79	-6.25
Minimum	23.69	16.15	-12.39	27.60	16.15	-12.39
Rata-rata	34.29	29.45	-4.89	34.21	24.27	-9.94
St.Deviasi	4.69	4.67	4.47	4.62	3.69	2.25
Koefisien Variasi	13.68	15.86	-91.48	13.50	15.21	-22.60

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.16 Capaian Penanganan Stunting Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.17 Capaian Penanganan Stunting Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Kategori penanganan *stunting* dalam PMK No. 141/PMK.07/2019 tidak secara jelas disebutkan apakah *stunting* untuk bayi di bawah usia dua tahun (baduta) ataupun *stunting* untuk bayi di bawah usia lima tahun (balita). Terkait dengan RPJMN tahun 2020-2024, *stunting* yang menjadi perhatian dan prioritas adalah *stunting* untuk balita. Oleh karena itu, untuk DID tahun 2021, angka *stunting* yang digunakan sebagai indikator sebaiknya adalah *stunting* balita. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori penurunan *stunting* ini tetap dapat dipertahankan untuk DID tahun 2021, namun perlu dikomunikasikan kembali dengan Kementerian Kesehatan dan BPS terkait dengan ketersediaan data *stunting* balita sampai saat ini.

ii). Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Kategori balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dilakukan penilaian berdasarkan data tahun 2013 dan 2018. Secara rata-rata seluruh daerah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2018, kecuali untuk daerah penerima DID tahun 2020 yang justru mengalami peningkatan secara rata-rata. Daerah yang memiliki capaian balita yang mendapatkan imunisasi lengkap tinggi pada tahun 2018 merupakan daerah yang mengalami peningkatan yang tinggi, dan sebaliknya. Begitu juga untuk daerah penerima DID tahun 2020 untuk kategori ini. Tentunya kategori ini tetap layak untuk dipertahankan untuk alokasi DID tahun 2020, namun dengan pertimbangan untuk tidak memasukan daerah yang mengalami

penurunan nilainya. Salah satu caranya adalah dengan memperbesar bobot deltanya, dibandingkan dengan bobot capaian tahun terakhirnya.

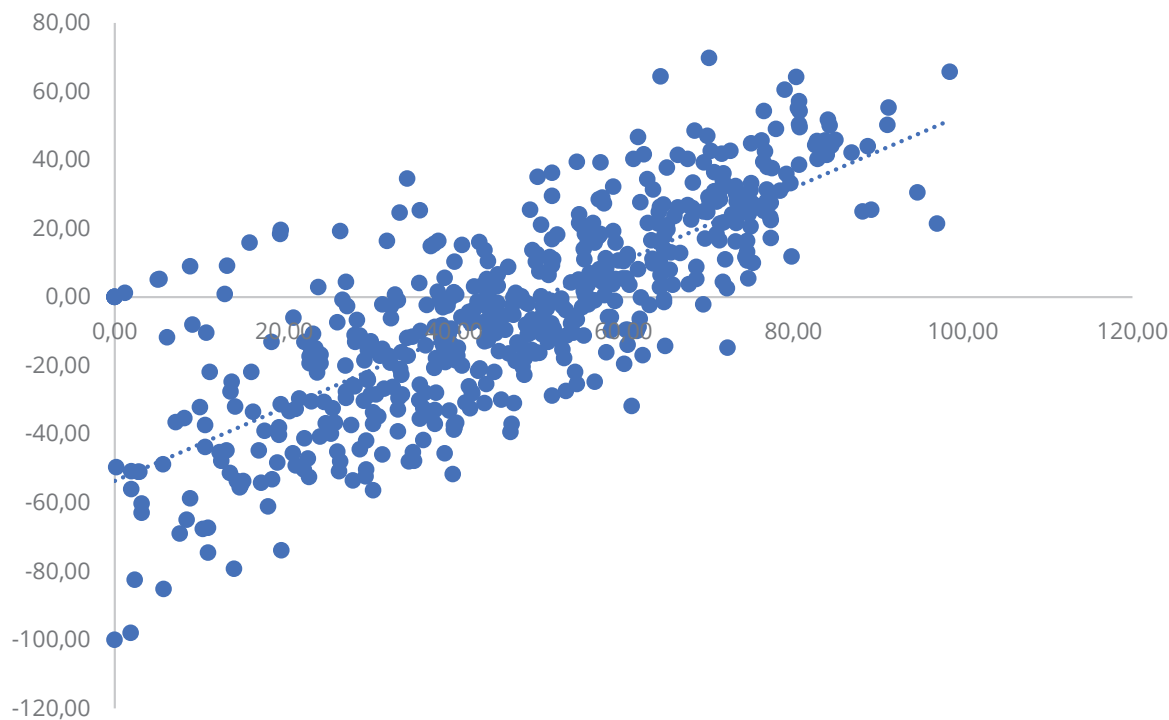
Tabel 5.19 Statistik Deskriptif Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Kabupaten	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Maksimum	100.00	97.00	69.78	75.63	97.00	69.78
Minimum	0.00	0.00	-100.00	0.32	42.40	6.90
Rata-rata	49.48	45.01	-3.85	40.17	71.77	31.60
St.Deviasi	19.47	22.08	30.23	13.45	9.89	12.91
Koefisien Variasi	39.35	49.06	-785.35	33.48	13.78	40.85

Kota	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Maksimum	92.76	98.50	65.64	69.39	98.50	65.64
Minimum	0.00	2.90	-53.77	0.00	62.40	4.34
Rata-rata	53.89	52.03	-1.86	40.43	75.50	35.07
St.Deviasi	16.12	19.52	28.35	17.16	8.68	17.12
Koefisien Variasi	29.92	37.52	-1,526.81	42.44	11.50	48.83

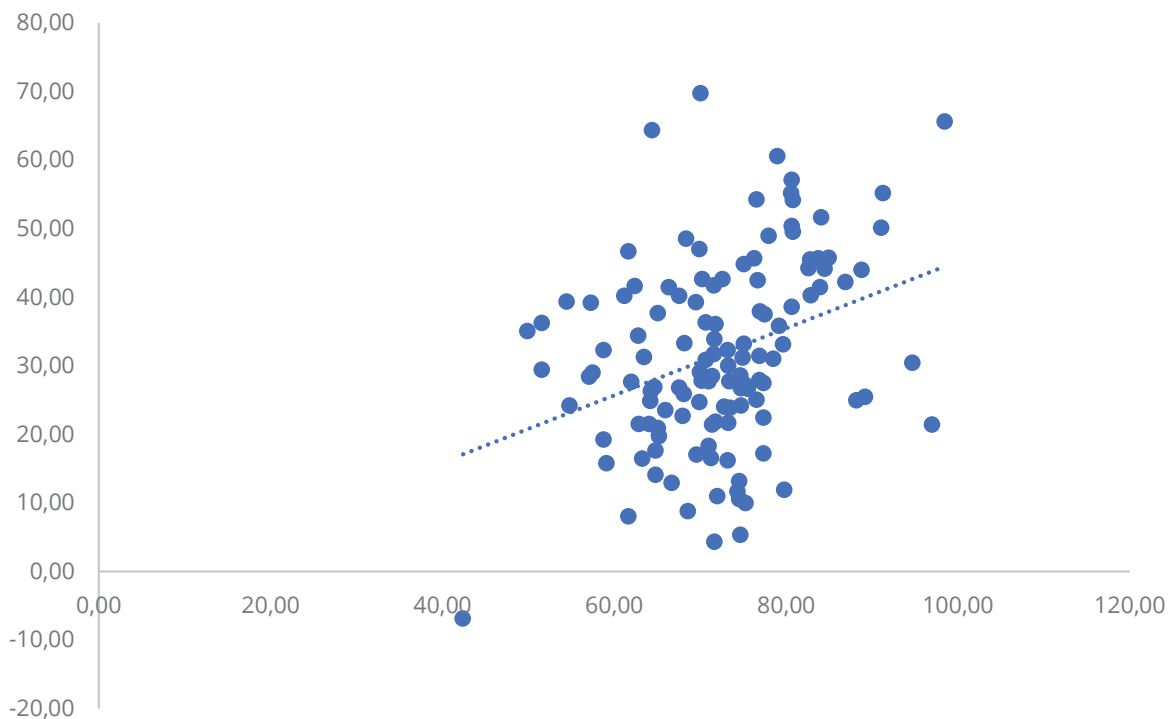
Provinsi	2013	2018	Delta	2013	2018	Delta
Maksimum	66.20	80.80	49.52	60.21	80.80	49.52
Minimum	31.28	19.60	-40.67	31.28	61.70	8.02
Rata-rata	51.85	48.65	-3.69	45.45	68.84	23.39
St.Deviasi	8.90	16.11	20.63	9.31	6.92	12.76
Koefisien Variasi	17.17	33.10	-558.48	20.48	10.06	54.55

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.18 Capaian Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.9 Capaian Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2013 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)

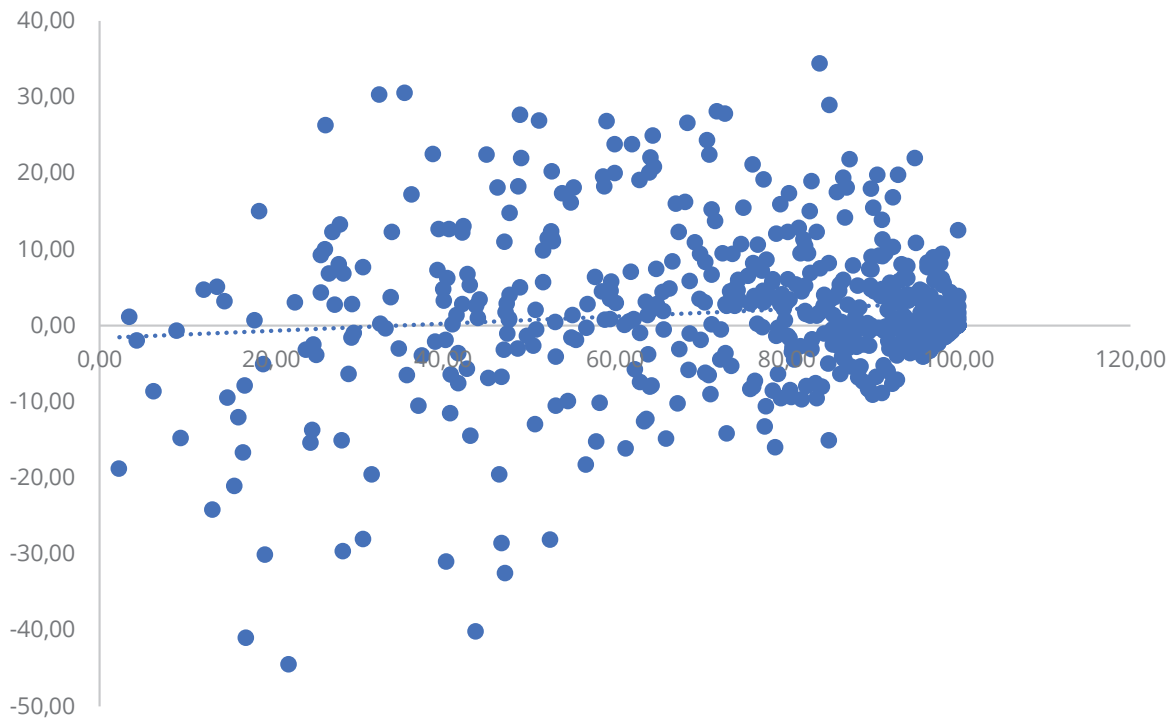
iii). Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan, pada tahun 2017, terdapat 38 daerah yang memiliki angka 100 persen, 31 daerah yang sudah 100 persen di 2018, dan yang tetap 100 persen dalam periode tahun 2017 dan 2018 ada 16 daerah. Secara umum, rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan meningkat, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami penurunan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai akhir tinggi pada tahun 2018 itu dikarenakan deltanya meningkat cukup baik dari kondisi 2017. Namun, berbeda dengan kondisi daerah penerima DID, dimana daerah yang tinggi nilai akhirnya tinggi pada tahun 2018 itu justru memiliki delta yang semakin kecil. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk memperbesar bobot delta dibandingkan dengan bobot untuk capaian nilai tahun terakhir. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2021, namun dengan upaya perbaikan untuk memperbesar bobot delta.

Tabel 5.20 Statistik Deskriptif Persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk DID Tahun 2020 (Persen)

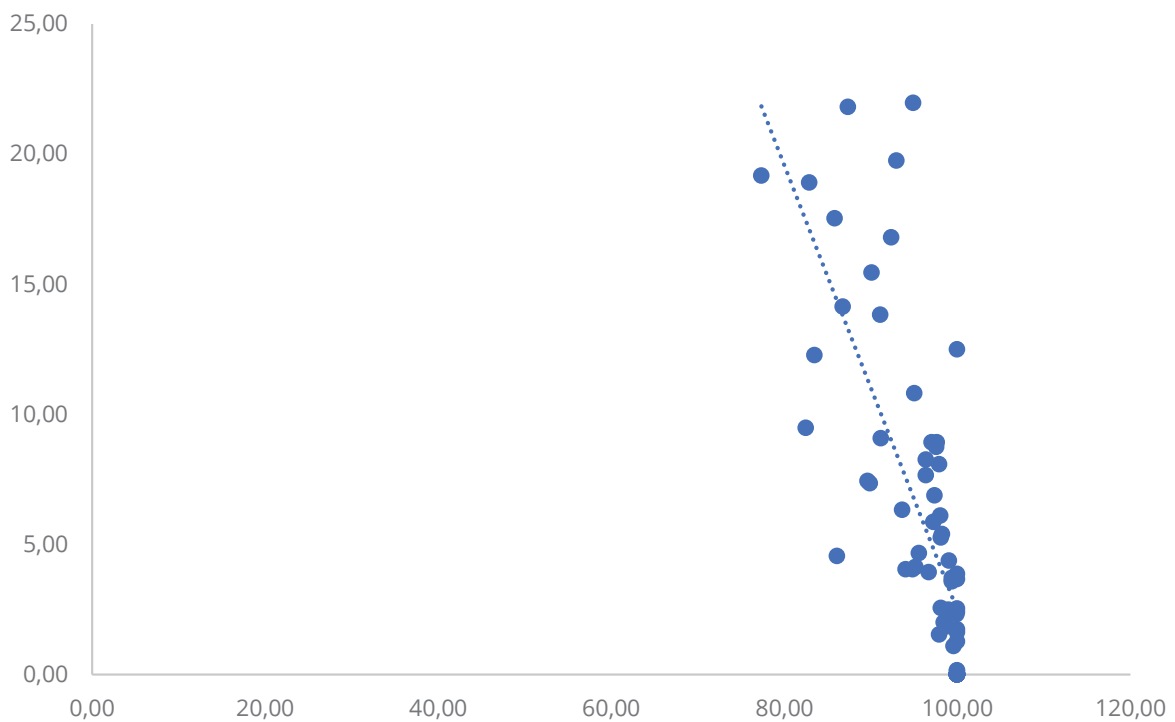
Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	100.00	100.00	34.37	100.00	100.00	21.98
Minimum	0.00	2.30	-44.50	58.18	77.34	0.00
Rata-rata	67.53	69.58	2.06	87.39	94.90	7.51
St.Deviasi	25.90	25.12	11.07	11.11	5.60	6.36
Koefisien Variasi	38.35	36.10	538.37	12.72	5.90	84.79
Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	100.00	100.00	28.90	100.00	100.00	8.08
Minimum	40.23	52.59	-18.30	89.80	97.88	0.00
Rata-rata	91.35	92.40	1.04	98.14	99.72	1.57
St.Deviasi	12.05	10.43	6.13	2.80	0.62	2.24
Koefisien Variasi	13.19	11.28	588.15	2.85	0.63	142.19
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	99.40	99.87	4.56	81.57	86.12	4.56
Minimum	30.21	33.91	-4.14	81.57	86.12	4.56
Rata-rata	74.63	76.18	1.56	81.57	86.12	4.56
St.Deviasi	17.88	17.25	2.20	0.00	0.00	0.00
Koefisien Variasi	23.96	22.64	141.13	0.00	0.00	0.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.20 Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.21 Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)

4. Kategori Kelompok Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

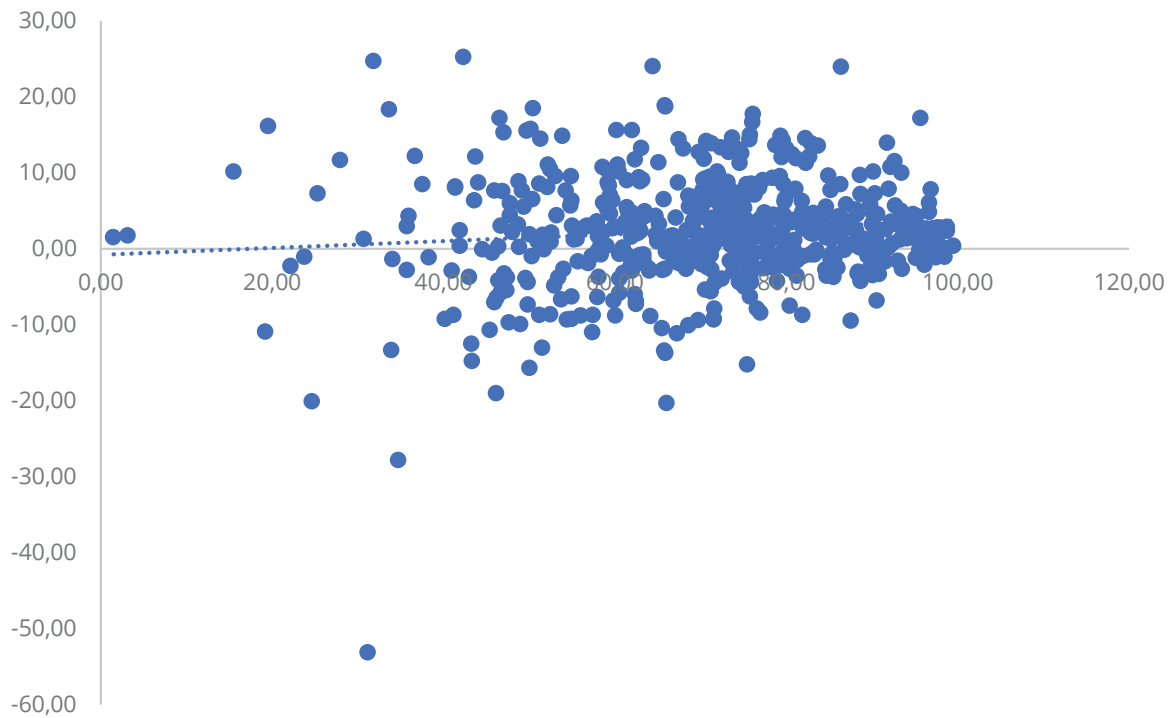
i). Kategori Sumber Air Minum Layak

Secara umum, rata-rata kondisi sumber air minum layak meningkat, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami penurunan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai akhir tinggi pada tahun 2018 itu dikarenakan deltanya meningkat cukup baik dari kondisi 2017. Namun, berbeda dengan kondisi daerah penerima DID, dimana daerah yang tinggi nilai akhirnya tinggi pada tahun 2018 itu justru memiliki delta yang semakin kecil. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk memperbesar bobot delta dibandingkan dengan bobot untuk capaian nilai tahun terakhir. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2021, namun dengan upaya perbaikan untuk memperbesar bobot delta.

Tabel 5.21 Statistik deskriptif Sumber Air Minum Layak untuk DID Tahun 2020 (Persen)

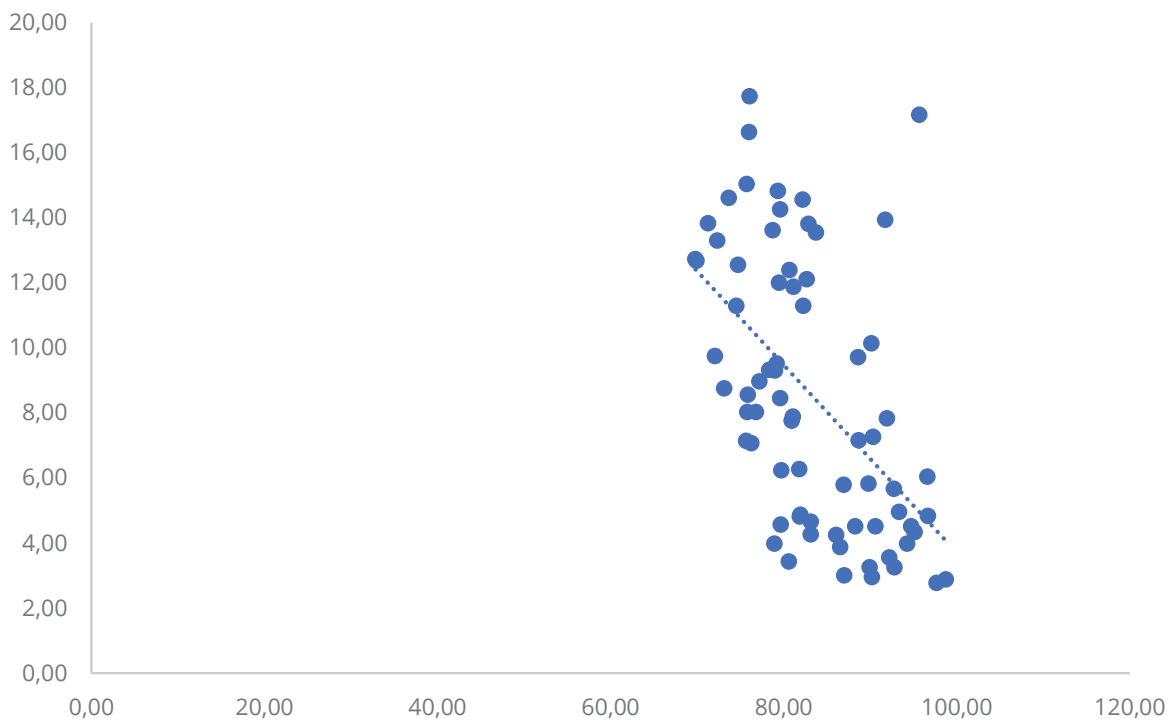
Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	98.61	98.79	25.24	94.92	97.69	17.74
Minimum	0.00	1.50	-53.12	57.09	69.81	2.77
Rata-rata	63.85	66.42	2.58	71.90	81.41	9.50
St.Deviasi	16.89	16.17	8.02	9.26	6.71	4.11
Koefisien Variasi	26.45	24.34	311.27	12.88	8.25	43.28
Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	99.52	99.50	14.38	95.89	98.76	9.71
Minimum	35.40	34.03	-4.43	78.93	88.64	2.87
Rata-rata	84.18	85.61	1.42	88.74	93.79	5.05
St.Deviasi	11.43	10.92	3.74	4.40	3.02	1.86
Koefisien Variasi	13.58	12.76	262.51	4.96	3.22	36.86
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	90.85	90.90	8.13	83.78	88.30	4.57
Minimum	43.83	49.37	-1.49	75.00	78.99	3.44
Rata-rata	70.52	72.95	2.44	77.77	81.90	4.13
St.Deviasi	9.68	9.25	2.36	4.13	4.32	0.53
Koefisien Variasi	13.73	12.68	97.01	5.31	5.27	12.84

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.22 Capaian Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.23 Capaian Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)

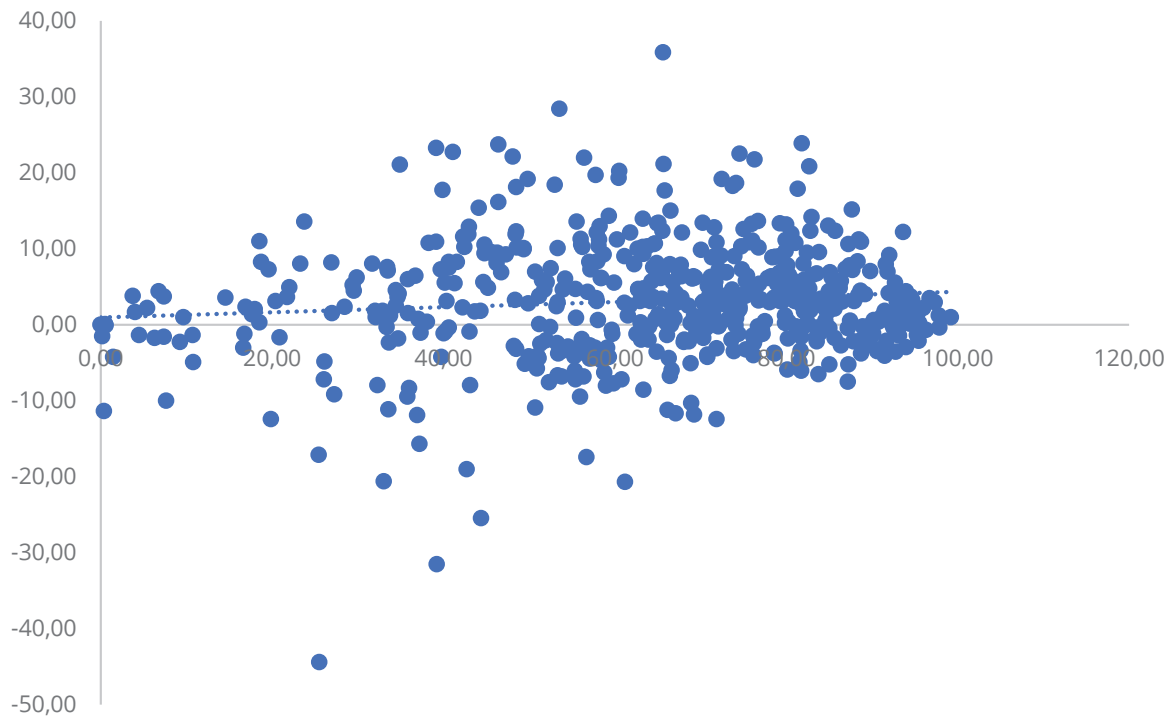
ii). Kategori Akses Sanitasi Layak

Sama seperti kondisi sumber air minum layak, kondisi akses sanitasi layak secara umum juga meningkat, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami penurunan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai akhir tinggi pada tahun 2018 itu dikarenakan deltanya meningkat cukup baik dari kondisi 2017. Namun, berbeda dengan kondisi daerah penerima DID, dimana daerah yang tinggi nilai akhirnya tinggi pada tahun 2018 itu justru memiliki delta yang semakin kecil. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk memperbesar bobot delta dibandingkan dengan bobot untuk capaian nilai tahun terakhir. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2021, namun dengan upaya perbaikan untuk memperbesar bobot delta.

Tabel 5.22 Statistik Deskriptif Akses Sanitasi Layak untuk DID Tahun 2020 (Persen)

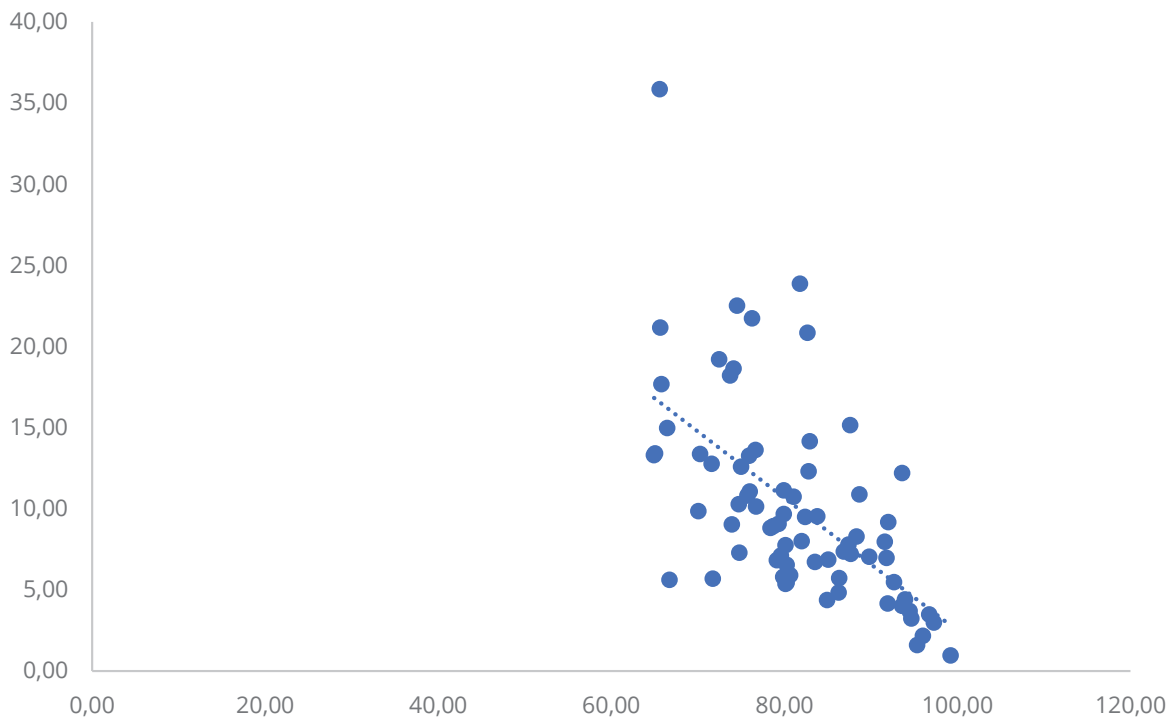
Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	96.94	97.81	35.84	84.89	93.66	35.84
Minimum	0.00	0.00	-44.47	29.79	64.94	4.37
Rata-rata	55.65	59.16	3.52	67.03	78.67	11.64
St.Deviasi	21.86	21.89	8.28	11.20	7.14	5.96
Koefisien Variasi	39.29	36.99	235.59	16.71	9.07	51.16
Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	98.31	99.21	22.13	98.26	99.21	7.96
Minimum	25.97	32.10	-20.71	82.81	89.83	0.95
Rata-rata	81.61	83.04	1.42	90.51	94.44	3.93
St.Deviasi	16.65	14.66	5.76	4.39	2.56	1.99
Koefisien Variasi	20.40	17.66	404.34	4.85	2.71	50.65
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	90.37	91.14	9.03	72.36	79.19	9.03
Minimum	32.56	33.75	-0.48	64.91	71.75	5.69
Rata-rata	65.41	68.35	2.94	67.78	74.96	7.19
St.Deviasi	13.65	12.94	2.59	4.01	3.82	1.70
Koefisien Variasi	20.87	18.94	87.96	5.92	5.10	23.63

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.24 Capaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.25 Capaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur ke depan, terkait dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sebaiknya diarahkan sesuai dengan indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dalam DID tahun 2021, selain kedua indikator di atas, perlu ditambahkan dengan Kategori Rumah Layak Huni, dimana perumahan dan permukiman juga merupakan salah satu jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Data indikator rumah layak huni berasal dari BPS, yang juga bersumber dari hasil survei Susenas yang dilaksanakan setiap tahun. Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi semua kriteria ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.

5. Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat

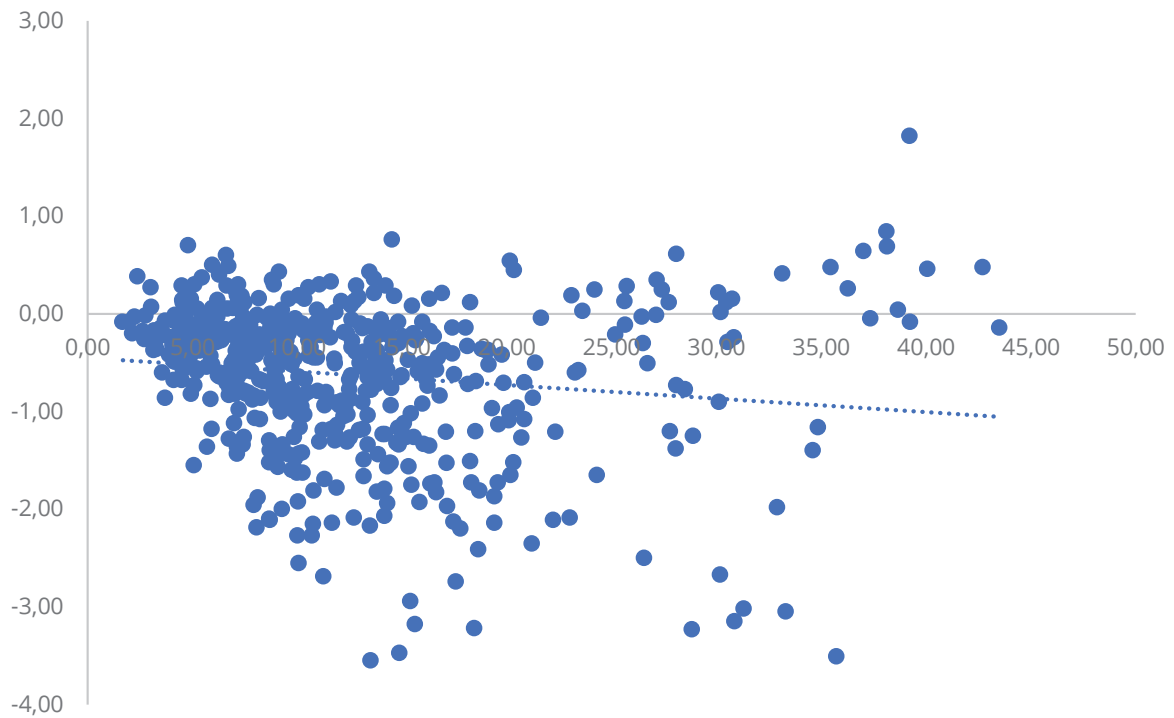
i). Kategori Persentase Penduduk Miskin

Secara umum, rata-rata persentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami peningkatan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020, tidak ada satupun daerah yang mengalami peningkatan. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai akhir rendah pada tahun 2018 itu memiliki deltanya penurunan yang cukup rendah juga dari kondisi 2017, dan sebaliknya. Hal tersebut sama dengan kondisi daerah penerima DID, dimana daerah yang nilai akhirnya rendah pada tahun 2018 itu justru memiliki delta penurunan yang semakin kecil, dan sebaliknya. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2021.

Tabel 5.23 Statistik Deskriptif Persentase Penduduk Miskin untuk DID Tahun 2020 (Persen)

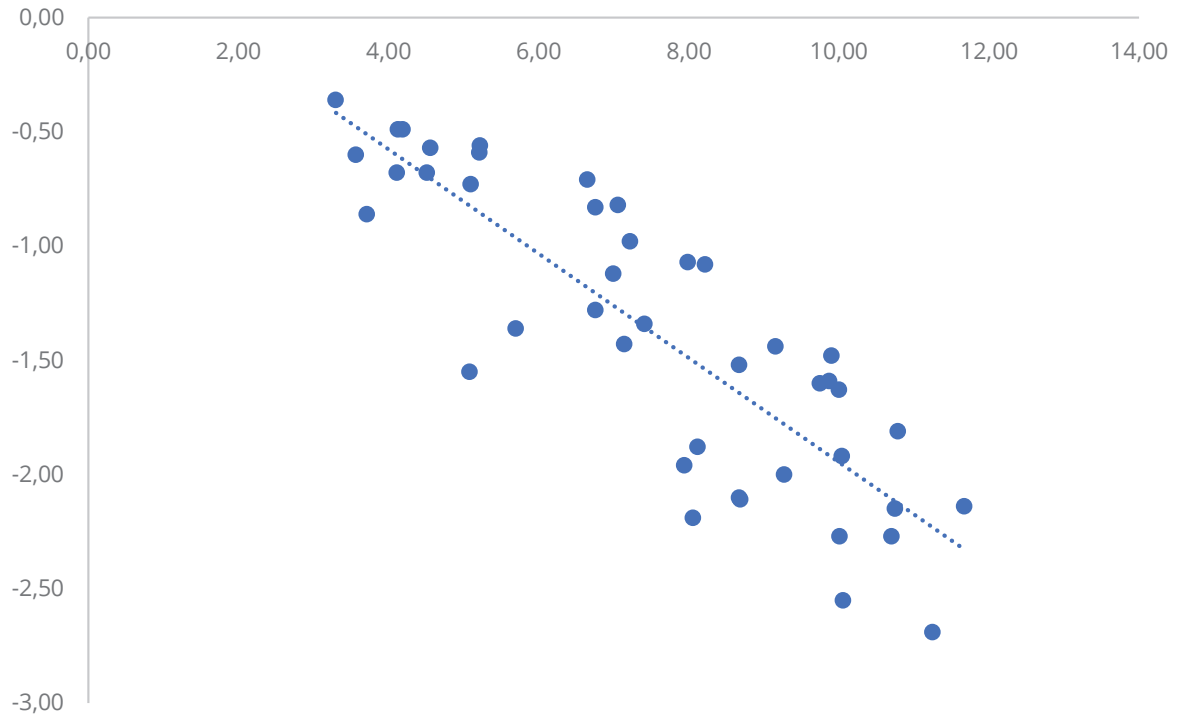
Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	43.63	43.49	1.82	13.94	11.67	-0.49
Minimum	2.06	1.98	-3.55	4.62	4.13	-2.69
Rata-rata	14.25	13.59	-0.66	9.58	8.09	-1.49
St.Deviasi	8.11	8.01	0.81	2.63	2.09	0.62
Koefisien Variasi	56.90	58.90	-122.41	27.40	25.83	-41.72
Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	24.00	23.42	0.50	7.06	5.70	-0.36
Minimum	1.76	1.68	-3.22	3.66	3.30	-1.36
Rata-rata	7.70	7.21	-0.49	4.82	4.10	-0.73
St.Deviasi	4.38	4.07	0.57	1.17	0.85	0.35
Koefisien Variasi	56.83	56.43	-117.06	24.31	20.83	-48.87
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	27.62	27.74	0.29	0.00	0.00	0.00
Minimum	3.77	3.57	-2.09	0.00	0.00	0.00
Rata-rata	11.32	10.81	-0.51	0.00	0.00	0.00
St.Deviasi	6.01	5.78	0.55	0.00	0.00	0.00
Koefisien Variasi	53.11	53.46	-107.46	0.00	0.00	0.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.26 Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Persen)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.27 Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Persen)

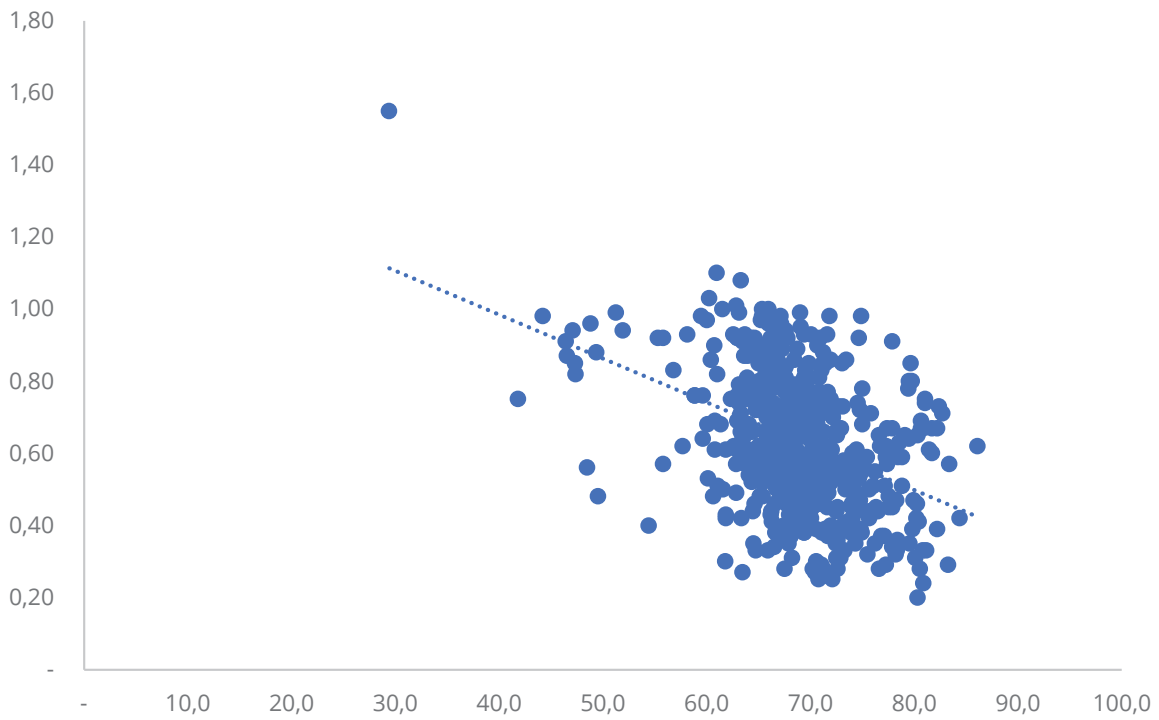
ii). Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kondisi IPM secara umum meningkat dengan stabil, tidak terlalu bervariasi, dan tidak ada yang menurun dari tahun 2017 ke 2018. Memang, terdapat beberapa daerah yang masih sangat rendah nilai IPM-nya. Secara umum, rata-rata IPM seluruh daerah masih dalam kategori sedang. Untuk daerah penerima DID pada tahun 2020 rata-ratanya merupakan IPM dalam kategori tinggi karena sudah di atas 70. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai IPM tinggi pada tahun 2018 itu delitanya justru lebih rendah dari kondisi 2017. Hal yang sama juga terjadi dengan kondisi daerah penerima DID, dimana daerah yang nilai IPM-nya tinggi pada tahun 2018 itu justru memiliki delta yang semakin kecil. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk memperbesar bobot delta dibandingkan dengan bobot untuk capaian nilai tahun terakhir. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2021, namun dengan upaya perbaikan untuk memperbesar bobot delta.

Tabel 5.24 Statistik Deskriptif IPM untuk DID Tahun 2020

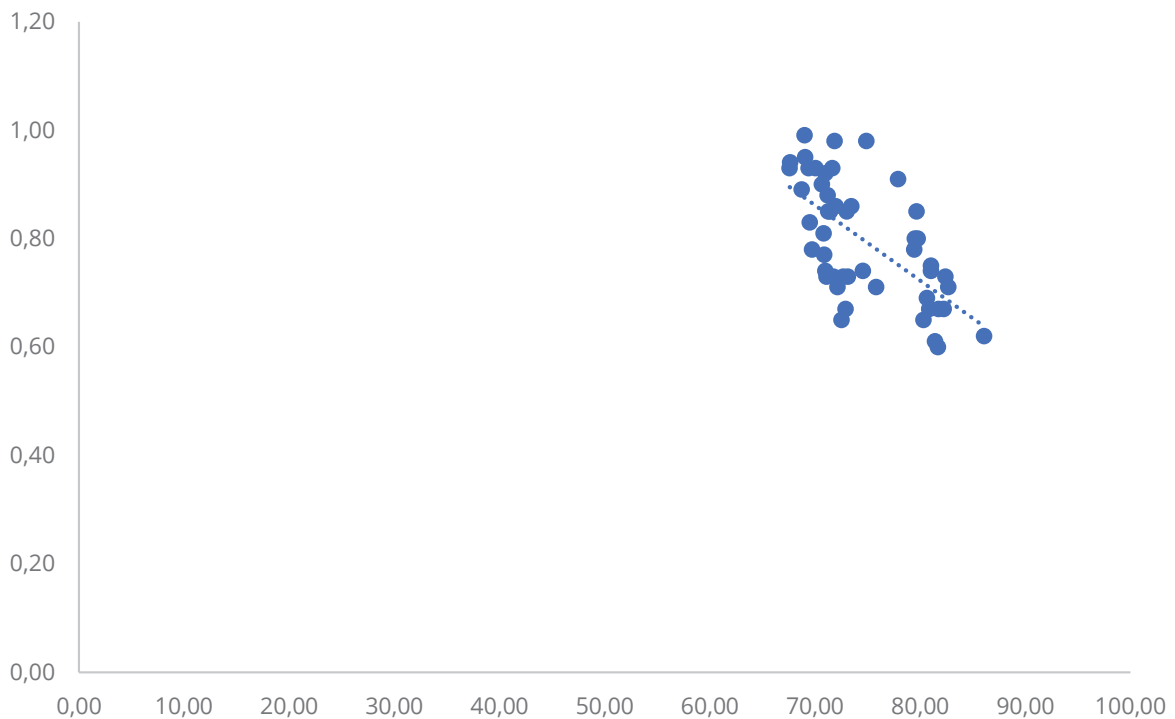
Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	82.85	83.42	1.55	78.70	79.50	0.99
Minimum	27.87	29.42	0.25	66.67	67.60	0.65
Rata-rata	66.27	66.92	0.66	70.86	71.70	0.84
St.Deviasi	5.60	5.52	0.19	2.70	2.66	0.10
Koefisien Variasi(%)	8.44	8.25	29.27	3.81	3.72	11.49
Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	85.49	86.11	0.96	85.49	86.11	0.91
Minimum	62.88	63.48	0.20	77.01	77.92	0.60
Rata-rata	76.33	76.86	0.53	80.61	81.32	0.71
St.Deviasi	4.09	4.07	0.17	1.87	1.80	0.09
Koefisien Variasi(%)	5.36	5.29	31.11	2.31	2.22	12.44
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	80.06	80.47	0.97	75.12	75.83	0.71
Minimum	59.09	60.06	0.39	75.12	75.83	0.71
Rata-rata	69.75	70.39	0.63	75.12	75.83	0.71
St.Deviasi	4.07	3.99	0.12	0.00	0.00	0.00
Koefisien Variasi(%)	5.84	5.67	18.99	0.00	0.00	0.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

**Gambar 5.28 Capaian IPM Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018
Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

**Gambar 5.29 Capaian IPM Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018
Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020**

Untuk kelompok kategori Kesejahteraan Masyarakat, sesuai dengan prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain kategori persentase penduduk miskin dan IPM, sebaiknya juga memasukkan kategori persentase atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam alokasi DID tahun 2021. Data untuk kategori tersebut tersedia di BPS untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diperoleh melalui Statistik Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) setiap tahunnya.

6. Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan

i). Kategori Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk DID tahun 2019 dan 2020, terdapat 22 daerah penerima DID untuk kategori penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari 10 kabupaten, 10 kota dan 2 provinsi. Dari 22 daerah penerima DID di tahun 2019, 13 daerah atau hampir 60 persen ternyata menerima DID kembali di tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, untuk DID tahun 2021 perlu adanya reformulasi dalam kategori penyelenggaraan pemerintahan, yang selama ini didasarkan atas skor yang terbaik dari nilai hasil Evaluasi LPPD dari Kementerian Dalam Negeri. Misalnya, formulanya dapat menggunakan kombinasi nilai tahun terakhir dan delta dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Hal ini tentunya perlu dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian teknis yang terkait.

Tabel 5.25 Daerah Penerima DID untuk Kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2020 (Rp. Juta)

No.	Daerah	2019	2020*	2020**
1	Kab. Banyuwangi	9,567.04	9,460.84	8,252.13
2	Kab. Bintan	-	9,311.41	8,121.79
3	Kab. Bone	9,486.73	9,341.29	8,147.86
4	Kab. Bulukumba	9,487.81	9,298.28	8,110.34
5	Kab. Gianyar	-	9,276.22	8,091.10
6	Kab. Karanganyar	9,638.13	9,464.47	8,255.30
7	Kab. Kudus	9,488.35	-	-
8	Kab. Kuningan	9,489.98	9,442.40	8,236.05
9	Kab. Malang	9,552.39	-	-
10	Kab. Pasuruan	9,530.95	9,490.16	8,277.71
11	Kab. Pohuwato	-	9,265.88	8,082.08
12	Kab. Sidoarjo	9,748.02	9,526.47	8,309.38
13	Kab. Tulungagung	9,746.94	-	-
14	Kota Banjar	-	9,225.94	8,047.25

15	Kota Blitar	9,392.57	-	-
16	Kota Cimahi	-	9,293.53	8,106.20
17	Kota Denpasar	-	9,222.87	8,044.57
18	Kota Gorontalo	9,278.61	9,535.97	8,317.66
19	Kota Madiun	-	9,232.65	8,053.09
20	Kota Makassar	9,543.98	9,609.15	8,381.49
21	Kota Malang	9,702.98	-	-
22	Kota Pare-pare	9,205.35	-	-
23	Kota Pekanbaru	-	9,353.58	8,158.58
24	Kota Samarinda	9,224.07	-	-
25	Kota Semarang	9,263.96	9,433.46	8,228.26
26	Kota Surabaya	9,527.97	9,225.10	8,046.51
27	Kota Tangerang	9,230.86	9,304.71	8,115.95
28	Provinsi Jawa Barat	8,817.34	-	-
29	Provinsi Jawa Tengah	8,477.90	-	-
30	Provinsi Jawa Timur	9,025.46	9,222.87	8,044.57
31	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	8,951.11	7,807.52

Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

ii). Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah

Setiap tahun dalam DID tahun 2019 dan 2020, terdapat 8 pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan kategori perencanaan pembangunan daerah (PPD), yaitu 3 untuk kabupaten, 3 untuk kota dan 2 untuk provinsi. Dari data penerima DID di kedua tahun tersebut, hanya terdapat 2 pemerintah daerah (25 persen) yang mendapatkan alokasi DID di kedua tahun tersebut. Dengan melihat petunjuk penilaian pada lomba PPD yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan juga data penerima DID di tahun 2019 dan 2020, kategori PPD ini tetap layak dipertahankan dalam alokasi DID tahun 2021.

Tabel 5.26 Daerah Penerima DID untuk Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020 (Rp. Juta)

No.	Daerah	2019	2020*	2020**
1	Kab. Banyuwangi	9,362.15	-	-
2	Kab. Lombok Utara	9,424.90	-	-
3	Kab. Tabanan	-	8,991.95	7,843.15
4	Kab. Tanah Datar	-	9,324.54	8,133.25
5	Kab. Tegal	9,864.14	-	-

6	Kab. Termanggung	-	9,277.03	8,091.81
7	Kota Denpasar	-	9,490.84	8,278.30
8	Kota Makassar	-	9,241.39	8,060.72
9	Kota Palembang	9,236.65	-	-
10	Kota Palu	9,399.80	-	-
11	Kota Semarang	-	9,965.98	8,692.73
12	Kota Surakarta	9,186.45	-	-
13	Provinsi Bali	8,985.65	-	-
14	Provinsi Jawa Tengah	-	9,562.11	8,340.47
15	Provinsi Jawa Timur	9,926.89	9,110.73	7,946.75
16	Provinsi Sumatera Selatan	9,060.95	9,098.85	7,936.39

Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

iii). Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kategori SAKIP diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria utama dan memiliki nilai SAKIP 70 ke atas atau nilai B. Nilai SAKIP cenderung meningkat, sehingga apabila daerah tersebut sudah memiliki nilai SAKIP yang besarnya 70 ke atas dan daerah tersebut memenuhi kriteria utama, maka daerah tersebut akan mendapatkan alokasi DID untuk kategori ini. Dari 41 penerima DID di kategori ini pada tahun 2019, terdapat 38 daerah (93 persennya) yang kembali mendapatkan alokasi DID pada tahun 2020 (3 daerah lainnya juga seharusnya mendapatkan alokasi DID, namun tidak memenuhi kriteria utama).

Dari hasil korelasi yang dijelaskan sebelumnya antara penerimaan DID tahun 2019 dan 2020 untuk kategori ini juga terbilang tinggi, sehingga harus direformulasi untuk DID tahun 2021. Oleh karena itu, untuk DID tahun 2021, kategori SAKIP tetap bisa masuk dalam kategori kinerja, namun perlu direformulasi dalam penentuan penerima alokasi DID-nya. Salah satu caranya adalah dengan mengkombinasikan nilai capaian akhir dan delta dari nilai SAKIP.

Tabel 5.27 Daerah Penerima DID untuk Kategori SAKIP dan Nilai SAKIP Tahun 2019-2020 (Rp. Juta)

No.	Daerah	2019	2020*	2020**	Nilai SAKIP
1	Kab. Badung	9,886.83	9,814.99	8,561.04	77.85
2	Kab. Bandung	-	8,844.21	7,714.28	70.15
3	Kab. Banggai	8,931.45	-	-	73.45
4	Kab. Bangka Tengah	-	8,837.91	7,708.79	70.10
5	Kab. Bantul	9,934.02	10,261.30	8,950.33	81.39
6	Kab. Banyumas	-	8,945.07	7,802.26	70.95

No.	Daerah	2019	2020*	2020**	Nilai SAKIP
7	Kab. Banyuwangi	10,369.79	10,359.64	9,036.10	82.17
8	Kab. Batang Hari	-	8,837.91	7,708.79	70.10
9	Kab. Bondowoso	8,986.71	8,829.08	7,701.09	70.03
10	Kab. Bone Bolango	8,928.05	8,898.42	7,761.57	70.58
11	Kab. Cilacap	-	8,902.21	7,764.87	70.61
12	Kab. Garut	-	8,874.47	7,740.68	70.39
13	Kab. Gresik	9,140.58	10,101.19	8,810.67	80.12
14	Kab. Gunung Kidul	-	8,904.73	7,767.07	70.63
15	Kab. Hulu Sungai Selatan	8,929.64	9,478.37	8,267.43	75.18
16	Kab. Karimun	9,189.17	9,136.71	7,969.41	74.03
17	Kab. Kulon Progo	9,633.59	10,184.40	8,883.25	80.78
18	Kab. Lamongan	9,049.85	10,091.10	8,801.87	80.04
19	Kab. Lebak	8,936.36	9,348.51	8,154.16	74.15
20	Kab. Madiun	-	8,826.56	7,698.89	70.01
21	Kab. Malang	8,992.13	8,914.81	7,775.87	70.71
22	Kab. Mojokerto	-	8,936.25	7,794.56	70.88
23	Kab. Muara Enim	8,929.24	9,464.50	8,255.33	75.07
24	Kab. Natuna	8,929.84	9,333.39	8,140.96	72.47
25	Kab. Ngawi	8,931.63	10,088.58	8,799.67	80.02
26	Kab. Pandeglang	-	8,844.21	7,714.28	70.15
27	Kab. Pasuruan	9,441.27	9,165.70	7,994.70	72.70
28	Kab. Probolinggo	8,932.50	8,840.43	7,710.99	70.12
29	Kab. Serang	8,928.36	9,397.68	8,197.05	74.54
30	Kab. Sidoarjo	9,142.14	10,091.10	8,801.87	80.04
31	Kab. Situbondo	-	8,936.25	7,794.56	70.88
32	Kab. Slemen	9,954.90	10,302.91	8,986.62	81.72
33	Kab. Trenggalek	-	8,943.81	7,801.16	70.94
34	Kab. Tulungagung	9,046.66	-	-	72.83
35	Kab. Wonogiri	-	8,879.51	7,745.08	70.43
36	Kota Bandung	-	10,092.36	8,802.97	80.05
37	Kota Banjarmasin	-	8,830.34	7,702.19	70.04
38	Kota Blitar	9,036.65	9,061.06	7,903.43	71.87
39	Kota Bukit Tinggi	-	8,874.47	7,740.68	70.39
40	Kota Denpasar	-	8,834.13	7,705.49	70.07
41	Kota Kediri	-	8,903.47	7,765.97	70.62

No.	Daerah	2019	2020*	2020**	Nilai SAKIP
42	Kota Lubuk Linggau	-	9,015.67	7,863.84	71.51
43	Kota Malang	9,049.52	8,839.17	7,709.89	70.11
44	Kota Manado	8,975.29	9,085.02	7,924.32	72.06
45	Kota Padang	8,985.75	9,238.83	8,058.49	73.28
46	Kota Payakumbuh	8,960.24	9,034.59	7,880.34	71.66
47	Kota Pekanbaru	-	8,936.25	7,794.56	70.88
48	Kota Pontianak	8,929.56	8,956.42	7,812.16	71.04
49	Kota Probolinggo	-	8,887.08	7,751.67	70.49
50	Kota Sukabumi	9,500.54	9,434.25	8,228.94	74.83
51	Kota Surabaya	-	8,829.08	7,701.09	70.03
52	Kota Tanjung Pinang	9,869.53	9,783.48	8,533.55	77.60
53	Kota Tasikmalaya	-	8,851.78	7,720.88	70.21
54	Kota Yogyakarta	9,175.77	9,456.94	8,248.73	75.01
55	Provinsi Bali	9,785.36	9,714.13	8,473.07	77.05
56	Provinsi DI Yogyakarta	10,740.56	11,359.42	9,908.15	90.10
57	Provinsi DKI Jakarta	-	8,955.16	7,811.06	71.03
58	Provinsi Jawa Barat	10,324.30	-	-	80.30
59	Provinsi Jawa Tengah	9,684.18	10,108.75	8,817.27	80.18
60	Provinsi Jawa Timur	10,356.70	10,300.39	8,984.42	81.70
61	Provinsi Kalimantan Selatan	9,856.74	10,282.74	8,969.02	81.56
62	Provinsi Kalimantan Timur	9,883.39	9,335.91	8,143.16	74.05
63	Provinsi Kepulauan Riau	8,943.67	9,137.97	7,970.51	72.48
64	Provinsi Sumatera Barat	9,299.52	9,425.42	8,221.24	74.76
65	Provinsi Sumatera Selatan	10,203.66	9,923.42	8,655.61	78.71

Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

iv). Kategori Inovasi Pelayanan Publik

Untuk kategori inovasi pelayanan publik, penilaiannya dilakukan oleh Kemenpan-RB melalui lomba inovasi pelayanan publik, dimana penerima DID untuk kategori ini adalah yang masuk Top 45 dan memenuhi kriteria utama. Dengan melihat proses dan sistem penilaiannya yang dilakukan rutin setiap tahun serta daftar daerah penerima DID untuk kategori ini yang tidak memiliki korelasi tinggi antara tahun 2019 dan 2020, kategori inovasi pelayanan publik tetap dapat dipertahankan untuk alokasi DID tahun 2021.

Tabel 5.28 Daerah Penerima DID untuk Kategori Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019-2020 (Rp. Juta)

No.	Daerah	2019	2020*	2020**
1	Kab. Badung	-	8,700.40	7,588.85
2	Kab. Bangka	-	8,156.62	7,114.54
3	Kab. Banjarnegara	-	7,612.85	6,640.24
4	Kab. Bantul	-	8,156.62	7,114.54
5	Kab. Banyumas	-	8,700.40	7,588.85
6	Kab. Banyuwangi	9,019.92	8,700.40	7,588.85
7	Kab. Bima	-	7,612.85	6,640.24
8	Kab. Bogor	-	7,612.85	6,640.24
9	Kab. Cilacap	-	7,612.85	6,640.24
10	Kab. Grobogan	-	8,156.62	7,114.54
11	Kab. Gunung Kidul	-	8,156.62	7,114.54
12	Kab. Klungkung	9,664.20	-	-
13	Kab. Luwu Utara	9,019.92	-	-
14	Kab. Magelang	-	7,612.85	6,640.24
15	Kab. Malang	9,664.20	-	-
16	Kab. Merauke	9,019.92	-	-
17	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	9,019.92	-	-
18	Kab. Sumbawa	9,019.92	-	-
19	Kab. Teluk Bintuni	9,019.92	-	-
20	Kab. Trenggalek	9,019.92	-	-
21	Kab. Tulungagung	9,664.20	-	-
22	Kab. Wonosobo	-	8,156.62	7,114.54
23	Kota Ambon	-	7,612.85	6,640.24
24	Kota Bogor	9,019.92	-	-
25	Kota Cilegon	-	8,156.62	7,114.54
26	Kota Cimahi	9,019.92	7,612.85	6,640.24

No.	Daerah	2019	2020*	2020**
27	Kota Denpasar	-	8,156.62	7,114.54
28	Kota Madiun	9,019.92	-	-
29	Kota Makassar	-	8,374.13	7,304.26
30	Kota Malang	-	7,612.85	6,640.24
31	Kota Manado	-	7,612.85	6,640.24
32	Kota Padang	9,019.92	-	-
33	Kota Palembang	-	7,612.85	6,640.24
34	Kota Parepare	9,019.92	-	-
35	Kota Surabaya	10,308.48	-	-
36	Kota Tangerang	-	8,156.62	7,114.54
37	Provinsi DI Yogyakarta	-	8,156.62	7,114.54
38	Provinsi DKI Jakarta	11,597.05	8,374.13	7,304.26
39	Provinsi Jawa Tengah	9,664.20	8,156.62	7,114.54
40	Provinsi Jawa Timur	10,566.20	-	-
41	Provinsi Kalimantan Selatan	9,019.92	-	-
42	Provinsi Kalimantan Utara	-	7,612.85	6,640.24
43	Provinsi Sulawesi Selatan	9,019.92	-	-
44	Provinsi Sumatera Barat	9,019.92	-	-

Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

v). Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah

Kategori inovasi pemerintahan daerah merupakan kategori yang baru pertama kali digunakan dalam DID tahun 2020. Penilaian kategori inovasi pemerintahan daerah dilakukan melalui Indeks Inovasi Daerah, dimana untuk DID tahun 2020 menggunakan Indeks Inovasi Daerah tahun 2018. Dari informasi media, Indeks Inovasi Daerah tahun 2019 sudah tersedia di Badan Litbang Kemendagri, dan beberapa daerah sudah mengetahui informasinya, misal Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten dengan Indeks Inovasi tertinggi diantara kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri No. 002.6 -5315 Tahun 2019 terkait dengan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2019.

Tabel 5.29 Daerah Penerima DID untuk Kategori Inovasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Rp. Juta) dan Nilai Inovasi Tahun 2018

No.	Daerah	2020*	2020**	Indeks Inovasi 2018
1	Kab. Agam	3,559.60	3,104.83	6,816
2	Kab. Banggai	-	-	11,821
3	Kab. Banyuwangi	9,023.30	7,870.49	17,278
4	Kab. Belu	1,282.63	1,118.76	2,456
5	Kab. Gresik	5,074.10	4,425.84	9,716
6	Kab. Klungkung	3,824.38	3,335.78	7,323
7	Kab. Kulon Progo	4,938.32	4,307.41	9,456
8	Kab. Musi Rawas	2,291.60	1,998.83	4,388
9	Kab. Pacitan	3,432.18	2,993.68	6,572
10	Kab. Padang Pariaman	-	-	15,457
11	Kab. Pelalawan	2,072.26	1,807.51	3,968
12	Kab. Pulau Morotai	2,199.68	1,918.65	4,212
13	Kab. Sidoarjo	3,699.56	3,226.91	7,084
14	Kab. Situbondo	2,230.50	1,945.53	4,271
15	Kota Bandung	8,281.19	7,223.20	15,857
16	Kota Bogor	4,580.59	3,995.38	8,771
17	Kota Bontang	5,020.31	4,378.92	9,613
18	Kota Magelang	4,658.92	4,063.70	8,921
19	Kota Makassar	6,798.03	5,929.52	13,017
20	Kota Malang	4,770.16	4,160.73	9,134
21	Kota Mataram	3,598.25	3,138.54	6,890
22	Kota Solok	4,584.76	3,999.02	8,779
23	Kota Surabaya	4,677.72	4,080.10	8,957

No.	Daerah	2020*	2020**	Indeks Inovasi 2018
24	Kota Surakarta	3,182.02	2,775.49	6,093
25	Provinsi Bali	6,274.74	5,473.09	12,015
26	Provinsi DKI Jakarta	6,376.05	5,561.46	12,209
27	Provinsi Jawa Barat	-	-	24,740
28	Provinsi Jawa Timur	7,526.03	6,564.51	14,411
29	Provinsi Sumatera Barat	7,468.06	6,513.95	14,300

Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2019
SK Mendagri No. 002.6-5315 Tahun 2019

PROVINSI TERINOVATIF	KOTA TERINOVATIF	KABUPATEN TERINOVATIF
1. Jawa Tengah	1. Denpasar	1. Banyuwangi
2. Jawa Barat	2. Bogor	2. Kulon Progo
3. Sumatera Barat	3. Bontang	3. Malang
4. DKI Jakarta	4. Malang	4. Situbondo
5. Riau	5. Cimahi	5. Banggai
	6. Bandung	6. Agam
	7. Makassar	7. Musi Rawas
	8. Magelang	8. Hulu Sungai Selatan
	9. Surakarta	9. Bogor
	10. Surabaya	10. Parang Pariaman



KAB/KOTA PERBATASAN TERINOVATIF

1. Pelelawan
2. Bengkalis
3. Morotai

KAB/KOTA TERTINGGAL TERINOVATIF

1. Sigi
2. Nabire
3. Belu

Akan mendapat Dana Insentif Inovais Daerah pada tahun 2021

Apabila memenuhi ketentuan/kriteria yang akan diatur sesuai peraturan yang berlaku

Sumber: Balitbang Kemendagri, 2019

Gambar 5.30 Daerah Calon Penerima Alokasi DID Tahun 2021 untuk Kategori Inovasi Pemerintah Daerah

Secara konsep, kategori inovasi pemerintahan daerah dapat dipertahankan dalam alokasi DID tahun 2010, Namun, bila melihat nama-nama daerahnya untuk penerima DID tahun 2020 dan daerah calon penerima DID tahun 2021, nama-nama daerah tersebut hampir sama. Terkait dengan hal tersebut, untuk alokasi DID tahun 2021, perlu dilihat kembali kemungkinannya reformulasinya agar daerah penerimanya sebagian besar tidak sama seperti tahun sebelumnya. Perubahan formulasi tersebut dapat dilakukan misalnya dengan metode kombinasi capaian nilai terakhir dan delta-nya, agar dapat mencerminkan kinerja daerah yang sesungguhnya.

7. Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah

Penilaian kategori pengelolaan sampah untuk DID dilakukan melalui kerangka penilaian berupa: (i) peraturan pengurangan dan penanganan sampah dengan indikator berupa ketersediaan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah, ketersediaan peraturan bupati/walikota tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah, ketersediaan peraturan tentang pembatasan sampah, dan penerapan peraturan bupati/walikota tentang pembatasan sampah; dan (ii) pengurangan dan penanganan sampah melalui implementasi jakstrada pengelolaan sampah (penerapan kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah anorganik), dengan indikator berupa ketersediaan bank sampah unit, ketersediaan bank sampah induk, persentase Jumlah Sampah yang dikelola di Bank Sampah Induk, dan ketersediaan TPS 3R.

Dari 14 daerah penerima alokasi DID untuk kategori pengelolaan sampah pada tahun 2020, 6 daerahnya merupakan daerah penerima alokasi DID pada tahun 2019. Sehingga, daerah yang mendapatkan alokasi DID pada tahun sebelumnya memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan alokasi DID pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dan koreksi terkait dengan formulasinya ke depan, khususnya untuk alokasi DID tahun 2021.

Tabel 5.30 Daerah Penerima DID untuk Kategori Pengelolaan Sampah Tahun 2019 – 2020 (Rp. Juta)

No.	Daerah	2019	2020*	2020**
1	Kab. Badung	-	7,693.23	6,710.35
2	Kota Balikpapan	11,056.95	8,892.98	7,756.82
3	Kota Bandung	-	7,378.47	6,435.80
4	Kota Banjarbaru	-	6,972.98	6,082.11
5	Kota Banjarmasin	9,338.89	8,794.91	7,671.28
6	Kota Bogor	8,970.73	5,753.72	5,018.63
7	Kota Bontang	-	5,554.68	4,845.02
8	Kota Cimahi	9,326.61	-	-
9	Kota Denpasar	-	4,897.38	4,271.69
10	Kota Depok	9,117.99	5,554.68	4,845.02
11	Kota Jambi	-	6,601.74	5,758.31
12	Kota Jayapura	-	7,406.24	6,460.03
13	Kota Makassar	8,897.10	-	-
14	Kota Malang	9,657.95	5,091.79	4,441.27
15	Kota Padang	9,117.99	-	-

No.	Daerah	2019	2020*	2020**
16	Kota Surabaya	9,326.61	8,332.02	7,267.53
17	Provinsi Bali	-	6,480.46	5,652.52
18	Provinsi DKI Jakarta	9,019.82	-	-

Keterangan: *) Semula; **) Setelah Penyesuaian

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

Untuk DID tahun 2021, apabila memang nantinya dapat tersedia data dasar yang jelas dan objektif untuk menentukan daerah penerima alokasi DID untuk kategori pengelolaan sampah, sebaiknya kategori pengelolaan sampah tetap dapat dipertahankan. Namun, apabila tidak tersedia data dasar sebagaimana dimaksudkan, maka kategori pengelolaan sampah sebaiknya dihilangkan. Tentunya hal tersebut perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kementerian teknis yang terkait.

8. Kelompok Kategori Peningkatan Investasi

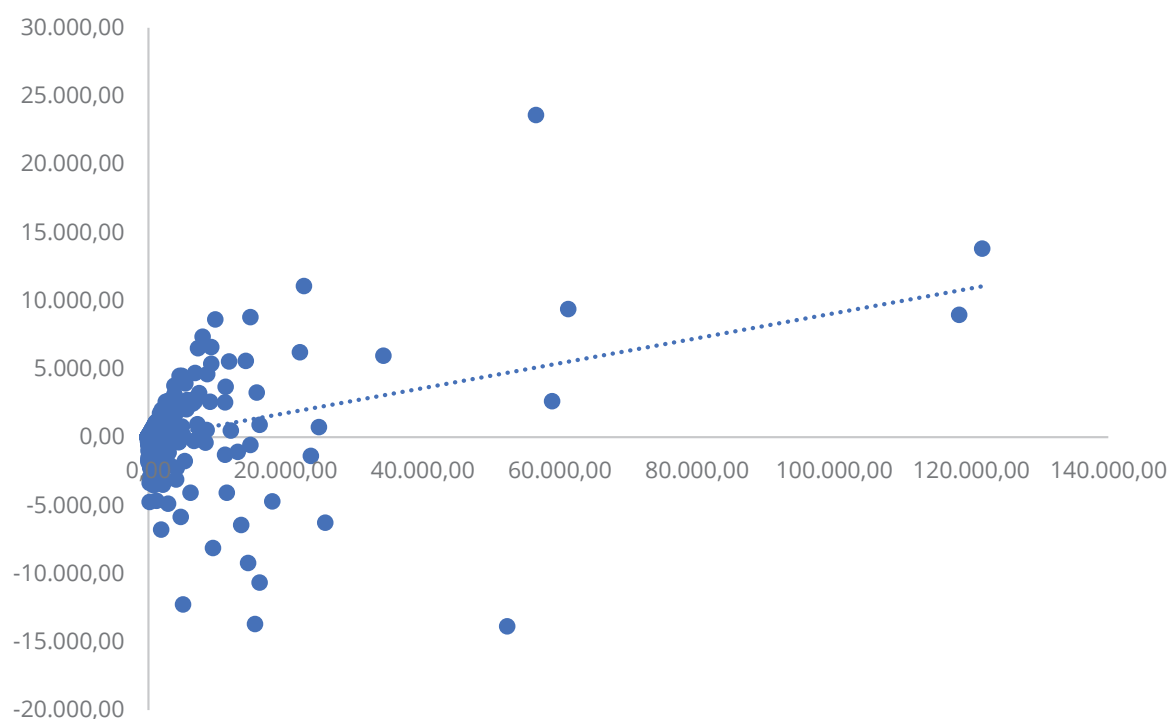
Kondisi investasi secara umum meningkat, namun terdapat juga daerah yang mengalami penurunan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai investasi tinggi pada tahun 2018 dikarenakan deltanya meningkat cukup baik dari kondisi 2017. Hal yang sama juga terjadi untuk daerah penerima DID tahun 2020. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2021.

Tabel 5.31 Statistik Deskriptif Peningkatan Investasi untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Kabupaten	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	32,923.69	56,523.45	23,599.76	32,923.69	56,523.45	23,599.76
Minimum	0.00	0.00	-13,697.85	0.03	428.38	109.05
Rata-rata	1,180.03	1,221.85	41.82	1,700.23	3,633.05	1,932.81
St.Deviasi	3,304.53	3,641.23	2,118.48	4,197.06	6,912.00	3,071.01
Koefisien Variasi (%)	280.04	298.01	5,065.92	246.85	190.25	158.89
Kota	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	15,517.01	14,935.86	5,351.45	8,696.83	11,331.90	5,351.45
Minimum	0.00	0.00	-4,895.88	0.00	512.08	325.07
Rata-rata	1,062.68	1,298.48	235.79	2,169.67	3,880.48	1,710.81
St.Deviasi	2,399.83	2,660.83	1,189.32	2,753.88	3,596.10	1,486.19

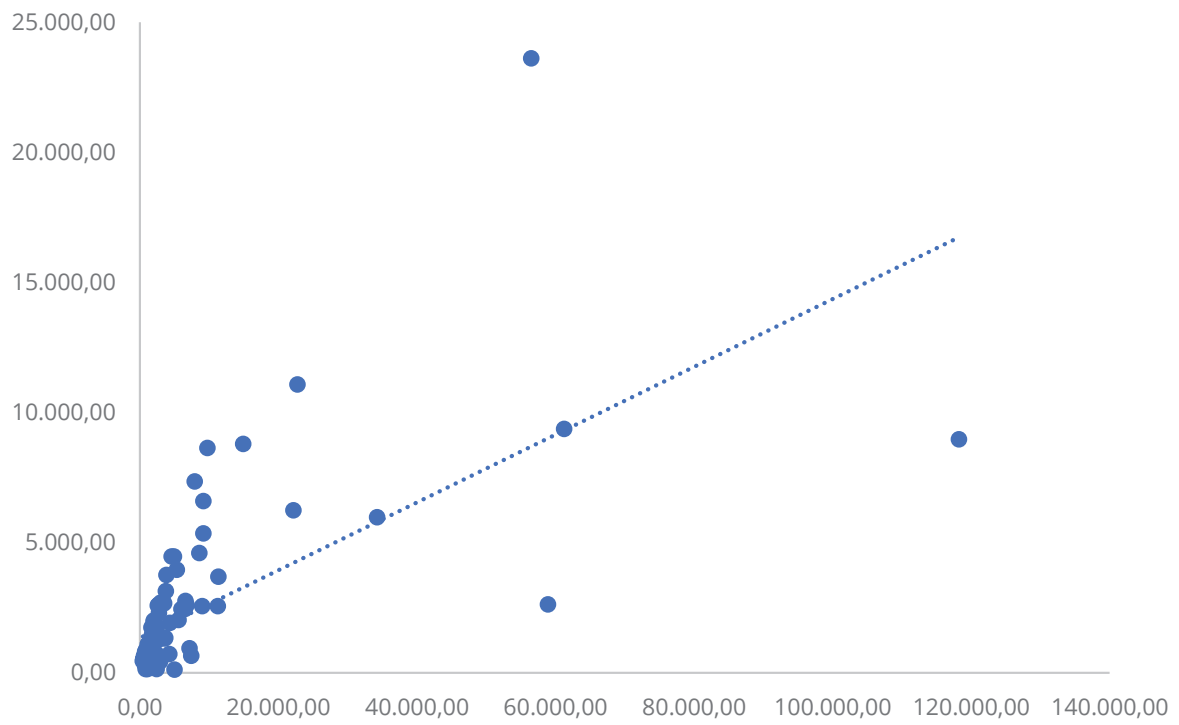
Koefisien Variasi (%)	225.83	204.92	504.39	126.93	92.67	86.87
Provinsi	2017	2018	Delta	2017	2018	Delta
Maksimum	109,336.18	121,678.55	13,811.81	109,336.18	118,300.65	11,060.44
Minimum	787.46	1,126.92	-13,880.06	11,697.44	22,757.88	2,604.77
Rata-rata	20,525.80	21,944.86	1,419.06	51,520.48	59,112.28	7,591.80
St.Deviasi	27,727.52	29,267.73	5,634.54	37,043.42	36,894.12	3,337.11
Koefisien Variasi (%)	135.09	133.37	397.06	71.90	62.41	43.96

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.31 Capaian Peningkatan Investasi Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.32 Capaian Peningkatan Investasi Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2017 ke 2018 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)

9. Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor

Ekspor ke luar negeri dari tahun 2018 ke 2019 secara umum menurun, namun terdapat juga daerah yang mengalami peningkatan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Pola umum untuk seluruh daerahnya adalah bahwa daerah yang memiliki nilai ekspor tinggi pada tahun 2019 cenderung menurun dari kondisi 2018. Namun, hal yang berbeda terjadi untuk daerah penerima DID tahun 2020, dimana nilai ekspornya tinggi pada tahun 2019 dikarenakan deltanya yang juga meningkat. Dengan melihat kondisi tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan alokasi DID tahun 2021.

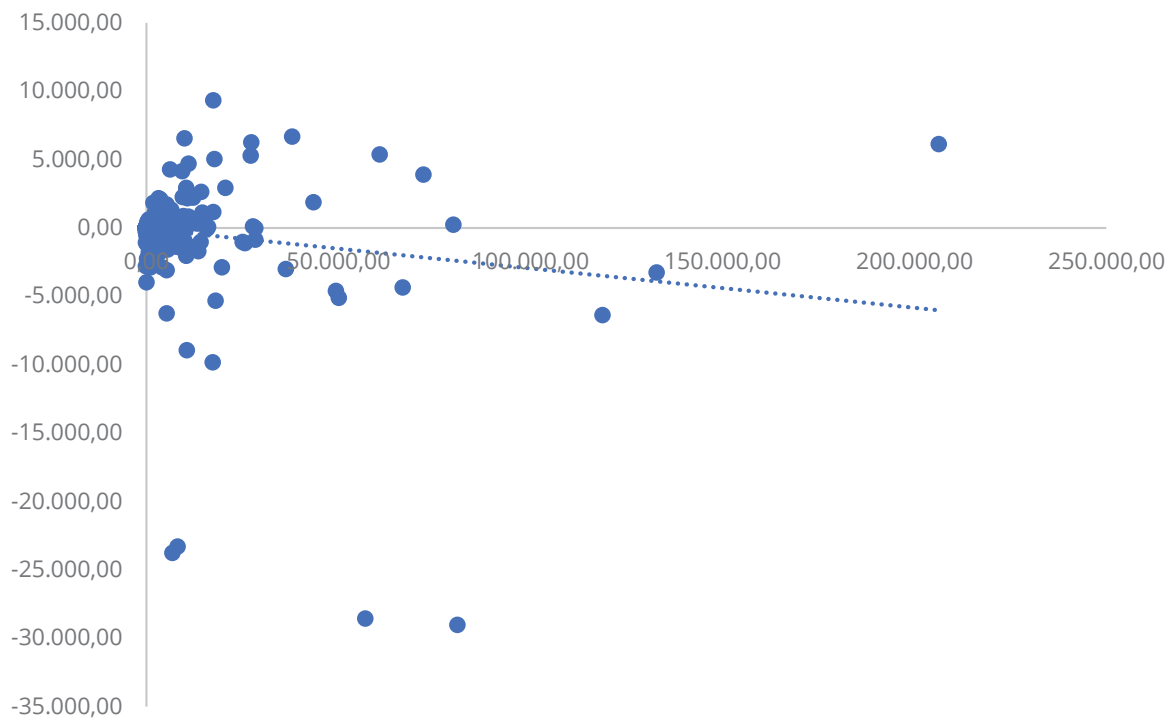
Tabel 5.32 Statistik Dekriptif Peningkatan Ekspor untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Kabupaten						
Maksimum	68,354.27	72,253.90	9,319.50	68,354.27	72,253.90	9,319.50
Minimum	0.00	0.00	-23,767.55	0.00	426.28	39.62
Rata-rata	2,155.40	2,168.01	12.62	5,816.41	6,868.25	1,051.84
St.Deviasi	6,430.28	6,408.09	1,723.76	10,927.79	11,594.39	1,597.82
Koefisien Variasi (%)	298.33	295.57	13,664.05	187.88	168.81	151.91

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	85,620.30	57,022.89	5,259.89	22,006.21	27,266.10
Minimum	0.00	0.00	-28,597.41	0.30	415.61	65.60
Rata-rata	3,452.19	3,129.35	-322.84	6,161.42	7,328.83	1,167.41
St.Deviasi	10,273.75	7,931.97	3,288.61	6,449.87	7,526.33	1,342.54
Koefisien Variasi (%)	297.60	253.47	-1,018.65	104.68	102.69	115.00

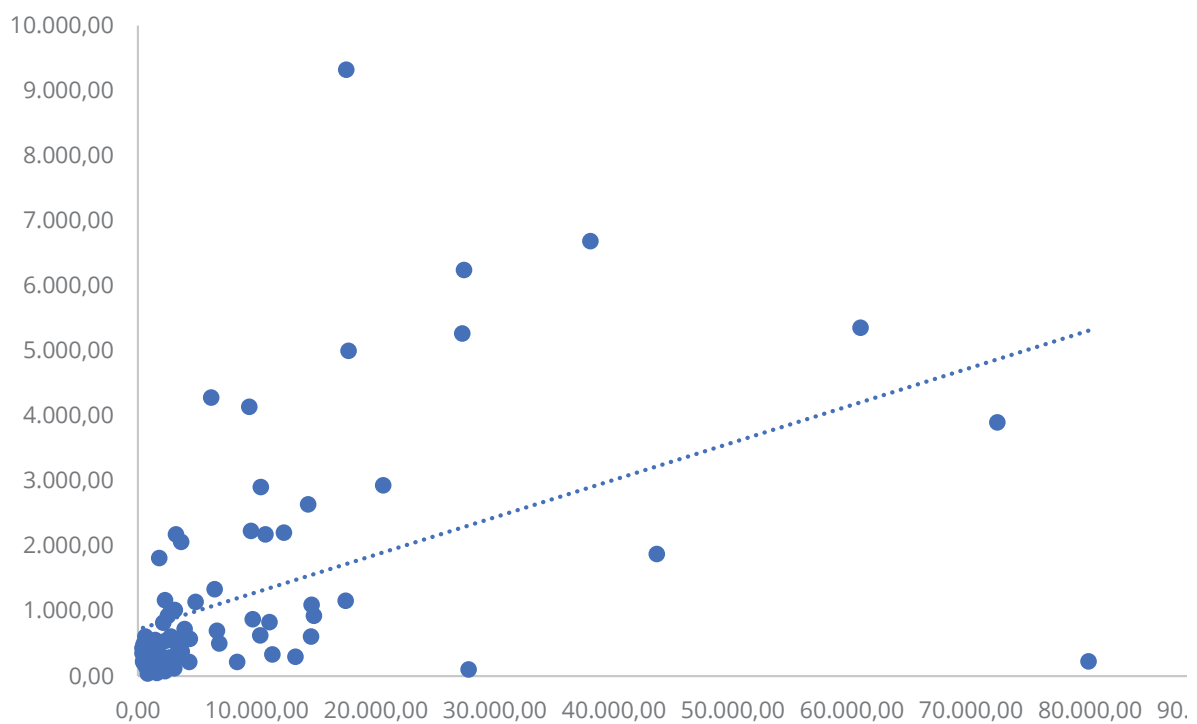
Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	200,334.92	206,443.15	6,682.10	79,717.63	79,944.80
Minimum	246.97	72.31	-29,057.27	12,739.81	17,740.51	227.18
Rata-rata	33,907.09	31,881.06	-2,026.03	44,812.74	49,128.72	4,315.98
St.Deviasi	47,029.44	46,133.78	7,036.98	29,093.99	27,032.99	2,820.34
Koefisien Variasi (%)	138.70	144.71	-347.33	64.92	55.02	65.35

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.33 Capaian Peningkatan Ekspor Tahun 2019 dan Perubahannya Tahun 2018 ke 2019 Seluruh Daerah untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 5.34 Capaian Peningkatan Ekspor Tahun 2019 dan Perubahannya Tahun 2018 ke 2019 Daerah Penerima DID untuk DID Tahun 2020 (Rp. Miliar)

Terkait dengan penambahan kategori baru dalam katagori kinerja, selain dari *review* yang telah dilakukan di atas, beberapa kategori dan indikator dapat diambil dari dokumen RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, khususnya dari Indikator dan Target Kegiatan Prioritas, antara lain misalnya:

- a. Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur: Kategori proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak (rumah layak huni);
- b. Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat: Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran
- c. Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan: Kategori Inovasi Daerah berupa Realisasi kesepakatan kerjasama daerah, Kategori penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perijinan, Kategori perluasan pelayanan terpadu pada sektor perijinan, dan Kategori pelayanan Administrasi Kependudukan

Berbagai katagori dan indikator kinerja juga dapat diperoleh dari aspirasi dan masukan berbagai pihak, terutama kementerian/nonkementerian yang terkait. Hal tersebut tentunya harus segera dikomunikasikan dengan berbagai pihak untuk dipertimbangkan kelayakannya ke depan.

Tabel 5.33 Indikator dan Target Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2020- 2024

INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS

Indikator	Target
A. Pengembangan Kawasan Strategis	
1. Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/KSPN) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1
B. Pengembangan Kawasan Perkotaan	
1. Perencanaan wilayah metropolitan di luar Jawa	3 wilayah metropolitan
2. Pembangunan wilayah metropolitan di luar Jawa	4 wilayah metropolitan
3. Pemindahan Ibukota Negara	1
4. Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW (kota)	54 kota
5. Pembangunan kota baru	4 kota baru

C. Pemenuhan Pelayanan Dasar

1. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak	52,78% (2024)
--	---------------

D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan

1. Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	Mandiri: 8,559 (naik 3,000) Berkembang: 58,879 (naik 7,000) Tertinggal: 6,232
2. Penurunan angka kemiskinan desa (%)	9%
3. Penetapan batas administrasi desa/kelurahan	10%
4. Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara (lokasi)	187
5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi kawasan sekitarnya (lokasi)	18
6. Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah tertinggal dengan karakteristik wilayah tertentu (kabupaten)	35 (terentaskan 29)
7. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)	22.5 – 23%
8. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	62 – 62.5
9. Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten	50
10. Kawasan transmigrasi yang dibangun pemukimannya dan dikembangkan pusat pertumbuhannya (kawasan)	43 tahap berkembang 13 tahap mandiri 7 tahap bersaing

E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

1. Jumlah daerah yang pendapatan pajak daerah dan redistribusinya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran	542
2. Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar	542
3. Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	50%
4. Jumlah daerah yang melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	542

5. Jumlah daerah yang menetapkan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berbasis elektronik melalui aplikasi <i>e-budgeting</i> dan <i>e-budgeting plus</i>	542
6. Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	44****
7. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%
8. Jumlah Lembar Peta Dasar RBI skala 1:5,000	125,810 NLP (seluruh wilayah Indonesia non hutan)
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)	5 Rancangan Perpres
10. RDTR Perbatasan Negara	12 Rancangan Perpres
11. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	172 Kab/kota
12. Luas bidang tanah bersertifikat yang terdigitalisasi dan berkualitas baik	52.72 juta Ha
13. Jumlah Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	34 Kantor Wilayah ATR/BPN dan 508 Kantor Pertanahan
14. Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	1

Sumber: RPJMN 2020-2024

Secara lengkap, usulan perbaikan terkait dengan indikator untuk kriteria utama dan kategori kinerja DID tahun 2021 dapat dilihat dalam Lampiran 7.

6

SARAN/REKOMENDASI

Kajian tentang *review* penganggaran dan pengalokasian DID tahun 2020 dan usulan perbaikannya untuk DID tahun 2021 ini disusun untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kebijakan DID dari waktu ke waktu khususnya dari tahun 2020 ke 2021, sehingga dapat terdokumentasikan dengan baik terkait dengan latar belakang, alasan, tujuan dan proses dari dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID ke depan, baik terkait dengan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID, indikator kriteria utama, indikator kriteria kinerja, dan berbagai hal lainnya yang terkait.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa saran/rekomendasi kebijakan terkait penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2021 antara lain:

- a. Indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 sebaiknya tidak menurun, minimal dapat dipertahankan dan bahkan sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya (tahun 2020, setelah penyesuaian). Dari hasil proyeksi, dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi minimal menjadi Rp. 15,2 triliun (meningkat minimal 12,68 persen dari tahun 2020). Hal tersebut tentunya dengan asumsi bahwa wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah mulai mereda dan kondisi keuangan negara sudah membaik dan stabil;
- b. Kriteria utama yang perlu dipertahankan adalah: (i) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (ii) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan (iii) Pelaksanaan e-government (*e-procurement* dan *e-budgeting*);

- c. Dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID, sebaiknya tetap menggunakan kluster seperti DID tahun-tahun sebelumnya (khususnya DID untuk tahun 2020), yaitu menurut jenis pemerintahan daerahnya yang berjumlah 3 kluster, yakni provinsi, kabupaten, dan kota;
- d. Dari semua kelompok kategori, koefisien korelasi daerah penerima DID antara tahun 2019 dan 2021 cukup rendah (baik), kecuali untuk tiga kelompok kategori, yaitu kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kategori Penyelenggaraan Pemerintah dan kategori Pengelolaan Sampah. Untuk ketiga kategori tersebut, koefisien korelasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang menerima DID pada tahun sebelumnya, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan DID kembali pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi dalam penentuan daerah penerimanya untuk ketiga kelompok kategori tersebut;
- e. Data yang kurang *up to date* dalam penghitungan DID umumnya adalah data-data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat sumber data yang dilakukan melalui Susenas (yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September), dan juga waktu penetapan dan penghitungan alokasi DID yang baru diumumkan paling cepat akhir Oktober pada tahun yang bersangkutan, sebenarnya terdapat potensi untuk menggunakan data yang lebih *up to date*. Tentunya hal ini perlu dikomunikasikan dengan BPS sebagai penyedia data terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kinerja kesejahteraan masyarakat;
- f. Terkait dengan indikator-indikator kinerja yang penilaiannya menggunakan kombinasi capaian tahun terakhir dan nilai perubahannya (delta) dari tahun sebelumnya, sebaiknya ke depan nilai perubahannya (delta) mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot pencapaian nilai terakhir;
- g. Indikator dan target kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai dasar dalam penambahan, pengurangan atau perbaikan terhadap indikator dalam berbagai kategori kinerja yang digunakan dalam penghitungan alokasi DID ke depan; dan
- h. Untuk kategori kinerja dalam DID tahun 2021, perubahan indikator kerjanya antara lain:
 - ☑ Menghilangkan kategori kualitas realisasi belanja pada kelompok kategori Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
 - ☑ Mengganti indikator dalam kategori pembiayaan kreatif, sehingga menjadi tidak hanya pinjaman daerah dari PT SMI, namun pinjaman daerah secara lebih luas, serta memasukkan KPBU dan obligasi daerah

- ☑ Dalam kategori *mandatory spending*, menghilangkan indikator belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari DTU. Dalam kategori ini ditambahkan dengan pemenuhan anggaran untuk APIP dan pemenuhan penyesuaian belanja barang & jasa dan belanja modal dalam APBD sesuai SKB Menkeu dan Mendagri
- ☑ Dalam kategori ketepatan waktu pelaporan, ditambahkan indikator Penyampaian Laporan Penyesuaian APBD ke Kementerian Keuangan, yang paling lambat tanggal 23 April 2020 dan penyampaian laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19
- ☑ Nilai rata-rata UN sekolah menengah pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan diganti dengan Indeks Pemerataan Guru (IPG) PNS
- ☑ Indikator persentase stunting pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang digunakan adalah stunting balita, bukan stunting baduta.
- ☑ Pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, ditambahkan dengan kategori proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak (rumah layak huni);
- ☑ Untuk kelompok kategori kesejahteraan masyarakat, ditambahkan kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka.
- ☑ Pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan, ditambahkan untuk Kategori Inovasi Daerah berupa Realisasi kesepakatan kerjasama daerah, Kategori penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perijinan, Kategori perluasan pelayanan terpadu pada sektor perijinan, dan Kategori pelayanan Administrasi Kependudukan

Demikianlah beberapa saran/rekomendasi yang dapat diberikan dari penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan terkait dengan penganggaran dan pengalokasian DID.

7

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020

8

LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase DID terhadap TKDD Se-Provinsi (Konsolidasi) Tahun 2011-2019 (Persen)

No.	Se-Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0.36	0.27	0.15	0.14	0.17	0.90	2.06	1.21	0.36
2	Sumatera Utara	0.22	0.06	0.32	0.01	0.09	0.79	0.39	0.32	0.32
3	Sumatera Barat	0.40	0.16	-	0.06	0.20	0.81	2.71	1.97	2.79
4	Riau	0.10	0.27	0.10	0.09	0.05	0.15	0.10	0.70	0.91
5	Jambi	-	-	-	0.23	0.46	0.11	0.47	1.62	1.47
6	Sumatera Selatan	0.27	-	0.20	0.13	0.06	0.65	0.30	1.39	1.20
7	Bengkulu	-	0.77	0.06	0.11	0.12	0.88	0.97	0.37	0.43
8	Lampung	-	0.21	0.46	0.41	0.18	0.37	0.96	1.24	0.89
9	DKI Jakarta	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.29
10	Jawa Barat	-	0.04	0.00	0.05	0.07	0.70	0.71	0.87	1.04
11	Jawa Tengah	0.51	0.66	0.21	0.23	0.32	0.75	1.71	1.23	1.97
12	DI Yogyakarta	0.81	0.78	1.34	1.39	0.74	1.95	2.89	2.37	3.41
13	Jawa Timur	0.29	0.53	0.49	0.43	0.53	1.47	0.95	1.33	1.82
14	Kalimantan Barat	-	-	0.26	0.19	0.18	0.41	0.31	0.73	0.62
15	Kalimantan Tengah	-	0.22	0.22	-	0.04	0.39	1.28	1.61	1.15
16	Kalimantan Selatan	0.26	0.18	-	-	0.35	0.28	1.81	2.00	1.60
17	Kalimantan Timur	-	0.18	0.28	-	0.22	0.17	0.87	0.62	0.83
18	Sulawesi Utara	1.98	0.89	0.37	0.44	0.55	0.63	1.87	2.09	2.09
19	Sulawesi Tengah	0.65	1.18	0.62	1.43	0.35	0.85	0.62	0.86	1.16
20	Sulawesi Selatan	1.46	0.53	0.30	0.84	0.79	0.75	0.69	1.57	1.36
21	Sulawesi Tenggara	0.67	0.59	0.90	0.80	1.16	0.66	0.98	1.27	1.28

22	Bali	0.81	1.24	0.68	0.77	0.51	1.02	1.80	3.91	3.74
23	Nusa Tenggara Barat	-	-	0.02	0.46	0.59	1.49	1.66	1.99	1.50
24	Nusa Tenggara Timur	-	0.19	-	-	-	0.49	0.88	0.19	0.08
25	Maluku	-	-	-	-	-	1.55	2.41	0.87	0.64
26	Papua	0.32	0.10	-	-	0.06	0.21	0.19	0.19	0.27
27	Maluku Utara	0.45	-	-	-	0.23	0.55	1.16	1.35	1.29
28	Banten	0.61	0.27	1.63	0.46	0.05	0.62	0.53	0.93	1.03
29	Bangka Belitung	-	-	0.65	0.49	0.14	0.08	2.15	0.73	1.47
30	Gorontalo	3.87	0.84	1.33	0.07	0.96	1.77	0.86	2.36	2.45
31	Kepulauan Riau	-	0.03	0.29	0.72	0.48	0.78	0.10	0.84	2.73
32	Papua Barat	-	-	-	-	0.03	0.20	0.38	0.36	0.30
33	Sulawesi Barat	-	-	-	0.05	0.04	0.73	2.54	2.88	2.33
34	Kalimantan Utara	0.87	0.32	0.51	-	0.06	0.23	0.37	1.10	-
	Total	0.34	0.29	0.27	0.24	0.27	0.70	0.98	1.11	1.21

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Lampiran 2. Persentase DID terhadap Penerimaan APBD Se-Provinsi (Konsolidasi) Tahun 2011-2019 (Persen)

No.	Se-Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0.33	0.24	0.13	0.11	0.13	0.72	1.64	1.02	0.29
2	Sumatera Utara	0.17	0.05	0.24	0.01	0.06	0.60	0.29	0.23	0.22
3	Sumatera Barat	0.33	0.13	-	0.05	0.16	0.65	2.13	1.54	2.15
4	Riau	0.08	0.24	0.07	0.07	0.03	0.11	0.08	0.50	0.75
5	Jambi	-	-	-	0.19	0.37	0.09	0.38	1.27	1.17
6	Sumatera Selatan	0.23	-	0.15	0.11	0.05	0.51	0.24	1.15	0.94
7	Bengkulu	-	0.67	0.05	0.09	0.10	0.75	0.83	0.30	0.35
8	Lampung	-	0.17	0.37	0.32	0.14	0.30	0.74	0.92	0.65
9	DKI Jakarta	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.08
10	Jawa Barat	-	0.02	0.00	0.03	0.04	0.40	0.43	0.51	0.60
11	Jawa Tengah	0.37	0.48	0.14	0.15	0.21	0.50	1.10	0.83	1.31
12	DI Yogyakarta	0.57	0.54	0.88	0.86	0.45	1.28	1.84	1.62	2.27
13	Jawa Timur	0.19	0.36	0.32	0.26	0.32	0.93	0.59	0.86	1.20
14	Kalimantan Barat	-	-	0.21	0.15	0.14	0.34	0.25	0.59	0.50
15	Kalimantan Tengah	-	0.18	0.18	-	0.04	0.33	1.07	1.28	0.92
16	Kalimantan Selatan	0.20	0.12	-	-	0.26	0.22	1.31	1.45	1.21
17	Kalimantan Timur	-	0.12	0.16	-	0.15	0.12	0.58	0.43	0.55
18	Sulawesi Utara	1.74	0.77	0.32	0.36	0.46	0.53	1.27	1.75	1.71
19	Sulawesi Tengah	0.57	1.03	0.53	1.20	0.30	0.74	0.52	0.71	0.97
20	Sulawesi Selatan	1.16	0.42	0.23	0.63	0.60	0.57	0.51	1.14	0.98
21	Sulawesi Tenggara	0.60	0.51	0.78	0.69	1.03	0.59	0.85	1.08	1.08
22	Bali	0.43	0.65	0.35	0.37	0.23	0.48	0.98	1.75	1.58
23	Nusa Tenggara Barat	-	-	0.02	0.35	0.47	1.22	1.27	1.49	1.16
24	Nusa Tenggara Timur	-	0.17	-	-	-	0.43	0.76	0.17	0.07
25	Maluku	-	-	-	-	-	1.41	2.18	0.76	0.56
26	Papua	0.29	0.08	-	-	0.05	0.18	0.16	0.16	0.23
27	Maluku Utara	0.41	-	-	-	0.21	0.52	1.07	1.17	1.12
28	Banten	0.34	0.15	0.89	0.19	0.02	0.30	0.26	0.45	0.49
29	Bangka Belitung	-	-	0.51	0.38	0.11	0.06	1.67	0.57	1.13
30	Gorontalo	3.51	0.74	1.17	0.06	0.82	1.52	0.72	2.00	2.05
31	Kepulauan Riau	-	0.02	0.19	0.51	0.32	0.54	0.07	0.51	1.85

32	Papua Barat	-	-	-	-	0.02	0.17	0.32	0.29	0.26
33	Sulawesi Barat	-	-	-	0.04	0.03	0.65	2.19	2.49	2.02
34	Kalimantan Utara	0.78	0.27	0.35	-	0.05	0.18	0.31	0.91	-
Total		0.25	0.21	0.19	0.17	0.18	0.50	0.70	0.78	0.84

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Lampiran 3. Indikator untuk Kriteria Utama dan Kategori Kinerja DID Tahun 2020

No	Kriteria Utama	Indikator	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK Atas LKPD	Opini BPK WTP Atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD tepat Waktu	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (Paling Lambat 31 Desember tahun Sebelumnya)	2019	Pemda
3	<i>E-government</i>	<i>E-budgeting</i>	2019	Kemendagri
		<i>E-procurement</i>	2019	LKPP
4	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketersediaan PTSP	2019	BKPM

No	Kelompok Kategori dan Kategori Kinerja	Indikator	Tahun	Sumber Data		
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	2017 dan 2018	BKPM		
2	Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor	Ekspor Luar Negeri	2018 dan 2019	Bea Cukai		
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Kemandirian Daerah	PDRD per PDRB Non Migas	2017 dan 2018	Kemenkeu dan BPS	
4	Kategori Kemandirian Daerah	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah	Kategori Kualitas Realisasi Belanja	Realisasi Belanja per Belanja APBD (Murni)	2017 dan 2018	Pemda
5		Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan	Belanja Modal Pendidikan Non Kantor per Belanja Bidang Pendidikan	2017 dan 2018	Pemda	
6		Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan	Belanja Modal Kesehatan Non Kantor per Belanja Bidang Kesehatan	2017 dan 2018	Pemda	
7		Kategori Pembiayaan Kreatif	Pemenuhan, Kedisiplinan dan Standar Minimum Pelayanan - Pinjaman Daerah ke PT SMI	2019	PT SMI	
8	Kategori <i>Mandatory Spending</i>		Belanja Pendidikan (Min 20% dari Belanja APBD)	2019	Pemda	
			Belanja Kesehatan (Min 10% dari Belanja APBD di luar gaji)	2019	Pemda	
			Belanja Infrastruktur (Min 25% dari DAU dan DBH)	2019	Pemda	
		Alokasi Dana Desa dan Dana Kelurahan (Min 10% dari DAU dan DBH)	2019	Pemda		

No	Kriteria Utama	Indikator	Tahun	Sumber Data	
9	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	Penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan	2019	DJPK Kemenkeu
			Penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan	2019	DJPK Kemenkeu
			Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya	2019	DJPK Kemenkeu
10	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan	Peta Mutu Pendidikan SMP untuk Kab/Kota	2017 dan 2018	Kemendikbud
			Peta Mutu Pendidikan SMA/SMK untuk Provinsi	2017 dan 2018	Kemendikbud
11		Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional	Rata-rata Nilai UN SMP untuk Kab/Kota	2017 dan 2018	Kemendikbud
			Rata-rata Nilai UN SMA/SMK untuk Provinsi	2017 dan 2018	Kemendikbud
12		Kategori Angka Partisipasi Murni	APM SMP untuk Kab/Kota	2017 dan 2018	BPS
			APM SMA/SMK untuk Provinsi	2017 dan 2018	BPS
13	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i>	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2013 dan 2018	Kemenkes
14		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	Persentase Balita Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2013 dan 2018	Kemenkes
15		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	2017 dan 2018	BPS
16	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak	Persentase Sumber Air Minum Layak	2017 dan 2018	BPS
17		Kategori Akses Sanitasi Layak	Persentase Akses Sanitasi Layak	2017 dan 2018	BPS
18	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	2017 dan 2018	BPS
19		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	2017 dan 2018	BPS

No	Kriteria Utama	Indikator	Tahun	Sumber Data	
20	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaraan Pemerintah	Evaluasi LPPD	2018	Kemendagri
21		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	2019	Bappenas
22		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP (Minimal B atau 70 ke atas)	2019	Kemenpan RB
23		Inovasi Daerah	Kategori Inovasi Pelayanan Publik	Top 45 Inovasi Pelayanan Publik	2019
24		Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	2018	Balitbang Kemendagri
25	Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah		Peraturan pengurangan dan penanganan sampah plastik	2019	KLHK
			Pengurangan dan penanganan sampah melalui implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah	2019	KLHK

Lampiran 4. Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Tahun 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	0.335																								
3	0.094	0.013																							
4	0.005	0.055	0.072																						
5	0.095	0.047	0.047	0.060																					
6	0.045	0.092	0.020	0.063	0.126																				
7	0.027	0.037	-0.031	0.028	0.107	0.038																			
8	0.235	0.217	0.127	0.151	0.084	0.131	0.081																		
9	0.022	0.074	0.025	-0.021	0.093	0.056	-0.037	0.174																	
10	0.050	0.122	0.073	0.090	0.025	0.007	0.077	0.021	-0.043																
11	0.105	0.150	0.001	0.094	0.059	-0.021	-0.027	0.295	0.205	-0.031															
12	0.061	-0.020	0.081	0.039	-0.045	0.015	-0.031	0.105	0.138	0.069	0.112														
13	0.116	0.005	0.047	0.121	-0.030	0.065	0.028	0.108	0.065	-0.020	0.022	0.015													
14	0.123	0.104	0.137	0.117	0.013	0.016	-0.041	0.354	0.186	-0.065	0.367	0.155	0.030												
15	-0.036	0.060	0.028	0.135	0.034	-0.009	0.045	0.145	0.114	0.022	0.135	0.131	0.025	0.281											
16	0.033	0.000	0.012	0.051	0.080	0.067	-0.029	0.047	0.003	0.000	-0.002	0.085	0.151	0.060	-0.005										
17	0.082	0.070	0.023	0.073	0.090	0.001	-0.029	0.069	0.080	-0.024	-0.023	0.064	0.061	0.079	0.055	0.231									
18	0.100	0.101	0.113	0.016	-0.029	0.011	-0.022	0.112	0.012	0.107	0.088	0.032	-0.053	0.082	0.109	-0.013	-0.036								
19	0.091	0.167	0.017	0.013	0.082	-0.006	-0.024	0.134	0.025	0.039	0.190	0.086	0.031	0.133	0.087	0.030	0.102	0.026							
20	0.042	0.170	-0.004	0.092	0.044	-0.060	-0.015	0.129	0.041	0.017	0.102	0.073	0.046	0.109	0.086	0.086	0.001	0.009	0.131						
21	0.083	0.104	-0.053	0.011	-0.015	0.027	-0.010	0.054	0.009	-0.036	0.044	-0.013	-0.025	0.100	0.078	-0.050	-0.051	0.015	0.110	0.266					
22	0.090	0.086	0.084	0.035	0.010	0.012	-0.027	0.226	0.103	-0.008	0.253	0.063	-0.083	0.271	0.067	-0.019	-0.023	0.023	0.129	0.102	0.135				
23	0.066	0.119	0.006	0.047	-0.022	-0.021	-0.017	0.173	0.065	0.040	0.245	0.053	-0.019	0.185	0.041	0.015	-0.038	-0.002	0.020	0.173	0.174	0.245			
24	0.044	0.023	0.056	0.069	0.122	0.075	-0.017	0.156	0.065	-0.028	0.218	0.004	-0.041	0.164	0.041	-0.062	-0.038	0.030	0.140	0.173	0.106	0.245	0.111		
25	0.098	0.123	0.033	0.041	0.094	0.062	-0.012	0.153	0.008	-0.045	0.197	-0.035	-0.078	0.159	0.109	-0.029	-0.030	0.038	0.070	0.084	0.070	0.197	0.127	0.290	
Min	-0.036	-0.020	-0.053	-0.021	-0.045	-0.060	-0.041	0.021	-0.043	-0.065	-0.023	-0.035	-0.083	0.060	-0.005	-0.062	-0.051	-0.002	0.020	0.084	0.070	0.197	0.111	0.290	
Max	0.335	0.217	0.137	0.151	0.126	0.131	0.081	0.354	0.205	0.107	0.367	0.155	0.151	0.281	0.109	0.231	0.102	0.038	0.140	0.266	0.174	0.245	0.127	0.290	

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Lampiran 5. Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Besaran Penerimaan untuk DID Tahun 2020 (Semula)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	0.338																							
3	0.096	0.008																						
4	-0.006	0.048	0.084																					
5	0.078	0.038	0.054	0.060																				
6	0.040	0.084	0.026	0.059	0.149																			
7	0.007	0.032	-0.029	0.053	0.112	0.058																		
8	0.239	0.221	0.121	0.143	0.080	0.129	0.076																	
9	0.027	0.072	0.025	-0.019	0.092	0.058	-0.034	0.174																
10	0.048	0.122	0.076	0.084	0.025	0.008	0.057	0.020	-0.042															
11	0.103	0.154	0.003	0.089	0.060	-0.017	-0.025	0.299	0.205	-0.029														
12	0.058	-0.020	0.089	0.037	-0.045	0.011	-0.029	0.103	0.134	0.069	0.112													
13	0.124	0.003	0.051	0.119	-0.030	0.054	0.057	0.107	0.062	-0.019	0.025	0.017												
14	0.122	0.095	0.136	0.115	0.012	0.016	-0.038	0.360	0.189	-0.062	0.392	0.159	0.026											
15	-0.028	0.055	0.033	0.124	0.049	-0.009	0.028	0.153	0.109	0.020	0.134	0.133	0.033	0.285										
16	0.033	0.001	0.025	0.056	0.092	0.071	-0.027	0.049	0.003	0.003	-0.005	0.079	0.158	0.061	-0.009									
17	0.086	0.077	0.032	0.079	0.099	0.000	-0.028	0.066	0.082	-0.025	-0.023	0.052	0.071	0.083	0.056	0.233								
18	0.112	0.109	0.108	0.018	-0.031	0.005	-0.021	0.111	0.008	0.110	0.089	0.034	-0.054	0.080	0.098	-0.016	-0.038							
19	0.099	0.174	0.019	0.016	0.082	0.001	-0.022	0.139	0.025	0.036	0.194	0.095	0.029	0.141	0.097	0.029	0.102	0.027						
20	0.047	0.166	-0.001	0.082	0.040	-0.062	-0.014	0.129	0.042	0.016	0.111	0.074	0.051	0.114	0.086	0.079	-0.003	0.006	0.135					
21	0.094	0.106	-0.053	0.008	-0.014	0.026	-0.009	0.055	0.009	-0.036	0.038	-0.008	-0.022	0.112	0.078	-0.050	-0.051	0.013	0.118	0.270				
22	0.094	0.090	0.083	0.046	0.009	0.018	-0.025	0.224	0.100	-0.014	0.265	0.065	-0.084	0.290	0.071	-0.019	-0.020	0.017	0.133	0.107	0.143			
23	0.077	0.121	0.007	0.039	-0.025	-0.025	-0.016	0.174	0.063	0.031	0.247	0.049	-0.017	0.199	0.044	0.016	-0.042	-0.004	0.020	0.179	0.181	0.258		
24	0.052	0.063	0.023	0.025	0.143	0.079	-0.014	0.165	0.086	-0.048	0.206	-0.015	-0.043	0.175	0.048	-0.061	-0.046	0.039	0.131	0.232	0.160	0.316	0.177	
25	0.091	0.141	0.040	0.029	0.078	0.072	-0.011	0.148	0.008	-0.044	0.179	-0.035	-0.076	0.165	0.107	-0.018	-0.036	0.039	0.101	0.078	0.044	0.197	0.107	0.305
Min	-0.028	-0.020	-0.053	-0.019	-0.045	-0.062	-0.038	0.020	-0.042	-0.062	-0.023	-0.035	-0.084	0.061	-0.009	-0.061	-0.051	-0.004	0.020	0.078	0.044	0.197	0.107	0.305
Max	0.338	0.221	0.136	0.143	0.149	0.129	0.076	0.360	0.205	0.110	0.392	0.159	0.158	0.290	0.107	0.233	0.102	0.039	0.135	0.270	0.181	0.316	0.177	0.305

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Lampiran 6. Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Besaran Penerimaan untuk DID Tahun 2020 (Setelah Penyesuaian)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	0.335																							
3	0.094	0.013																						
4	0.005	0.055	0.072																					
5	0.095	0.047	0.047	0.060																				
6	0.045	0.092	0.020	0.063	0.126																			
7	0.027	0.037	-0.031	0.028	0.107	0.038																		
8	0.235	0.217	0.127	0.151	0.084	0.131	0.081																	
9	0.022	0.074	0.025	-0.021	0.093	0.056	-0.037	0.174																
10	0.050	0.122	0.073	0.090	0.025	0.007	0.077	0.021	-0.043															
11	0.105	0.150	0.001	0.094	0.059	-0.021	-0.027	0.295	0.205	-0.031														
12	0.061	-0.020	0.081	0.039	-0.045	0.015	-0.031	0.105	0.138	0.069	0.112													
13	0.116	0.005	0.047	0.121	-0.030	0.065	0.028	0.108	0.065	-0.020	0.022	0.015												
14	0.123	0.104	0.137	0.117	0.013	0.016	-0.041	0.354	0.186	-0.065	0.367	0.155	0.030											
15	-0.036	0.060	0.028	0.135	0.034	-0.009	0.045	0.145	0.114	0.022	0.135	0.131	0.025	0.281										
16	0.033	0.000	0.012	0.051	0.080	0.067	-0.029	0.047	0.003	0.000	-0.002	0.085	0.151	0.060	-0.005									
17	0.082	0.070	0.023	0.073	0.090	0.001	-0.029	0.069	0.080	-0.024	-0.023	0.064	0.061	0.079	0.055	0.231								
18	0.100	0.101	0.113	0.016	-0.029	0.011	-0.022	0.112	0.012	0.107	0.088	0.032	-0.053	0.082	0.109	-0.013	-0.036							
19	0.091	0.167	0.017	0.013	0.082	-0.006	-0.024	0.134	0.025	0.039	0.190	0.086	0.031	0.133	0.087	0.030	0.102	0.026						
20	0.042	0.170	-0.004	0.092	0.044	-0.060	-0.015	0.129	0.041	0.017	0.102	0.073	0.046	0.109	0.086	0.086	0.001	0.009	0.131					
21	0.083	0.104	-0.053	0.011	-0.015	0.027	-0.010	0.054	0.009	-0.036	0.044	-0.013	-0.025	0.100	0.078	-0.050	-0.051	0.015	0.110	0.266				
22	0.090	0.086	0.084	0.035	0.010	0.012	-0.027	0.226	0.103	-0.008	0.253	0.063	-0.083	0.271	0.067	-0.019	-0.023	0.023	0.129	0.102	0.135			
23	0.066	0.119	0.006	0.047	-0.022	-0.021	-0.017	0.173	0.065	0.040	0.245	0.053	-0.019	0.185	0.041	0.015	-0.038	-0.002	0.020	0.173	0.174	0.245		
24	0.044	0.023	0.056	0.069	0.122	0.075	-0.017	0.156	0.065	-0.028	0.218	0.004	-0.041	0.164	0.041	-0.062	-0.038	0.030	0.140	0.173	0.106	0.245	0.111	
25	0.098	0.123	0.033	0.041	0.094	0.062	-0.012	0.153	0.008	-0.045	0.197	-0.035	-0.078	0.159	0.109	-0.029	-0.030	0.038	0.070	0.084	0.070	0.197	0.127	0.290
Min	-0.036	-0.020	-0.053	-0.021	-0.045	-0.060	-0.041	0.021	-0.043	-0.065	-0.023	-0.035	-0.083	0.060	-0.005	-0.062	-0.051	-0.002	0.020	0.084	0.070	0.197	0.111	0.290
Max	0.335	0.217	0.137	0.151	0.126	0.131	0.081	0.354	0.205	0.107	0.367	0.155	0.151	0.281	0.109	0.231	0.102	0.038	0.140	0.266	0.174	0.245	0.127	0.290

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Lampiran 7. Usulan Indikator untuk Kriteria Utama dan Kategori Kinerja DID Tahun 2021

No	Kriteria Utama	Indikator	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK Atas LKPD	Opini BPK WTP Atas LKPD	2020	BPK
2	Penetapan Perda APBD tepat Waktu	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (Paling Lambat 31 Desember tahun Sebelumnya)	2020	Pemda
3	<i>E-government</i>	<i>E-budgeting</i>	2020	Kemendagri
		<i>E-procurement</i>	2020	LKPP

No	Kelompok Kategori dan Kategori Kinerja	Indikator	Tahun	Sumber Data	
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	2018 dan 2019	BKPM	
2	Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor	Ekspor Luar Negeri	2019 dan 2020	Bea Cukai	
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Kemandirian Daerah	PDRD per PDRB Non Migas (atau PDRB Non Migas Sektor 6 sampai dengan Sektor 17)	2018 dan 2019	Kemenkeu dan BPS
5		Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan	Belanja Modal Pendidikan Non Kantor per Belanja Bidang Pendidikan	2018 dan 2019	Pemda
6		Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan	Belanja Modal Kesehatan Non Kantor per Belanja Bidang Kesehatan	2018 dan 2019	Pemda
7		Kategori Pembiayaan Kreatif	Pinjaman Daerah, KPBU, Obligasi Daerah, dan lain-lain	2020	PT SMI, DJPPR, Pemda
8		Kategori <i>Mandatory Spending</i>	Belanja Pendidikan (Min 20% dari Belanja APBD)	2020	Pemda
			Belanja Kesehatan (Min 10% dari Belanja APBD di luar gaji)	2020	Pemda
	Alokasi Dana Desa dan Dana Kelurahan (Min 10% dari DAU dan DBH)		2020	Pemda	
	Pemenuhan Anggaran Pengawasan (yaitu untuk APIP) dalam APBD		2020	Pemda	
		Pemenuhan Penyesuaian Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dalam APBD sesuai SKB Menkeu dan Mendagri	2020	Pemda	

No	Kriteria Utama	Indikator	Tahun	Sumber Data	
9	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	Penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan	2020	DJPK Kemenkeu
			Penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan	2020	DJPK Kemenkeu
			Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya	2020	DJPK Kemenkeu
			Penyampaian Laporan Penyesuaian APBD ke Kementerian Keuangan, yang paling lambat tanggal 23 April 2020	2020	DJPK Kemenkeu
			Penyampaian laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19	2020	DJPK Kemenkeu
10	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan	Peta Mutu Pendidikan SMP untuk Kab/Kota	2018 dan 2019	Kemendikbud
			Peta Mutu Pendidikan SMA/SMK untuk Provinsi	2018 dan 2019	Kemendikbud
11		Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional	Indeks Pemerataan Guru (IPG) PNS SD dan SMP untuk Kab/Kota	2018 dan 2019	Kemendikbud
			Indeks Pemerataan Guru (IPG) PNS SMA/SMK untuk Provinsi	2018 dan 2019	Kemendikbud
12		Kategori Angka Partisipasi Murni	APM SMP untuk Kab/Kota	2018 dan 2019	BPS
			APM SMA/SMK untuk Provinsi	2018 dan 2019	BPS
13	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i>	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2018 dan 2019	Kemenkes
14		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	Persentase Balita Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2018 dan 2019	Kemenkes
15		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	2018 dan 2019	BPS

No	Kriteria Utama	Indikator	Tahun	Sumber Data		
16	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak	Persentase Sumber Air Minum Layak	2018 dan 2019	BPS	
17		Kategori Akses Sanitasi Layak	Persentase Akses Sanitasi Layak	2018 dan 2019	BPS	
		Kategori Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	2018 dan 2019	BPS	
18	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	2018 dan 2019	BPS	
19		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	2018 dan 2019	BPS	
		Kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase Pengangguran Terbuka	2018 dan 2019	BPS	
20	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaraan Pemerintah	Evaluasi LPPD (Perlu Reformulasi Penghitungan)	2019	Kemendagri	
21		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	2020	Bappenas	
22		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP (Minimal B atau 70 ke atas) (Perlu Reformulasi Penghitungan)	2020	Kemenpan RB	
23		Inovasi Daerah	Kategori Inovasi Pelayanan Publik	Top 45 Inovasi Pelayanan Publik	2020	Kemenpan RB
			Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Perlu Reformulasi Penghitungan)	2020	Balitbang Kemendagri
24			Realisasi Kesepakatan Kerjasama Daerah	2020	Kemendagri	
		Kategori Penerapan E-service	Penerapan e-service pada sektor pelayanan perijinan,	2020	Kemendagri	
		Kategori Perluasan Pelayanan Terpadu	Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perijinan	2020	Kemendagri	
		Kategori Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Kependudukan	2020	Kemendagri	
25	Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah (Perlu Reformulasi Penghitungan)		Peraturan pengurangan dan penanganan sampah plastik	2020	KLHK	
				Pengurangan dan penanganan sampah melalui implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah	2020	KLHK



ISBN 978-623-6080-42-9 (PDF)

